



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
@TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

JL. Kompleks Perkantoran PEMDA Kolaka Utara 93911

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Lasusua, 18 Maret 2024

Inspektur Daerah,



Dr. Hj. Sri Mulyani, ST., MM

Kepala Inspektur Daerah, Gol. IV/b

NIP. 197307242002122004



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kolaka Utara hingga tahun 2023, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah.

Kami, menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi pemerintah daerah guna penyempurnaan laporan ini pada khususnya dan bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kolaka Utara pada umumnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kolaka Utara yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Kolaka Utara serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kolaka Utara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Lasusua, Maret 2024

Bupati Kolaka Utara

SUKANTO TODING



DAFTAR ISI

| | |
|--|----------------|
| Pernyataan Reviu LPPD..... | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.1.1. Penjelasan Umum..... | 1 |
| 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 26 |
| 1.1.3. Penersapan Standar Pelayanan Minimal..... | 62 |
| BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... | 85 |
| 2.1. CAPAIAN MAKRO..... | 85 |
| 2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan | 90 |
| 2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH | 91 |
| BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN | 114 |
| 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota..... | 117 |
| 3.1.1. Target Kinerja..... | 118 |
| 3.1.2. Realisasi..... | 118 |
| 3.2. Permasalahan dan Kendala | 129 |
| 3.3. Saran dan Tindak Lanjut | 129 |
| BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL | 130 |
| 4.1. URUSAN PENDIDIKAN | 133 |
| 4.2. URUSAN KESEHATAN | 147 |
| 4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM | 180 |
| 4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT | 187 |
| 4.5. URUSAN TRANTIBLINMAS | 192 |
| 4.6. URUSAN SOSIAL | 207 |
| 4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN | 212 |
| BAB V PENUTUP | 229 |
| Lampiran 1 | 231 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kolaka Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara berada di Kota Lasusua.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/WaliKota kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang LPPD, Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintahan.

b. Data Geografis

Kabupaten Kolaka Utara terletak diantara $120^{\circ}14'16''$ - $121^{\circ}26'31''$ Bujur Timur dan $02^{\circ}46'45''$ - $03^{\circ}50'50''$ Lintang Selatan, secara geografis Kabupaten Kolaka Utara terletak pada bagian barat daya Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Routa dan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Kolaka Utara memiliki luas wilayah daratan dan pulau-pulau kecil ± 3.391,62 Km² dan luas wilayah perairan laut yang terbentang sepanjang garis-garis pantai (Teluk Bone) dengan luas ± 12.376 Km². Wilayah Administrasi Kabupaten Kolaka Utara meliputi 15 Kecamatan, 127 Desa dan 6 Kelurahan.

Kecamatan Wawo terdiri dari Desa Walasiho, Wawo, Tinukari, Pumbolo, Latawe, dan Salurengko. Kecamatan Rante Angin yakni Kelurahan Rante Angin, Desa Rante Baru, Pohnu, Torotuo, Maroko, Landolia dan Lawekara. Kecamatan Lambai terdiri dari Desa Lambai, Latawaro, Lapasi-pasi, Raoda, Woise, Woitombo dan Tebongeano. Kecamatan Lasusua meliputi Kelurahan Lasusua, Desa Pitulua, Rante Limbong, To'tallang, Tojabi, Ponggiha, Watuliwu, Sulaho, Patowonua, Babussalam, Batu Ganda Permai dan Desa Puncak Monapa. Kecamatan Kodeoha meliputi Kelurahan Mala-mala, Desa Lametuna, Awo, Koroha, Kamisi, Lametuna, Meeto, Kalu-kaluku, Jabal Nur, Jabal Kubis, Sawangaoha, Delang-delang, dan Ainani Tajriani. Kecamatan Tiwu meliputi Desa Tiwu, Lapolu, Lawadia, Mattirobulu, Tanggeao, Watumea dan Desa Tahibua. Kecamatan Ngapa meliputi Kelurahan Iapai, Desa Ngapa, Parutellang, Puurau, Koreiha, Lawolatu, Tadaumera, Watumotaha, Beringin, Padaelo, Nimbuneha dan Desa Mataiwoi. Kecamatan Watunohu meliputi Kelurahan Watunohu, Desa Lahabaru, Tambuha, Sarona, Sapoiha, Nyule, Samaturu dan Desa Leleha. Kecamatan Pakue meliputi Kelurahan Olo-oloho, Desa Kosali, Mikuasi, Kasumeeto, Lalumbundi, Toaha, Kondara, Sipakainge, Lalume, Alipato dan Desa Seuwwa. Kecamatan Pakue Tengah meliputi Desa Lanipa,



Majapahit, Labipi, Latali, Pasampang, Tarengga, To'lemo, Salulotong, Powalaa, dan Desa Kalahunde. Kecamatan Pakue Utara meliputi Kelurahan Pakue, Desa Puundoho, Lawata, Mataleuno, Teposua, Saludongka, Kalo, Amowe dan Desa Lengkong Batu. Kecamatan Batuputih meliputi Kelurahan Batuputih, Desa Latowu, Mosiku, Lelewawo, Batuapi, Bukit Tinggi, Bukit Baru, Parung lampe, Puncak Harapan, Makkuaseng dan Desa Tetebawo. Kecamatan Porehu meliputi Desa Porehu, To'bela, Tanggaruru, Ponggi, Larui, Bangsala, Sarambu dan Desa Tinuna. Serta Kecamatan Tolala meliputi Desa Loka, Tolala, Patikala, Lawaki Jaya, Leleulu dan Desa Bahari.



Secara umum luas wilayah Kabupaten Kolaka Utara menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kolaka Utara

| NO | KECAMATAN | Banyaknya Desa/Kelurahan | LUAS AREA (Km ²) |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Wawo | 6 | 234,99 |
| 2 | Rante Angin | 7 | 189,92 |
| 3 | Lambai | 7 | 162,74 |
| 4 | Lasusua | 12 | 287,67 |
| 5 | Katoi | 7 | 82,64 |
| 6 | Kodeoha | 13 | 250,49 |
| 7 | Tiwu | 7 | 81,92 |
| 8 | Ngapa | 12 | 149,18 |
| 9 | Watunohu | 8 | 109,99 |
| 10 | Pakue | 11 | 313,25 |
| 11 | Pakue Tengah | 10 | 191,82 |
| 12 | Pakue Utara | 8 | 131,25 |
| 13 | Batu Putih | 11 | 374,95 |
| 14 | Porehu | 8 | 647,23 |
| 15 | Tolala | 6 | 183,58 |
| | Total | 133 | 3,391,62 |

Kondisi topografi wilayah yang terdiri dari gunung, bukit, lembah dan laut yang memanjang dari utara ke selatan. Diantara jenis permukaan tersebut terdapat daerah potensial bagi pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pertambangan dengan tingkat kemiringan:

- Lahan dengan lereng antara 0°-2° seluas 1.017,49 km² (30%) sangat baik untuk pemukiman, pertanian dan perikanan.
- Lahan dengan lereng antara 2°-15° seluas 678,32 km² (20%) sangat baik untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan.
- Lahan dengan lereng antara 15°-40° seluas 339,16 km² (10%) sangat baik untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan.
- Lahan dengan lereng antara 40° ke atas seluas 1.356,65 km² (40%) wilayah hutan yang perlu dilestarikan.



Secara geografis Kabupaten Kolaka Utara dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) satuan fisiografis, yaitu pegunungan, perbukitan, karst dan dataran rendah. Terhadap kawasan pegunungan Kabupaten Kolaka Utara diklasifikasikan dalam kawasan pegunungan Tangkelemboke terdapat di wilayah utara sampai perbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi Selatan), kawasan Pegunungan Mekongga yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Kolaka Utara di bagian tengah dan selatan dan kawasan Pegunungan Tinondo pada sebagian kecil wilayah Kabupaten Kolaka Utara bagian Selatan.

Kondisi Iklim di Kabupaten Kolaka Utara beriklim tropis. Musim hujan terjadi pada bulan November-Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Oktober. Namun terkadang terjadi pergeseran waktu musim. Suhu udara rata antara 24-28 derajat celcius.

Curah hujan di Kabupaten Kolaka Utara cukup tinggi, berdasarkan pantauan BMKG Pomalaa tahun 2020 bulan April adalah bulan dengan hari hujan terbanyak. Sedangkan curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Februari (362.9 mm).

Kabupaten Kolaka Utara Memiliki sungai yang tersebar di 15 kecamatan yang memiliki potensi sebagai sumber daya listrik, irigasi, industri rumah tangga, dan pariwisata. Sungai yang dimaksud antara lain sungai Rante Angin, Latawaro, Tabuso, Rante Limbong, Indewe, Awo, Mala-mala, Meeto, Lapolu, Watunohu, Puurau, Kosali, Mikuasi, Pasampang, Latali, Pakue, Batuputih, Latowu, dan sungai Larui

c. **Jumlah Penduduk**

Berdasarkan data agregat kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, jumlah penduduk Kolaka Utara adalah sebesar 140.488 jiwa, bertambah sebanyak 3.084 jiwa dibandingkan



jumlah penduduk tahun 2022 yang berjumlah 137.404 dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 68.493 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 71.995 jiwa, Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023 menurut Kecamatan diperlihatkan pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan

| KODE | WILAYAH | PENDUDUK | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | LK | PR | JML |
| 74,08 | KAB. KOLAKA UTARA | 71.995 | 68.493 | 140.488 |
| 74.08.01 | LASUSUA | 14.348 | 13.892 | 28.240 |
| 74.08.02 | PAKUE | 5.418 | 5.140 | 10.558 |
| 74.08.03 | BATU PUTIH | 4.545 | 4.296 | 8.841 |
| 74.08.04 | RANTE ANGIN | 3.102 | 2.958 | 6.060 |
| 74.08.05 | KODEOHA | 5.664 | 5.548 | 11.212 |
| 74.08.06 | NGAPA | 8.629 | 7.984 | 16.613 |
| 74.08.07 | WAWO | 3.512 | 3.445 | 6.957 |
| 74.08.08 | LAMBAI | 3.633 | 3.373 | 7.006 |
| 74.08.09 | WATUNOHU | 3.600 | 3.425 | 7.025 |
| 74.08.10 | PAKUE TENGAH | 3.876 | 3.656 | 7.532 |
| 74.08.11 | PAKUE UTARA | 4.137 | 3.882 | 8.019 |
| 74.08.12 | POREHU | 3.386 | 3.192 | 6.578 |
| 74.08.13 | KATOI | 3.709 | 3.498 | 7.207 |
| 74.08.14 | TIWU | 2.406 | 2.294 | 4.700 |
| 74.08.15 | TOLALA | 2.030 | 1.910 | 3.940 |

Data Per 31 Desember 2023 Dinas Dukcapil Kolaka Utara

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Kolaka Utara terbanyak berada dikecamatan Lasusua



dengan jumlah 28.240 jiwa atau sekitar 20,10 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Kolaka Utara dan Kecamatan Tolala tercatat sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni sebesar 3.940 jiwa atau 2,80 persen.

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan

Jumlah kecamatan sebanyak 15, desa sebanyak 127 dan kelurahan sebanyak 6 di kabupaten kolaka utara, adapun persebaran desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3.
Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan

| NO | | KECAMATAN | DESA/ KEL |
|----------|---|--------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | | WAWO | |
| 1 | 1 | | WAWO |
| 2 | 2 | | PUUMBOLO |
| 3 | 3 | | TINUKARI |
| 4 | 4 | | WALASIHO |
| 5 | 5 | | SALURENGKO |
| 6 | 6 | | ULU WAWO |
| 7 | 7 | | LATAWE |
| 2 | | LAMBAI | |
| 8 | 1 | | LAMBAI |
| 9 | 2 | | TEBONGEANO |
| 10 | 3 | | LAPASI-PASI |
| 11 | 4 | | LATAWARO |
| 12 | 5 | | WOITOMBO |
| 13 | 6 | | WOISE |
| 14 | 7 | | RAODA |
| 3 | | RANTE ANGIN | |
| 15 | 1 | | KEL. RANTE ANGIN |
| 16 | 2 | | LANDOLIA |



| | | | |
|----------|----|----------------|-------------------|
| 17 | 3 | | LAWEKARA |
| 18 | 4 | | RANTE BARU |
| 19 | 5 | | POHU |
| 20 | 6 | | TOROTUO |
| 21 | 7 | | MAROKO |
| 4 | | LASUSUA | |
| 22 | 1 | | KEL. LASUSUA |
| 23 | 2 | | PUNCAK MONAPA |
| 24 | 3 | | BATU GANDA PERMAI |
| 25 | 4 | | BABUSSALAM |
| 26 | 5 | | WATULIU |
| 27 | 6 | | TOJABI |
| 28 | 7 | | RANTE LIMBONG |
| 29 | 8 | | PITULUA |
| 30 | 9 | | PONGGIHA |
| 31 | 10 | | TO'TALLANG |
| 32 | 11 | | SULAHO |
| 33 | 12 | | PATOWANUA |
| 5 | | KATOI | |
| 34 | 1 | | KATOI |
| 35 | 2 | | UJUNG TOBAKU |
| 36 | 3 | | SIMBULA |
| 37 | 4 | | MARUGE |
| 38 | 5 | | LAMBUNO |
| 39 | 6 | | LANIPA-NIPA |
| 1 | | 2 | 3 |
| 6 | | KODEOHA | |
| 40 | 1 | | KEL. MALA-MALA |
| 41 | 2 | | KOROHA |
| 42 | 3 | | KAMISI |
| 43 | 4 | | JABAL NUR |
| 44 | 5 | | MEETO |
| 45 | 6 | | JABAL KUB IS |
| 46 | 7 | | KALU-KALUKU |
| 47 | 8 | | LAMETUNA |
| 48 | 9 | | AWO |
| 49 | 10 | | SAWANGAOHA |
| 50 | 11 | | DELANG-DELANG |



| | | | |
|-----------|----|-----------------|-----------------|
| 51 | 12 | | AINANI TAJRIANI |
| 7 | | TIWU | |
| 52 | 1 | | TIWU |
| 53 | 2 | | LAPOLU |
| 54 | 3 | | MATTIRO BULU |
| 55 | 4 | | LAWADIA |
| 56 | 5 | | WATUMEA |
| 57 | 6 | | TANGGEO |
| 58 | 7 | | TAHIBUA |
| 8 | | NGAPA | |
| 59 | 1 | | KEL. LAPAI |
| 60 | 2 | | PARUTELLANG |
| 61 | 3 | | WATUMOTAHA |
| 62 | 4 | | BERINGIN |
| 63 | 5 | | NGAPA |
| 64 | 6 | | TADAU MERA |
| 65 | 7 | | KOREIHA |
| 66 | 8 | | LAWOLATU |
| 67 | 9 | | PUURAU |
| 68 | 10 | | PADAELO |
| 69 | 11 | | NIMBUNEHA |
| 70 | 12 | | MATAIWOI |
| 9 | | WATUNOHU | |
| 71 | 1 | | WATUNOHU |
| 72 | 2 | | TAMBUHA |
| 73 | 3 | | SORONA |
| 74 | 4 | | LAHABARU |
| 75 | 5 | | SAPOIHA |
| 76 | 6 | | NYULE |
| 77 | 7 | | SAMATURU |
| 78 | 8 | | LELEHAO |
| 10 | | PAKUE | |
| 79 | 1 | | KEL. OLO-OLOHO |
| 80 | 2 | | SIPAKAINGE |
| 81 | 3 | | KONDARA |
| 82 | 4 | | KOSALI |
| 83 | 5 | | KASUMEETO |
| 84 | 6 | | LALOMBUNDI |



| | | | |
|-----------|----|---------------------|-----------------|
| 85 | 7 | | MIKUASI |
| 86 | 8 | | TOAHA |
| 87 | 9 | | ALI PATO |
| 88 | 10 | | SEUWWA |
| 89 | 11 | | LALUME |
| 11 | | PAKUE TENGAH | |
| 90 | 1 | | LATALI |
| 91 | 2 | | MAJAPAHIT |
| 92 | 3 | | PASAMPANG |
| 93 | 4 | | TO'LEMO |
| 94 | 5 | | POWALA'A |
| 95 | 6 | | LABIPI |
| 96 | 7 | | LANIPA |
| 97 | 8 | | TARENGGA |
| 98 | 9 | | SALU LOTONG |
| 99 | 10 | | KALAHUNDE |
| 12 | | PAKUE UTARA | |
| 100 | 1 | | PAKUE |
| 101 | 2 | | MATALEUNO |
| 102 | 3 | | TEPOSUA |
| 103 | 4 | | PUUNDOHO |
| 104 | 5 | | LAWATA |
| 105 | 6 | | SALUDONGKA |
| 106 | 7 | | AMOE |
| 107 | 8 | | KALO |
| 108 | 9 | | LENGKONG BATU |
| 13 | | BATU PUTIH | |
| 109 | 1 | | KEL. BATU PUTIH |
| 110 | 2 | | LATOWU |
| 111 | 3 | | MOSIKU |
| 112 | 4 | | BATU API |
| 113 | 5 | | LELEWAWO |
| 114 | 6 | | BUKIT TINGGI |
| 115 | 7 | | BUKIT BARU |
| 116 | 8 | | PUNCAK HARAPAN |
| 117 | 9 | | PARUNG LAMPE |
| 118 | 10 | | MAKKUASENG |
| 119 | 11 | | TETEBAWO |



| 14 | | TOLALA | |
|-----|---|--------|-------------|
| 120 | 1 | | TOLALA |
| 121 | 2 | | PATIKALA |
| 122 | 3 | | LAWAKI JAYA |
| 123 | 4 | | LOKA |
| 124 | 5 | | LELEULU |
| 125 | 6 | | BAHARI |
| 15 | | POREHU | |
| 126 | 1 | | POREHU |
| 127 | 2 | | TANGGA RURU |
| 128 | 3 | | LARUI |
| 129 | 4 | | PONGGI |
| 130 | 5 | | TOBELA |
| 131 | 6 | | TINUNA |
| 132 | 7 | | BANGSALA |
| 133 | 8 | | SARAMBU |

Sumber Data : Dinas PMD Kolaka Utara Tahun 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Organisasi perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara meliputi organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah



Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari:

- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Tata Pemerintahan
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
- Asisten II Bidang Pembangunan dan Kepegawaian
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Perkonomian dan Sumber Daya Alam
 - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
- Asisten III Bidang Administrasi dan Keuangan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
 - Bagian Perencanaan Dan Keuangan
- Staf Ahli
 - Bidang Hukum dan Politik
 - Bidang Pemerintahan
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 - Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Sekretariat DPRD



Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari:

- Bagian Umum dan Keuangan
- Bagian Penganggaran dan Pengawasan
- Bagian Hukum dan Persidangan
- Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, di Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 26 dinas daerah yaitu:

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Dinas Sosial
- Dinas Pariwisata
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Perkebunan dan Peternakan
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Dinas Perikanan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Kebakaran
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Perdagangan
- Dinas Perindustrian
- Dinas Perpustakaan
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
- Dinas Kearsipan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Perhubungan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten, di Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 8 lembaga teknis daerah yakni:
 - Inspektorat Daerah
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Keuangan Daerah
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Badan Penelitian dan Pengembangan
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
 - Kecamatan



Tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dalam wilayah kecamatan. Di Kabupaten Kolaka Utara terdapat 15 kecamatan yaitu: Kecamatan Wawo, Ranteangin, Lambai, Lasusua, Katoi, Kodeoha, Tiwu, Ngapa, Watunohu, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Batu Putih, Porehu, dan Tolala.

- Kelurahan

Tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Kolaka Utara terdapat 6 kelurahan, yakni Kelurahan Lasusua, Ranteangin, Mala-mala, Olo-Oloho, Lapai dan Batu Putih.

2. Pegawai Pemerintah

Berdasarkan data yang ada hingga 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kolaka Utara berjumlah 3.667 orang terdiri dari 1.373 laki-laki dan 2.094 perempuan. Ditinjau dari golongannya sebaran PNS Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Unit Organisasi dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

| No. | Unit Organisasi | Jumlah | | Total |
|-----|------------------------------------|--------|----|-------|
| | | LK | PR | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 5 | 1 | 6 |
| | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | | | |
| | PNS | 2 | 4 | 6 |
| | PPPK | 1 | 0 | 1 |
| | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |



| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| | PNS | 2 | 6 | 8 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | |
| | PNS | 6 | 3 | 9 |
| | PPPK | 1 | 0 | 1 |
| | BAGIAN UMUM | | | |
| | PNS | 9 | 7 | 16 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| | BAGIAN ORGANIS4SI | | | |
| | PNS | 6 | 3 | 9 |
| | PPPK | 1 | 0 | 1 |
| | BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA | | | |
| | PNS | 5 | 1 | 6 |
| | PPPK | 2 | 0 | 2 |
| | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | | | |
| | PNS | 8 | 1 | 9 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | | | |
| | PNS | 5 | 3 | 8 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| | BAGIAN HUKUM | | | |
| | PNS | 7 | 1 | 8 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | |
| | PNS | 5 | 3 | 8 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| | PNS | 16 | 12 | 28 |
| | PPPK | 2 | 1 | 3 |
| 3 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | |
| | PNS | 15 | 14 | 29 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| | PNS | 13 | 6 | 19 |
| | PPPK | 1 | 0 | 1 |
| 5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| | PNS | 18 | 25 | 43 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| | PNS | 9 | 5 | 14 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | PNS | 24 | 8 | 32 |



| | | | | |
|----|--|----|----|-----|
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DINAS KEARSIPAN | | | |
| | PNS | 7 | 9 | 16 |
| | PPPK | 1 | 0 | 1 |
| 9 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| | PNS | 13 | 2 | 15 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| | PNS | 16 | 15 | 31 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| | PNS | 14 | 10 | 24 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DINAS KESEHATAN | | | |
| | PNS | 28 | 81 | 109 |
| | PPPK | 1 | 8 | 9 |
| | PUSKESMAS BATU PUTIH | | | |
| | PNS | 7 | 21 | 28 |
| | PPPK | 0 | 3 | 3 |
| | PUSKESMAS KATOI | | | |
| | PNS | 4 | 26 | 30 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| | PUSKESMAS LAMBAI | | | |
| | PNS | 7 | 25 | 32 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| | PUSKESMAS LAPAI | | | |
| | PNS | 4 | 34 | 38 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| | PUSKESMAS LASUSUA | | | |
| | PNS | 4 | 59 | 63 |
| | PPPK | 0 | 3 | 3 |
| | PUSKESMAS LATALI | | | |
| | PNS | 5 | 25 | 30 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| | PUSKESMAS LATOWU | | | |
| | PNS | 5 | 17 | 22 |
| | PPPK | 1 | 1 | 2 |
| | PUSKESMAS MALA-MALA | | | |
| | PNS | 3 | 27 | 30 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| | PUSKESMAS PAKUE | | | |
| | PNS | 6 | 29 | 35 |
| | PPPK | 0 | 3 | 3 |



| | | | | |
|----|--|----|----|----|
| | PUSKESMAS PAKUE UTARA | | | |
| | PNS | 2 | 21 | 23 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| | PUSKESMAS POREHU | | | |
| | PNS | 8 | 18 | 26 |
| | PPPK | 1 | 1 | 2 |
| | PUSKESMAS RANTEANGIN | | | |
| | PNS | 6 | 28 | 34 |
| | PPPK | 0 | 3 | 3 |
| | PUSKESMAS TIWU | | | |
| | PNS | 5 | 21 | 26 |
| | PPPK | 1 | 1 | 2 |
| | PUSKESMAS TOLALA | | | |
| | PNS | 3 | 17 | 20 |
| | PPPK | 0 | 3 | 3 |
| | PUSKESMAS WATUNOHU | | | |
| | PNS | 4 | 27 | 31 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| | PUSKESMAS WAWO | | | |
| | PNS | 3 | 26 | 29 |
| | PPPK | 1 | 2 | 3 |
| 13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | | | |
| | PNS | 10 | 12 | 22 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| | PNS | 13 | 10 | 23 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DINAS KOPERASI DAN UKM | | | |
| | PNS | 7 | 13 | 20 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | PNS | 17 | 10 | 27 |
| | PPPK | 1 | 0 | 1 |
| 17 | DINAS PARIWISATA | | | |
| | PNS | 9 | 21 | 30 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| 18 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| | PNS | 35 | 19 | 54 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| 19 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | | | |
| | PNS | 12 | 6 | 18 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |



| | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|
| | PNS | 20 | 11 | 31 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA | | | |
| | PNS | 6 | 17 | 23 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| 22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | | | |
| | PNS | 11 | 16 | 27 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| 23 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | PNS | 37 | 33 | 70 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| | SMP | | | |
| | PNS | 115 | 183 | 298 |
| | PPPK | 19 | 51 | 70 |
| | SD | | | |
| | PNS | 205 | 523 | 728 |
| | PPPK | 29 | 128 | 157 |
| | TK | | | |
| | PNS | 0 | 42 | 42 |
| | PPPK | 0 | 3 | 3 |
| | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) | | | |
| | PNS | 2 | 13 | 15 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | | | |
| | PNS | 6 | 16 | 22 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| 25 | DINAS PERDAGANGAN | | | |
| | PNS | 16 | 6 | 22 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DINAS PERHUBUNGAN | | | |
| | PNS | 37 | 7 | 44 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DINAS PERIKANAN | | | |
| | PNS | 15 | 18 | 33 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DINAS PERINDUSTRIAN | | | |
| | PNS | 12 | 10 | 22 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| 29 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | | | |
| | PNS | 17 | 11 | 28 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| 30 | DINAS PERPUSTAKAAN | | | |
| | PNS | 4 | 16 | 20 |



| | | | | |
|----|---|----|-----|-----|
| | PPPK | 1 | 0 | 1 |
| 31 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | PNS | 20 | 7 | 27 |
| | PPPK | 0 | 2 | 2 |
| 32 | DINAS SATPOL PP | | | |
| | PNS | 32 | 5 | 37 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DINAS SOSIAL | | | |
| | PNS | 16 | 18 | 34 |
| | PPPK | 1 | 1 | 2 |
| 34 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | |
| | PNS | 28 | 29 | 57 |
| | PPPK | 5 | 0 | 5 |
| 35 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | |
| | PNS | 18 | 7 | 25 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 36 | INSPEKTORAT | | | |
| | PNS | 15 | 24 | 39 |
| | PPPK | 0 | 1 | 1 |
| 37 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | PNS | 17 | 20 | 37 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RSUD DJAFAR HARUN | | | |
| | PNS | 34 | 149 | 183 |
| | PPPK | 1 | 6 | 7 |
| 39 | KEC. WAWO | | | |
| | PNS | 15 | 7 | 22 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KEC.RANTEANGIN | | | |
| | PNS | 14 | 9 | 23 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KEC. LAMBAI | | | |
| | PNS | 7 | 5 | 12 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KEC. LASUSUA | | | |
| | PNS | 12 | 6 | 18 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KEC.KATOI | | | |
| | PNS | 14 | 10 | 24 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KEC.KODEOHA | | | |
| | PNS | 8 | 7 | 15 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |



| | | | | |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 45 | KEC. TIWU | | | |
| | PNS | 6 | 4 | 10 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KEC.NGAPA | | | |
| | PNS | 12 | 9 | 21 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KEC. WATUNOHU | | | |
| | PNS | 15 | 3 | 18 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KEC.PAKUE | | | |
| | PNS | 7 | 10 | 17 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KECAMATAN PAKUE TENGAH | | | |
| | PNS | 16 | 6 | 22 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 50 | KEC.PAKUE UTARA | | | |
| | PNS | 17 | 8 | 25 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KEC. PUREHU | | | |
| | PNS | 9 | 5 | 14 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 52 | KEC.BATUPUTIH | | | |
| | PNS | 15 | 11 | 26 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KEC. TOLALA | | | |
| | PNS | 8 | 6 | 14 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 54 | KELURAHAN RANTEANGIN | | | |
| | PNS | 6 | 2 | 8 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 55 | KELURAHAN LASUSUA | | | |
| | PNS | 4 | 3 | 7 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 56 | KELURAHAN MALA MALA | | | |
| | PNS | 3 | 5 | 8 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 57 | KELURAHAN LAPAI | | | |
| | PNS | 6 | 4 | 10 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| 58 | KELURAHAN OLO LOHO | | | |
| | PNS | 8 | 6 | 14 |
| | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 59 | KELURAHAN BATU PUTIH | | | |



| | | | | |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| | PNS | 5 | 6 | 11 |
| | PPPK | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 1373 | 2294 | 3667 |

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kolaka utara

Sedangkan data mengenai Jumlah PNS Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Kab. Kolaka Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

| Tingkat Pendidikan <i>Education Level</i> | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sampai dengan SD | 0 | 0 | 0 |
| SLTP/ Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| SMA/ Sederajat | 142 | 79 | 221 |
| Diploma I | 0 | 1 | 1 |
| Diploma II | 10 | 21 | 31 |
| Diploma III | 38 | 224 | 262 |
| S1 | 1060 | 1834 | 2894 |
| S2 | 121 | 134 | 255 |
| S3 | 2 | 0 | 2 |
| | 1373 | 2294 | 3667 |

Sumber: BKPSDM Kolaka utara 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023. Secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 1.6
Target dan Realisasi dari Struktur APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023

| Rekening | | | | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % |
|----------|---|----|---|---|----------------------|--------------------|--------|
| A | K | J | O | | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | | | | PENDAPATAN DAERAH | 1.001.347.936.767,00 | 970.266.672.565,42 | 96,90 |
| 4 | 1 | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 53.131.196.977,00 | 61.397.419.442,42 | 115,56 |
| 4 | 1 | 01 | | Pendapatan Pajak Daerah | 9.520.000.000,00 | 8.916.779.680,00 | 93,66 |
| 4 | 1 | 02 | | Pendapatan Retribusi Daerah | 3.526.431.540,00 | 3.716.135.331,00 | 105,38 |
| 4 | 1 | 03 | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 15.711.134.292,00 | 15.711.134.292,00 | 100,00 |
| 4 | 1 | 04 | | Lain-lain PAD yang Sah | 24.373.631.145,00 | 33.053.370.139,42 | 135,61 |
| 4 | 2 | | | PENDAPATAN TRANSFER | 934.477.375.439,00 | 897.711.231.757,00 | 96,07 |
| 4 | 2 | | | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 782.702.808.844,00 | 742.050.767.485,00 | 94,81 |
| 4 | 2 | 01 | | Dana Bagi Hasil | 163.097.494.844,00 | 126.824.991.096,00 | 77,76 |
| 4 | 2 | 01 | | Dana Alokasi Umum | 470.995.239.000,00 | 470.968.071.500,00 | 99,99 |
| 4 | 2 | 01 | | Dana Alokasi Khusus - Fisik | 53.695.115.000,00 | 52.276.336.249,00 | 97,36 |
| 4 | 2 | 01 | | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 94.914.960.000,00 | 91.981.368.640,00 | 96,91 |
| 4 | 2 | | | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 129.372.250.000,00 | 129.372.228.850,00 | 100,00 |
| 4 | 2 | 01 | | Dana Insentif Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 01 | | Dana Desa | 107.186.212.000,00 | 107.186.190.850,00 | 100,00 |
| 4 | 2 | 01 | | Insentif Fiskal | 22.186.038.000,00 | 22.186.038.000,00 | 100,00 |
| 4 | 2 | | | Transfer Pemerintah Daerah | 22.402.316.595,00 | 26.288.235.422,00 | 117,35 |
| 4 | 2 | 02 | | Dana Bagi Hasil | 22.402.316.595,00 | 26.288.235.422,00 | 117,35 |
| 4 | 2 | 02 | | Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | | | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 13.739.364.351,00 | 11.158.021.366,00 | 81,21 |
| 4 | 3 | 01 | | Hibah | 4.772.053.400,00 | 4.125.468.450,00 | 86,45 |
| 4 | 3 | 03 | | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 8.967.310.951,00 | 7.032.552.916,00 | 78,42 |



| | | | | | | | |
|---|---|----|--|--|----------------------|----------------------|--------|
| 5 | | | | BELANJA DAERAH | 1.062.962.031.086,00 | 1.016.980.016.020,53 | 95,67 |
| 5 | 1 | | | OPERASI | 705.235.041.919,00 | 667.994.809.080,53 | 94,72 |
| 5 | 1 | 01 | | Pegawai | 343.650.429.772,00 | 320.393.401.690,00 | 93,23 |
| 5 | 1 | 02 | | Barang dan Jasa | 326.740.204.729,00 | 313.249.574.972,53 | 95,87 |
| 5 | 1 | 03 | | Bunga | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 1 | 04 | | Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | 05 | | Hibah | 34.311.907.418,00 | 33.826.457.418,00 | 98,59 |
| 5 | 1 | 06 | | Bantuan Sosial | 532.500.000,00 | 525.375.000,00 | 98,66 |
| 5 | 2 | | | MODAL | 181.484.893.628,00 | 175.517.821.501,00 | 96,71 |
| 5 | 2 | 01 | | Tanah | 104.320.049,00 | 104.319.190,00 | 100,00 |
| 5 | 2 | 02 | | Peralatan dan Mesin | 34.765.692.869,00 | 33.380.578.527,00 | 96,02 |
| 5 | 2 | 03 | | Gedung dan Bangunan | 68.773.648.373,00 | 64.868.822.269,00 | 94,32 |
| 5 | 2 | 04 | | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 70.057.377.559,00 | 69.583.625.827,00 | 99,32 |
| 5 | 2 | 05 | | Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 06 | | Aset Lainnya | 7.783.854.778,00 | 7.580.475.688,00 | 97,39 |
| 5 | 3 | | | TIDAK TERDUGA | 4.341.967.001,00 | 1.567.278.051,00 | 36,10 |
| 5 | 3 | 01 | | Tidak Terduga | 4.341.967.001,00 | 1.567.278.051,00 | 36,10 |
| 5 | 4 | | | TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL | 171.900.128.538,00 | 171.900.107.388,00 | 100,00 |
| 5 | 4 | 01 | | Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa | 1.304.643.154,00 | 1.304.643.154,00 | 100,00 |
| 5 | 4 | 02 | | Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | 02 | | Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | 02 | | Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa | 170.595.485.384,00 | 170.595.464.234,00 | 100,00 |
| | | | | SURPLUS/DEFISIT | (61.614.094.319,00) | (46.713.343.455,11) | 75,82 |
| 6 | | | | PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO) | 61.614.094.319,00 | 61.614.094.319,81 | 100,00 |
| 6 | 1 | | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 64.614.094.319,00 | 64.614.094.319,81 | 100,00 |
| 6 | 1 | 01 | | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 56.307.277.873,00 | 56.307.277.872,95 | 100,00 |
| 6 | 1 | 01 | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 8.306.816.446,00 | 8.306.816.446,86 | 100,00 |
| 6 | 1 | 03 | | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 10 | | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|---|---|----|--|---|------------------|-------------------|--------|
| 6 | 2 | | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 100,00 |
| 6 | 2 | 01 | | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 02 | | Penyertaan Modal/Investasi Daerah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 100,00 |
| 6 | 2 | 03 | | Pembayaran Pinjaman - Pmerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 09 | | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA) | 0,00 | 14.900.750.864,70 | |
| | | | | RASIO KEMANDIRIAN | | | |



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

1. Fungsi Pendidikan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar anggaran pendidikan jumlahnya sebesar 20 persen dari total anggaran pembangunan. Amanah undang-undang ini telah realisasi dalam APBD Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2007 yang lalu hingga saat ini, meskipun telah mendapatkan porsi anggaran yang telah memadai namun nampaknya belum dapat secara signifikan menggenjot peningkatan mutu luaran pendidikan hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya angka kelulusan alumni SLMTA di Perguruan Tinggi Negeri pada jurusan-jurusan favorite seperti Jurusan Kedokteran dan ilmu-ilmu eksakta

2. Fungsi Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar Rakyat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indikator status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan perkapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal persoalan paling mendasar yang juga dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara adalah terbatasnya peralatan kesehatan serta tidak adanya tenaga dokter spesialis. Selain itu tenaga medis dan paramedis yang tersedia jumlahnya masih sangat kurang.



3. Pekerjaan Umum

Kondisi infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum, khususnya pengairan dan transportasi, di Kabupaten Kolaka Utara saat ini boleh dikatakan jauh dari memadai. Beberapa jaringan irigasi tidak dapat berfungsi secara optimal untuk mengairi lahan lahan pertanian karena kerusakan akibat rendahnya sistem operasi dan pemeliharaan maupun karena tidak didukung dengan jaringan tersier yang baik. Sementara itu penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga juga belum seimbang dengan kondisi sumber daya air yang sebenarnya memadai titik pada sisi lain tingkat kerusakan pada Daerah Aliran Sungai semakin parah sebagai akibat pengelolaan hutan yang tidak terkendali, baik untuk kepentingan pertanian maupun kegiatan illegal logging.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi gerakan roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Penduduk kabupaten kolaka utara terus menerus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ketahun. Seiring dengan itu, jumlah penduduk usia kerja pun semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja mencapai 74.031 yang terdiri dari 46.344 laki-laki dan 27.687 perempuan.

Kendala utama yang dihadapi didalam kesiapan tenaga kerja adalah kurangnya keterampilan teknis bagi tenaga kerja yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja. Seperti tenaga kerja pada sektor pertanian hanya bermodalkan pengetahuan turun-temurun sebagai petani tidak dibarengi dengan teknologi pertanian, demikian halnya pada sektor lainnya.

5. Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 telah menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini tentu menjadi prestasi tersendiri yang telah diraih oleh pemerintah daerah



Kolaka Utara khususnya dalam menata administrasi keuangan daerah. Namun di lain sisi prestasi WTP delapan kali berturut-turut menjadi tantangan tersendiri untuk mempertahankan opini.

Permasalahan keuangan daerah lainnya ditunjukkan dengan kemampuan fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tanggung jawab untuk mengelaborasi dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kendala regulasi dan kendala teknis dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dana kegiatan ekonomi. Kondisi kawasan pedesaan umumnya masih tetap dicirikan oleh masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternative lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat Hal terjadi sebagai akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja. tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat serta terbatasnya organisasi sosial penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya anggaran yang cukup besar yang diturunkan ke desa belum mampu menuntaskan permasalahan di tingkat desa.

7. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Pertanian merupakan salah satu pilar perekonomian Kabupaten Kolaka Utara. Ini dapat dibuktikan dengan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kolaka Utara, begitu pula dengan pelibatan tenaga kerja yang menempati urutan pertama. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kolaka Utara sebesar 41,65 persen sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap disektor ini sebanyak 46.419 jiwa. Pada tahun 2016 luas areal tanaman kakao sebesar 79.501,0 ha dengan produksi 51.520,2 ton, sedangkan luas areal tanaman cengkeh sebesar 11.453,0 ha dengan produksi 6.071,1 ton. Selain komoditi andalan tersebut, komoditas pertanian lain yang juga banyak dibudidayakan



adalah kelapa dalam, vanili, lada, kemiri, jambu mete, nila dan kopi. Permasalahan dalam pembangunan sub sektor perkebunan yang dampaknya paling besar adalah munculnya gejala perubahan iklim (global canges) yang menyebabkan iklim basah hampir terjadi sepanjang tahun. Pada sisi lain, kemampuan adaptasi aklimatisasi generatif vegetasi perkebunan terhadap iklim global canges sangat rendah. Hal ini berdampak pada menurunnya produktivitas dan mutu komoditi kakao, cengkeh dan beberapa komoditas andalan lainnya.

Selain karena penanganan pasca panen yang kurang baik, penyebab utama penurunan ini adalah karena adanya serangan hama Penggerek Buah Kakao yang hingga saat ini belum ditemukan cara yang efektif untuk membasminya. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk didalamnya kerjasama dengan pihak asing, akan tetapi sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Akibat kondisi ini bukan hanya dirasakan oleh petani tetapi berpengaruh sangat besar terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Kolaka Utara.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

1. Visi

Memperhatikan kondisi wilayah Kolaka Utara dengan tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 adalah ***Mewujudkan Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat***. Dalam visi RPJMD Sulawesi Tenggara terdapat tiga pokok visi yakni ***Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat***, maka visi pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017-2022 adalah: "***Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi Tenggara***".

Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi Tenggara dimana rumusan visi ini merupakan satu kesatuan konsep



tentang kondisi pada tahun 2022 yang hendak diwujudkan yang di dalamnya terdapat tiga pilar atau pokok visi. Pokok visi pertama adalah “tatakelola pemerintahan yang baik” yakni kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dengan basis nilai-nilai kompetensi, disiplin kerja, etos kerja, dedikasi, akuntabilitas dan bebas korupsi. Indikator dari pokok visi ini adalah tatakelola pemerintahan yang baik.

Pokok visi kedua adalah “akselerasi pembangunan dan pelayanan” yakni kondisi dimana berlangsung akselerasi pembangunan yang berorientasi pada revitalisasi sector pertanian, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan pengembangan kesempatan usaha berbasis ekonomi rakyat. Indikator dari pokok visi ini adalah akselerasi kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan dasar.

Pokok visi ketiga adalah “masyarakat madani” yakni kondisi dimana konstruksi sosial dan kelembagaan masyarakat berkembang dan menguat dalam basis yang berbudaya, berkarya dan berakhlak mulia dalam tatanan kehidupan madani. Indikator dari pokok visi ini adalah kondisi tertib, tentram, nyaman dan berada dalam masyarakat.

2. Misi

Berdasarkan penjelasan Permedagri 86/2017, misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang hendak ditempuh dalam mewujudkan visi. Rumusan misi ini berkorelasi dengan pokok visi yang hendak diwujudkan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan misi RPJMD Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut.:

1) Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik, evisien, efektif, akuntabel dan bebas dari korupsi

Misi ini mencakup upaya umum dalam memperbaiki sistem perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban kinerja, keterbukaan kepada publik dan pelayanan administrasi umum.



2) Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi, diversifikasi dan produksi sector pertanian dan perikanan secara menyeluruh

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan melalui intensifikasi serta mendiversifikasi produk pertanian dan perikanan tersebut melalui proses pengolahan.

3) Meningkatkan kapasitas dan akses pelayanan kesehatan secara lebih mudah, nyaman dan merata

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas manusia terkait derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan pemerataan pelayanan pada seluruh masyarakat pada berbagai lapisan dan golongan serta seluruh bagian wilayah.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan berbasis kompetensi, berkeadilan dan terjangkau

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas manusia terkait derajat pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada seluruh wilayah

5) Mengembangkan dan membina keberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produksi dan daya saing produk usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

6) Mengembangkan dan memberdayakan pemuda wirausaha mandiri dan tangguh

Misi ini mencakup upaya umum dalam melahirkan dan memberdayakan pemuda wirausaha mandiri berbasis pengelolaan sumber daya lokal dan mengandalkan penerapan teknologi maju dan tepat guna.

7) Mengembangkan, meningkatkan dan memelihara infrastruktur daerah



Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan fungsional dari infrastruktur transportasi, perhubungan, pemukiman dan perumahan serta fasilitas ekonomi wilayah.

8) Menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan semangat keberagaman

Misi ini mencakup upaya umum dalam menggalakkan perbaikan mental spiritual pada seluruh element dan pemamku kepentingan Kabupaten Kolaka Utara baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

STARATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Kolaka Utara merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan. Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah rumusan strategi harus dijadikan sebagai salah satu rujukan penting (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Desain perencanaan pembangunan daerah terdiri dari dua bagian penting yakni: 1) **Perencanaan Strategik** yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah; 2) **Perencanaan Operasional** yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja pelayanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maka dianggap strategis. Karena itu, penyusunan Perencanaan dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pada masa kekosongan Bupati Definitif yang akan menjadi dasar bagi Pejabat Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.

Adapun arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan pemahaman tersebut, pertama-tama dijabarkan poin kebijakan dalam mengoperasionalkan setiap strategi. Setelah itu dibuat arahan prioritas kebijakan tahunan untuk empat tahun periode RPD ini. Arah kebijakan dalam bentuk prioritas kebijakan selama empat tahun periode RPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.



Tabel 1.7
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara merata dan terjangkau | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN bidang kesehatan. | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN bidang kesehatan. | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN bidang kesehatan. | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN bidang kesehatan. |
| | | | | Perbaikan sistem pelayanan sesuai SPM Kesehatan | Perbaikan sistem pelayanan sesuai SPM Kesehatan | Perbaikan sistem pelayanan sesuai SPM Kesehatan | Perbaikan sistem pelayanan sesuai SPM Kesehatan |
| | | | | Peningkatan sarana prasarana Kesehatan dasar dan rujukan | Peningkatan sarana prasarana Kesehatan dasar dan rujukan | Peningkatan sarana prasarana Kesehatan dasar dan rujukan | Peningkatan sarana prasarana Kesehatan dasar dan rujukan |
| | | | | Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan SOP | Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan SOP | Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan SOP | Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan SOP |
| | | | | Peningkatan manajemen pelayanan menururumah sakit yang terakreditasi C | Peningkatan manajemen pelayanan menururumah sakit yang terakreditasi C | Peningkatan manajemen pelayanan menururumah sakit yang terakreditasi C | Peningkatan manajemen pelayanan menururumah sakit yang terakreditasi C |
| | | 2. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat pemuda dan olahraga | Meningkatkan penyelenggaraan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas | Meningkatkan manajemen pelayanan PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai SPM Bidang pendidikan | Meningkatkan manajemen pelayanan PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai SPM Bidang pendidikan | Meningkatkan manajemen pelayanan PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai SPM Bidang pendidikan | Meningkatkan manajemen pelayanan PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai SPM Bidang pendidikan |
| | | | | Pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan | Pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan | Pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan | Pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan |



| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | secara berkelanjutan melalui Pendidikan formal dan non formal | secara berkelanjutan melalui Pendidikan formal dan non formal | secara berkelanjutan melalui Pendidikan formal dan non formal | secara berkelanjutan melalui Pendidikan formal dan non formal |
| | | | Meningkatkan pembinaan pemuda olahraga | Meningkatkan pembinaan kewirausahaan kepada pemuda | Meningkatkan pembinaan kewirausahaan kepada pemuda | Meningkatkan pembinaan kewirausahaan kepada pemuda | Meningkatkan pembinaan kewirausahaan kepada pemuda |
| | | | | Meningkatkan sarana prasarana olahraga yang berprestasi | Meningkatkan sarana prasarana olahraga yang berprestasi | Meningkatkan sarana prasarana olahraga yang berprestasi | Meningkatkan sarana prasarana olahraga yang berprestasi |
| | | 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial | Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat | Meningkatkan perlindungan sosial | Meningkatkan perlindungan sosial | Meningkatkan perlindungan sosial | Meningkatkan perlindungan sosial |
| | | 4. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak | Peningkatan pelayanan pengarusutamaan gender perlindungan perempuan dan anak | Meningkatkan peran dan perlindungan perempuan dan anak | Meningkatkan peran dan perlindungan perempuan dan Anak | Meningkatkan peran dan perlindungan perempuan dan anak | Meningkatkan peran dan perlindungan perempuan dan anak |
| 2 | Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif - <i>green</i> dan <i>blue</i> economy | 1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing perekonomian berbasis sumberdaya alam Berkelanjutan | Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan | Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian, perkebunan dan peternakan | Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian, perkebunan dan Peternakan | Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian, perkebunan dan peternakan | Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian, perkebunan dan peternakan |
| | | | | Mengupayakan jaminan pasar dan perluasan jangkauan pemasaran-digital <i>economy</i> seluruh komoditas pertanian | Mengupayakan jaminan pasar dan perluasan jangkauan pemasaran-digital <i>economy</i> seluruh komoditas pertanian | Mengupayakan jaminan pasar dan perluasan jangkauan pemasaran-digital <i>economy</i> seluruh komoditas pertanian | Mengupayakan jaminan pasar dan perluasan jangkauan pemasaran-digital <i>economy</i> seluruh komoditas pertanian |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | Menjamin terpenuhinya stok pangan di daerah | Memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan yang eksisting | Memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan yang eksisting | Memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan yang eksisting | Memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan yang eksisting |
| | | | | Mengoptimalkan tanaman palawija selain padi sebagai tanaman penutup di pekarangan dan tanaman tumpang sari/ tumpang gilir | Mengoptimalkan tanaman palawija selain padi sebagai tanaman penutup di pekarangan dan tanaman tumpang sari/ tumpang gilir | Mengoptimalkan tanaman palawija selain padi sebagai tanaman penutup di pekarangan dan tanaman tumpang sari/ tumpang gilir | Mengoptimalkan tanaman palawija selain padi sebagai tanaman penutup di pekarangan dan tanaman tumpang sari/ tumpang gilir |
| | | | Meningkatkan produktivitas perikanan (<i>blue economy</i>) melalui budidaya perairan dengan penerapan teknologi intensif, ekstensif dan modernisasi alat penangkapan ikan | Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dengan penerapan teknologi budidaya perikanan | Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dengan penerapan teknologi budidaya perikanan | Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dengan penerapan teknologi budidaya perikanan | Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dengan penerapan teknologi budidaya perikanan |
| | | | | Melakukan modernisasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan dalam rangka peningkatan produktivitas nelayan | Melakukan modernisasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan dalam rangka peningkatan produktivitas Nelayan | Melakukan modernisasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan dalam rangka peningkatan produktivitas nelayan | Melakukan modernisasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan dalam rangka peningkatan produktivitas nelayan |



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|
| | | 2. Meningkatnya daya saing perekonomian melalui peningkatan kontribusi UMKM | Meningkatkan kualitas pembinaan Koperasi, UKM dan IKM | Melakukan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan | Melakukan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan | Melakukan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan | Melakukan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan |
| | | | | penguatan modal usaha | penguatan modal usaha | penguatan modal usaha | penguatan modal usaha |
| | | | | Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan IKM | Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan IKM | Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan IKM | Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan IKM |
| | | | | Melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan mutu produk Industri Kecil dan menengah | Melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan mutu produk Industri Kecil dan Menengah | Melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan mutu produk Industri Kecil dan menengah | Melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan mutu produk Industri Kecil dan menengah |
| | | | Meningkatnya upaya pengembangan penanaman modal (PM) dan sumberdaya pariwisata | Memberikan kemudahan/ insentif bagi pelaku usaha dan PM | Memberikan kemudahan/ insentif bagi pelaku usaha dan PM | Memberikan kemudahan/ insentif bagi pelaku usaha dan PM | Memberikan kemudahan/ insentif bagi pelaku usaha dan PM |
| | | | | Melakukan pembinaan kepada pelaku pariwisata dan promosi pariwisata | Melakukan pembinaan kepada pelaku pariwisata dan promosi pariwisata | Melakukan pembinaan kepada pelaku pariwisata dan promosi pariwisata | Melakukan pembinaan kepada pelaku pariwisata dan promosi pariwisata |



| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | Meningkatkan upaya penggalangan pangsa pasar melalui promosi produk atau komoditi yang dihasilkan di Daerah | Melakukan promosi melalui Tim Delegasi dagang | Melakukan promosi melalui Tim Delegasi dagang | Melakukan promosi melalui Tim Delegasi dagang | Melakukan promosi melalui Tim Delegasi dagang |
| | | | | Membuka kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak lintas daerah, provinsi maupun negara | Membuka kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak lintas daerah, provinsi maupun Negara | Membuka kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak lintas daerah, provinsi maupun negara | Membuka kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak lintas daerah, provinsi maupun negara |
| | | | Penguatan fungsi pasar tradisional | Pemanfaatan pasar-pasar yang telah dibangun | Pemanfaatan pasar-pasar yang telah dibangun | Pemanfaatan pasar-pasar yang telah dibangun | Pemanfaatan pasar-pasar yang telah dibangun |
| | | | Pengendalian indeks perubahan harga | Melakukan operasi pasar | Melakukan operasi pasar | Melakukan operasi pasar | Melakukan operasi pasar |
| | | 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap dunia kerja | Meningkatnya keterampilan masyarakat di berbagai bidang usaha | Melakukan pelatihan tenaga kerja yang lebih profesionalisme | Melakukan pelatihan tenaga kerja yang lebih profesionalisme | Melakukan pelatihan tenaga kerja yang lebih profesionalisme | Melakukan pelatihan tenaga kerja yang lebih profesionalisme |
| 3 | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah | 1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana wilayah | Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah | Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakarya dan keairan | Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakarya dan keairan | Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakarya dan keairan | Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakarya dan keairan. |
| | | | | Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan | Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan | Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan | Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan |
| | | | | Perbaikan infrastruktur dan destinasi pariwisata | Perbaikan infrastruktur dan destinasi Pariwisata | Perbaikan infrastruktur dan destinasi pariwisata | Perbaikan infrastruktur dan destinasi pariwisata |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatkan persentase rumah layak huni, kawasan permukiman yang sehat | Mendorong tersedianya rumah layak huni dan bersanitasi baik, melalui partisipasi masyarakat | Mendorong tersedianya rumah layak huni dan bersanitasi baik, melalui partisipasi masyarakat | Mendorong tersedianya rumah layak huni dan bersanitasi baik, melalui partisipasi masyarakat | Mendorong tersedianya rumah layak huni dan bersanitasi baik, melalui partisipasi masyarakat |
|--|--|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pola sharing kegiatan dalam wilayah kewenangan desa. | Memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pola sharing kegiatan dalam wilayah kewenangan desa | Memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pola sharing kegiatan dalam wilayah kewenangan desa | Memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pola sharing kegiatan dalam wilayah kewenangan desa | Memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pola sharing kegiatan dalam wilayah kewenangan desa |
| | | | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Mengurangi volume sampah yang tidak terkelola | Mengurangi volume sampah yang tidak Terkelola | Mengurangi volume sampah yang tidak terkelola | Mengurangi volume sampah yang tidak terkelola |
| | | | Meningkatkan perbaikan lahan ekspensambang | Mendorong partisipasi pelaku pertambangan untuk rehabilitasi lahan eks tambang | Mendorong partisipasi pelaku pertambangan untuk rehabilitasi lahan eks tambang | Mendorong partisipasi pelaku pertambangan untuk rehabilitasi lahan eks tambang | Mendorong partisipasi pelaku pertambangan untuk rehabilitasi lahan eks tambang |
| 4 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal | Mengupayakan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Mengupayakan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Mengupayakan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Mengupayakan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi informatika dalam rangka tata kelola administrasi dan layanan publik secara cepat, tepat dan murah | Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi informatika dalam rangka tata kelola administrasi dan layanan publik secara cepat, tepat dan murah | Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi informatika dalam rangka tata kelola administrasi dan layanan publik secara cepat, tepat dan murah | Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi informatika dalam rangka tata kelola administrasi dan layanan publik secara cepat, tepat dan murah |
| | | 2.Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi pemerintahan, keuangan, | Mengoptimalkan peran koordinasi horizontal maupun vertikal dalam | Mengoptimalkan peran koordinasi horizontal maupun vertikal dalam | Mengoptimalkan peran koordinasi horizontal maupun vertikal dalam | Mengoptimalkan peran koordinasi horizontal maupun vertikal dalam |
| | | | perencanaan, pelaporan dan pelayanan publik | penyelenggaraan pemerintahan | penyelenggaraan pemerintahan | penyelenggaraan pemerintahan | penyelenggaraan pemerintahan |
| | | | | Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Keuangan dengan Perencanaan Daerah yang berbasis Web | Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Keuangan dengan Perencanaan Daerah yang berbasis Web | Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Keuangan dengan Perencanaan Daerah yang berbasis Web | Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Keuangan dengan Perencanaan Daerah yang berbasis Web |
| | | 3.Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | Peningkatan pendapatan asli daerah | Peningkatan pendapatan asli daerah | Peningkatan pendapatan asli daerah | Peningkatan pendapatan asli daerah |
| | | 4.Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah | Meningkatkan kualitas dan optimalkan sumber daya aparatur ASN | Peningkatan Kualitas sumber daya Aparatur ASN | Peningkatan Kualitas sumber daya Aparatur ASN | Peningkatan Kualitas sumber daya Aparatur ASN | Peningkatan Kualitas sumber daya Aparatur ASN |



| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | 5.Meningkatnya Kualitas penelitiandan pengembangan inovasi Daerah | Meningkatkan kualitas hasil penelitian serta inovasi daerah | Mendorong penelitian pada masalah-masalahyang mendukung perencanaan daerah | Mendorong penelitian pada masalah-masalahyang mendukung perencanaan Daerah | Mendorong penelitian pada masalah-masalahyang mendukung perencanaan daerah | Mendorong penelitian pada masalah-masalahyang mendukung perencanaan daerah |
|--|--|---|---|--|--|--|--|



Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026

1. Tahun 2023

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Dukungan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

2. Tahun 2024

“Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Dukungan Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Mantap”

3. Tahun 2025

“Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Dukungan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

4. Tahun 2026

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal Dalam Rangka Mendukung Kesejahteraan Masyarakat”



Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 4 (empat) tahun. Program-program pembangunan yang disusun dalam RPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program RPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Program tersebut meliputi:

1. Program OPD, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
2. Program lintas OPD, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan;
3. Program kewilayahan, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Program pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terangkum dalam Tabel 1.8 berikut ini :



Tabel 1.8
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026

| Kode | Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPD (tahun 2021) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPD | | OPD Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------|---|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| I | Tujuan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Persen | 69,5 | 69,67 | | 69,85 | | 69,97 | | 70,03 | | 70,03 | | | Dinas Kesehatan |
| 1 | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata | Angka harapan hidup (Thn) | Persen | 70,36 | 70,4 | | 70,47 | | 70,51 | | 70,63 | | 70,63 | | | Dinas Kesehatan |
| | | % Penurunan Stunting | Persen | 13,86 | 12,97 | | 12,46 | | 12,12 | | 12,02 | | 12,02 | | | Lintas OPD |
| | 1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Persentase Capaian SPM bidang kesehatan | Persen | 95 | 96 | 51.149.038.483 | 98 | 55.394.136.091 | 99 | 57.303.176.783 | 100 | 60.908.802.849 | 100 | 224.755.154.206 | | Dinas Kesehatan |
| | 2 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan | Persen | 90 | 92 | 2.030.325.600 | 96 | 2.030.325.600 | 99 | 2.030.325.600 | 100 | 2.030.325.600 | 100 | 8.121.302.400 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten/ bersertifikat | Persen | 90 | 92 | | 95 | | 98 | | 100 | | 100 | | | |
| | 3 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | Persentase ketersediaan obat | Persen | 100 | 100 | 23.000.000 | 100 | 9.560.000 | 100 | 9.560.000 | 100 | 9.560.000 | 100 | 51.680.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | Persentase instalasi farmasi yang menerapkan sistem informasim obat dan BMHP | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | 4 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase UKBM aktif | Persen | 80 | 90 | 179.392.300 | 95 | 179.392.300 | 97 | 179.392.300 | 100 | 179.392.300 | 100 | 179.392.300 | | Dinas Kesehatan |
| | 5 Program pengendalian penduduk | Total fertility rate (FTR) | Persen | 2,30 | 2,31 | 663.540.000 | 2,32 | 676.217.000 | 2,33 | 710.027.850 | 2,34 | 745.529.243 | 2,34 | 2.795.314.093 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 6 Program pembinaan keluarga berencana (KB) | Persentase peningkatan cakupan asepor jangka panjang | Persen | 100 | 100 | 3.246.923.000 | 100 | 3.153.084.150 | 100 | 3.506.263.358 | 100 | 3.681.576.525 | 100 | 13.587.847.033 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan peserta KB aktif | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------|----------|-------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | Cakupan peserta KB baru | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | |
| | | 7 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) | Persentase kelompok bina keluarga balita yang aktif | Persen | 100 | 100 | 565.545.000 | 100 | 593.822.250 | 100 | 623.513.363 | 100 | 654.689.031 | 100 | 2437569643 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kebudayaan dan olahraga | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Persen | 69,5 | 69,67 | | 69,85 | | 69,97 | | 70,03 | | 70,03 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Thn) | Persen | 8,22 | 8,36 | | 8,46 | | 8,58 | | 8,62 | | 8,62 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Angka Harapan Lama Sekolah (Thn) | Persen | 12,15 | 12,16 | | 12,18 | | 12,2 | | 12,21 | | 12,21 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Angka Melek Huruf (%) | Persen | 95,5 | 95,57 | | 95,69 | | 95,91 | | 96,07 | | 96,07 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | APK SD | Persen | 111,78 | 112 | | 111,84 | | 111,87 | | 111,92 | | 111,92 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | APK SMP | Persen | 87,87 | 88 | | 87,9 | | 87,93 | | 87,97 | | 87,97 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | APM SD | Persen | 97,99 | 98,02 | | 98,07 | | 98,1 | | 98,15 | | 98,15 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | APM SMP | Persen | 74,19 | 74,22 | | 74,25 | | 74,29 | | 74,32 | | 74,32 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 1 | Program pengelolaan pendidikan | Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar | Persen | 91.49.00 | 100 | 60.195.767.800 | 100 | 59.018.448.300 | 100 | 60.055.056.200 | 100 | 60.184.101.400 | 100 | 313.246.147.200 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan | Persen | 4,14 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | Persen | 70,21 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Persentase tingkat kelulusan SMP | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Cakupan tenaga pendidik bersertifikat | Persen | 55,28 | 58 | | 59,71 | | 61,71 | | 62 | | 64 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | Persen | Na | 25 | 204.250.000 | 50 | 204.250.000 | 75 | 222.500.000 | 100 | 222.500.000 | 100 | 853.500.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 3 | Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | Cakupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persen | Na | 100 | 65.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | | | 205.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 4 | Program pengembangan kebudayaan | Persentase benda seni dan budaya yang dilestarikan | Persen | 100 | 25 | 367.358.000 | 25 | 367.358.000 | 25 | 367.358.000 | 25 | 367.358.000 | 25 | 1.469.432.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | persentase budaya lokal yang berpartisipasi | Persen | 100 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|-------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|
| | | 5 | Program Pembinaan Perpustakaan | Nilai kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 35,3 | 40 | 4.908.800.000 | 45,3 | 536.800.000 | 50,3 | 846.800.000 | 55,3 | 608.800.000 | 55,3 | 6.901.200.000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 9,0 | 11,0 | | 12,0 | | 13,0 | | 14,0 | | 14,0 | | Dinas Perpustakaan |
| | | 6 | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Presentasi organisasi pemuda yang aktif | Persen | 75 | 75 | 690.000.000 | 75 | 715.000.000 | 80 | 727.000.000 | 80 | 753.300.000 | 80 | 753.300.000 | Dins Pemuda dan Olahraga |
| | | 7 | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | Presentasi cabor yang dibina | Persen | 58 | 58 | 319.000.000 | 62 | 300.000.000 | 65 | 320.000.000 | 65 | 347.000.000 | 65 | 347.000.000 | Dins Pemuda dan Olahraga |
| | | | | Persentase cabor yang ikut event | Persen | 24 | 27 | | 31 | | 37 | | 41 | | 41 | | Dins Pemuda dan Olahraga |
| | | 3 | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya kesejahteraan sosial | Kemiskinan % | Persen | 13,79 | 13,04 | | 12,23 | | 11,49 | | 10,72 | | 10,72 | | Dinas Sosial |
| | | 1 | Program pemberdayaan sosial | Persentase PSKS yang diberdayakan | Persen | 12,09 | 13,72 | 246.764.000 | 25,81 | 259.102.200 | 39,2 | 272.057.310 | 54,55 | 285.660.176 | 54,55 | 1.063.583.686 | Dinas Sosial |
| | | 2 | Program rehabilitasi sosial | Persentase lanjut usia terlanjar yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 360.809.000 | 100 | 378.849.450 | 100 | 397.791.923 | 100 | 417.681.519 | 100 | 1.555.131.892 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase disabilitas terlanjar yang tertangani | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Sosial |
| | | 3 | Program perlindungan dan jaminan sosial | Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | Persen | 61,21 | 57,05 | 528.359.750 | 57,16 | 554.777.738 | 57,29 | 582.516.624 | 57,52 | 611.642.456 | 57,52 | 2.277.296.568 | Dinas Sosial |
| | | 4 | Program penanganan bencana | Persentase penanganan bencana | Persen | 100 | 100 | 372.156.000 | 100 | 319.888.800 | 100 | 406.758.240 | 100 | 314.796.152 | 100 | 1.413.599.192 | Dinas Sosial |
| | | 4 | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak | Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | Persen | 59,52 | 60 | | 61,35 | | 62,21 | | 63,25 | | 63,25 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 1 | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah | Persen | 59,52 | 60,12 | 115.200.000 | 61,35 | 76.200.000 | 62,21 | 126.700.000 | 63,25 | 85.000.000 | 63,25 | 403.100.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | Persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta | Persen | 39,91 | 41,01 | | 41,97 | | 42,89 | | 43,9 | | 43,9 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2 | Program perlindungan perempuan | Rasio KDRT | Persen | 2,5 | 2,31 | 535.400.000 | 2,05 | 535.400.000 | 1,97 | 535.400.000 | 1,75 | 476.800.000 | 1,75 | 2.083.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 3 | Program pemenuhan hak anak (pha) | Cakupan pemenuhan hak anak | Persen | 100 | 100 | 143.600.000 | 100 | 134.600.000 | 100 | 158.130.000 | 100 | 143.606.500 | 100 | 579.936.500 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---|--------|---------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|----------------|---------------------------------------|
| II | Tujuan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 0,4 | 4,3 | 5,05 | 5,7 | 6,03 | 6,03 | | | | | Lintas OPD | | |
| 1 | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya produktifitas dan daya saing perekonomian berbasis sumber daya alam berkelanjutan | Laju PDRB Sektor Pertanian | Persen | 0,22 | 0,57 | 1,25 | 1,75 | 2,32 | 2,32 | | | | | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Perikanan | | |
| | | | Nilai Tukar Petani | Persen | 106,6 | 107,040 | 107,25 | 107,3 | 107,5 | 107,5 | | | | | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan | | |
| | | | Nilai Tukar Nelayan | Persen | 107,19 | 107,25 | 107,3 | 107,67 | 107,9 | 107,09 | | | | | Dinas Perikanan | | |
| 3 | 27 | 1 | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase produksi tanaman pangan dan hortikultura | Persen | 70,92 | 73,92 | 515.000.000 | 76,92 | 525.300.000 | 79,92 | 535.806.000 | 82,92 | 546.522.120 | 82,92 | 2.122.628.120 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 2 | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase rata-rata pertumbuhan sub sektor perkebunan | Persen | 96 | 25 | 1.324.025.500 | 25 | 1.324.025.500 | 25 | 1.324.025.500 | 25 | 1.324.025.500 | 100 | 5.296.102.000 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | | | Persentase rata-rata pertumbuhan sub sektor peternakan | Persen | 96 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 100 | | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | 3 | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase prasarana pertanian yang berkelanjutan | Persen | 100 | 100 | 2.415.000.000 | 100 | 2.599.100.000 | 100 | 2.856.562.000 | 100 | 3.139.721.240 | 100 | 11.010.383.240 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 4 | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase prasarana perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan | persen | 98 | 25 | 1.869.721.900 | 25 | 1.959.712.400 | 25 | 2.169.721.900 | 25 | 1.869.721.900 | 100 | 7.868.878.400 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | 5 | Program penyuluhan pertanian | Persentase kualitas SDM penyuluh dan petani | Persen | 100 | 100 | 2.530.000.000 | 100 | 2.482.892.016 | 100 | 2.239.053.856 | 100 | 2.656.005.093 | 100 | 9.907.950.966 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | | | Persentase kualitas SDM petani | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 6 | Program penyuluhan pertanian | Persentase kualitas SDM petani kebun | Persen | 99 | 25 | 631.483.680 | 25 | 561.492.300 | 25 | 631.483.680 | 25 | 631.483.676 | 100 | 2.455.943.336 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | | | Persentase kualitas SDM peternak | persen | 99 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 100 | | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | 7 | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase penanganan penyakit hewan menular | Persen | 98 | 25 | 511.681.700 | 25 | 511.681.700 | 25 | 511.681.700 | 25 | 511.681.700 | 100 | 2.046.726.800 | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | 8 | Program pengelolaan perikanan tangkap | Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap | Persen | 76,33 | 100 | 1.715.500.000 | 100 | 1.779.000.000 | 100 | 2.018.200.000 | 100 | 1.979.110.000 | 100 | 2.078.065.500 | Dinas Perikanan |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|-----------|---------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------------|
| | | 9 | Program pengelolaan perikanan budidaya | Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya | Persen | 56,34 | 57,37 | 1.985.000.000 | 58,25 | 2.010.000.000 | 59,35 | 2.170.500.000 | 60,23 | 2.135.275.000 | 60,23 | 8.300.775.000 | Dinas Perikanan |
| | | 10 | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Presentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan | Persen | 88,24 | 100 | 224.000.000 | 100 | 174.000.000 | 100 | 182.700.000 | 100 | 191.835.000 | 100 | 772.535.000 | Dinas Perikanan |
| | | 11 | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemandirian pangan | Presentase Ketersediaan Lumbung Pangan | Persen | 40 | 53,3 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 66,66 | 100.000.000 | 73,3 | 110.000.000 | 73,3 | 410.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 12 | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Presentase Ketersediaan Cadangan Pangan | Persen | 98 | 100 | 717.500.000 | 100 | 645.000.000 | 100 | 646.000.000 | 100 | 646.000.000 | 100 | 715.560.600 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 2 | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya daya saing perekonomian melalui peningkatan kontribusi UMKM | Laju PDRB Sektor Indutri | Persen | -0,83 | 0,87 | | 1,27 | | 1,75 | | 2,01 | | 2,01 | | Dinas Perindustrian |
| | | | | Laju PDRB Sektor Perdagangan | Persen | 5,12 | 5,75 | | 6,12 | | 6,73 | | 7,15 | | 7,15 | | Dinas Perdagangan |
| | | 1 | Program pendidikan dan latihan perkoperasian | Persentase koperasi yang mengikuti Pelatihan | Persen | 60,54 | 70,74 | 400.800.000 | 80 | 400.800.000 | 91,15 | 400.800.000 | 97,9 | 420.840.000 | 100 | 441.882.000 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | | | Persentase pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan | persen | 8,32 | 10,9 | | 14,43 | | 15,9 | | 18,54 | | 21,10 | | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | 2 | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persen | 5,44 | 12,2 | 40.000.000 | 19,7 | 42.000.000 | 27,9 | 44.100.000 | 36,7 | 46.305.000 | 36,7 | 48.620.250 | Dinas Koperasi dan UKM |
| | | 3 | Program perencanaan dan pembangunan industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | Persen | 31,25 | 11,25 | 575.000.000 | 12,5 | 550.000.000 | 12,5 | 655.000.000 | 13,75 | 655.250.000 | 13,75 | 2.435.250.000 | Dinas Perindustrian |
| | | 4 | Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan menengah | Jumlah | 5 | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 115.000.000 | 2 | 115.000.000 | 8 | 410.000.000 | Dinas Perindustrian |
| | | 5 | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional | Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Persen | 0,68 | 1,36 | 272.000.000 | 2,04 | 272.000.000,00 | 2,77 | 292.000.000,00 | 3,45 | 272.000.000,00 | 3,45 | 1.108.000.000,00 | Dinas Perindustrian |
| | | 6 | Program pemasaran pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan | wisatawan | 100.163 | 110,179 | 173.787.000 | 121,135 | 71.162.500 | 133,245 | 209.162.900 | 146,540 | 112.000.000 | 146,540 | 566.112.400 | Dinas Pariwisata |
| | | 7 | Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | Persentase pelaku ekraf yang terlatih | Persen | 0 | 96 | 110.000.000 | 96 | 110.000.000 | 96 | 110.000.000 | 96 | 110.000.000 | 96 | 440.000.000 | Dinas Pariwisata |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|---|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--|
| | | 8 | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase tenaga pemandu wisata terlatih bersertifikasi | Persen | 99 | 99 | 110.000.000 | 99 | 110.000.000 | 99 | 110.000.000 | 99 | 110.000.000 | 99 | 440.000.000 | Dinas Pariwisata |
| | | 9 | Program pengembangan iklim penanaman modal | Persentase pertumbuhan kegiatan usaha penanaman modal di kabupaten | persen | 60 | 75 | 502.000.000 | 80 | 177.000.000 | 85 | 182.250.000 | 100 | 225.000.000 | 100 | 1.086.250.000 | DPMPTSP |
| | | 10 | Program promosi penanaman modal | Persentase peningkatan minat infestor untuk berinvestasi di kabupaten | Persen | 70 | 80 | 67.500.000 | 85 | 115.000.000 | 90 | 90.780.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 378.280.000 | DPMPTSP |
| | | 11 | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase stabilitas harga bakopting | Persen | <13,8% | <13,8% | 125.000.000 | <13,8% | 100.000.000 | <13,8% | 100.000.000 | <13,8% | 120.000.000 | <13,8% | 445.000.000 | Dinas Perdagangan |
| | | 12 | Program standarisasi dan perlindungan konsumen | Persentase jumlah pelaku usaha yang tertip ukur | Persen | 5 | 40 | 106.500.000 | 45 | 105.000.000 | 50 | 105.000.000 | 55 | 115.000.000 | 55 | 431.500.000 | Dinas Perdagangan |
| | | 13 | Program pengembangan ekspor | Persentase pelaku usaha komoditi yang mendapatkan pembinaan | Persen | 25 | 40 | 215.000.000 | 45 | 165.800.000 | 50 | 155.000.000 | 55 | 175.000.000 | 55 | 710.800.000 | Dinas Perdagangan |
| 3 | | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap dunia kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,18 | 2,75 | | 2,5 | | 2,13 | | | | 1,85 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 1 | Program pelatihan kerj adan produktifitas tenaga kerja | Persentase angkatan kerja produktif yang mendapatkan latihan keterampilan kerja | Persen | 73,97 | 75 | 326.889.300,00 | 78,45 | 153.139.300,00 | 80 | 223.139.300,00 | 85 | 265.000.000,00 | 85 | 528.167.900 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 2 | Program penempatan tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yg terserap dan diberdayakan | Persen | 31,78 | 45 | 605.638.200 | 50 | 262.870.700 | 65 | 285.438.600 | 80 | 350.154.000 | 80 | 1.504.101.500 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 3 | Program hubungan industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Persen | 34,33 | 45,3 | 154.196.900 | 55 | 128.196.900 | 70 | 149.000.000 | 80 | 155.000.000 | 80 | 586.393.800 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| III | | | Tujuan : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah | Indeks ketersediaan infrastruktur wilayah | Persen | 50,64 | 54,86 | | 59 | | | 63,32 | | | 67,53 | | |
| 1 | | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana wilayah | Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | Persen | 61,36 | 64 | | 68 | | 71 | | | 74 | | | Dinas PUPR |
| | | | | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 69 | 73 | | 75 | | 78 | | | 80 | | | Dinas PUPR |
| | | | | Persentase rumah layak huni | Persen | 69,86 | 70 | | 70,35 | | 70,75 | | | 71,12 | | 71,12 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | Persentase sampah yang dikelola | Persen | 40 | 45 | | 47 | | 48 | | | 50 | | 50 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | Persen | 74,05 | 76,41 | | 76,54 | | 76,71 | | | 76,83 | | 76,83 | Dinas Lingkungan Hidup |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--------|-------|-------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|
| | | 1 | Program pengelolaan sumber daya air (SDA) | Cakupan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dalam kondisi baik | Persen | 90 | 29 | 35.856.300.000 | 61 | 37.350.000.000 | 82 | 17.100.000.000 | 100 | 9.706.300.000 | 100 | 100.012.600.000 | Dinas PUPR |
| | | 2 | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman | persen | 50,46 | 54 | 6.258.500.000 | 57 | 6.094.750.000 | 63 | 8.130.500.000 | 66 | 5.854.000.000 | 66 | 26.337.750.000 | Dinas PUPR |
| | | 3 | Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional | Persentase ketersediaan TPS3R | persen | 7 | 27 | 2.163.000.000 | 40 | 1.442.000.000 | 53 | 1.442.000.000 | 67 | 1.442.000.000 | 67 | 6.489.000.000 | Dinas PUPR |
| | | 4 | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Akses Aman | Persen | 34,88 | 44 | 18.934.400.000 | 52 | 11.399.100.000 | 60 | 15.342.100.000 | 74 | 19.749.400.000 | 74 | 65.425.000.000 | Dinas PUPR |
| | | 4 | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Persentase ketersediaan drainase dalam kondisi baik | persen | 94 | 49 | 2.455.500.000 | 59 | 862.593.992 | 79 | 1.397.743.992 | 100 | 1.625.000.000 | 100 | 6.340.837.984 | Dinas PUPR |
| | | 5 | Program penataan bangunan gedung | Persentase bangunan gedung yang sesuai dengan peraturan dan representatif | Persen | 95 | 20 | 1.800.000.000 | 40 | 1.089.400.000 | 55 | 986.000.000 | 100 | 1.842.000.000 | 100 | 5.717.400.000 | Dinas PUPR |
| | | 6 | Program penataan bangunan dan lingkungannya | Persentase penataan dan revitalisasi bangunan dan lingkungannya agar dapat memberikan nilai tambah fisik, sosial dan ekonomi | Persen | 100 | 30 | 2.717.500.000,00 | 50 | 650.000.000,00 | 80 | 2.200.000.000,00 | 100 | 700.000.000,00 | 100 | 6.267.500.000 | Dinas PUPR |
| | | 7 | Program penyelenggaraan jalan | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | persen | 61,36 | 64 | 42.171.041.380 | 68 | 38.894.300.000 | 71 | 51.373.800.000 | 74 | 50.538.200.000 | 74 | 182.977.341.380 | Dinas PUPR |
| | | 8 | Program penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Persen | 100 | 25 | 1.000.000.000 | 50 | 800.000.000 | 75 | 1.050.000.000 | 100 | 1.050.000.000 | 100 | 3.900.000.000 | Dinas PUPR |
| | | 9 | Program pengembangan perumahan | Persentase pemenuhan rumah layak huni dampak korban bencana dan dampak relokasi program pemerintah | Persen | 100 | 100 | 392.052.040 | 100 | 312.052.040 | 100 | 377.052.040 | 100 | 387.052.040 | 100 | 1.468.208.160 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | 10 | Program kawasan permukiman | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | Persen | 1,09 | 2,12 | 1.084.700.000 | 3,25 | 629.700.000 | 4,3 | 684.200.000 | 5,7 | 629.200.000 | 5,7 | 3.027.800.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | 11 | Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Persentase rumah kumuh yang tertangani diluar kawasan kumuh | Persen | 100 | 100 | 18.500.000 | 100 | 18.500.000 | 100 | 74.000.000 | 100 | 74.000.000 | 100 | 185.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | 12 | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Cakupan keterpenuhan PSU di kawasan permukiman | Persen | 24,76 | 25,24 | 452.600.000 | 25,72 | 422.600.000 | 26,21 | 452.600.000 | 26,69 | 462.600.000 | 26,69 | 1.790.400.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|--|--|---------|-------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|--|--|--|
| | | | | Cakupan keterpenuhan PSU di kawasan perumahan | Persen | 95,69 | 95,8 | 96,08 | | 97,15 | | | 98 | 98 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | |
| | | 13 | Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum | Persen | 100 | 100 | 35.495.300 | 100 | 38.204.700 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 173.700.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | 15 | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Cakupan peningkatan penyelenggaraan lalu lintas | Persen | 27 | 47 | 571.837.900 | 62 | 513.137.900 | 90 | 4.344.567.900 | 100 | 682.262.750,00 | 100 | 6.111.806.450 | Dinas Perhubungan |
| | | 15 | Program pengelolaan pelayaran | Persentase pelabuhan terbangun | Persen | - | 25 | 2.750.000.000 | 50 | 2.500.000.000 | 75 | 2.000.000.000 | 100 | 1.500.000.000,00 | 100 | 8.750.000.000 | Dinas Perhubungan |
| | | 17 | Program perencanaan lingkungan hidup | Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan | Dokumen | 100 | 100 | 475.000.000 | 100 | - | 100 | 150.000.000 | 100 | - | 100 | 625.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 18 | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | Persen | 74 | 76,41 | 39.359.000 | 76,54 | 84.359.000 | 76,71 | 84.359.000 | 76,83 | 84.359.000 | 100 | 292.436.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 19 | Program pengelolaan persampahan | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 40 | 45 | 3.915.620.795 | 47 | 4.427.854.815 | 48 | 4.182.703.521 | 50 | 4.476.404.796 | 70 | 17.002.583.927 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 20 | Program peningkatan dayatarik destinasi pariwisata | Persentase Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata | Persen | N a | 4 | 420.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 450.000.000 | 4 | 330.000.000 | 4 | 1.550.000.000 | Dinas Pariwisata |
| IV | | Tujuan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Reformasi Birokrasi | Persen | 51 | 52 | | 55 | | 58 | | 61 | 61 | | | |
| 1 | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | 87,21 | 87,4 | | 87,57 | | 88,07 | | 88,2 | 88,2 | | | |
| | | | | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Persen | 55,76 | 71 | | 80,76 | | 90,38 | | 100 | 100 | | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | |
| | | 1 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persen | 100 | 100 | 451.048.938.058 | 100,00 | 434.900.495.080 | 100,00 | 459.296.723.120 | 100,00 | 472.367.690.665 | 100 | 1.817.613.846.923 | Seluruh OPD |
| | | 2 | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Cakupan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintahan | Persen | 100 | 100 | 3.620.746.310 | 100 | 3.641.622.917 | 100 | 3.720.722.917 | 100 | 3.689.322.917 | 100 | 14.672.415.061 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Cakupan koordinasi penyusunan kebijakan kesra | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | Sekretariat Daerah | |
| | | 3 | Program perekonomian dan pembangunan | Cakupan koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi | Persen | 100 | 100 | 396.650.131 | 100 | 395.650.131 | 100 | 479.650.131 | 100 | 471.650.131 | 100 | 1.743.600.524 | Sekretariat Daerah |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|--------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Cakupan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Sekretariat Daerah | |
| | | 4 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda | Persen | 100 | 100 | 8.900.273.500 | 100 | 9.026.073.500 | 100 | 9.066.823.500 | 100 | 8.609.523.500 | 100 | 35.602.694.000 | | Sekretariat DPRD |
| | | | | Persentase permasalahan daerah yang dibahas di DPRD dan ditindaklanjuti dengan RDP | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Sekretariat DPRD | |
| | | | | Persentase pokok-pokok pikiran DPRD yang terakomodir dalam RKPD | Persen | 85 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Sekretariat DPRD | |
| | | 5 | Program peningkatan kerja sama desa | Persentase kawasan yang telah terbentuk | Persen | 0 | 25 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 95.000.000 | 25 | 90.000.000 | 100 | 285.000.000 | | Dinas PMD |
| | | 6 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase aparat Desa yang terlatih | Persen | 50,38 | 60,10 | 3.775.000.000 | 63,40 | 935.000.000 | 66,67 | 715.000.000 | 71,64 | 3.985.000.000 | 71,64 | 9.410.000.000 | | Dinas PMD |
| | | | | Persentase bumdes yang berkembang | Persen | 18,89 | 21,25 | | 24,4 | | 27,55 | | 31,49 | | 31,49 | | Dinas PMD | |
| | | 7 | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | Persen | 90,14 | 99,42 | 425.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 495.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 1.730.000.000 | | Dinas PMD |
| | | 8 | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Cakupan pelayanan urusan pemerintahan umum | Persen | 100 | 100 | 22.500.000 | 100 | 22.500.000,00 | 100 | 22.500.000 | 100 | 22.500.000 | 100 | 90.000.000 | | Kecamatan |
| | | 9 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Cakupan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | 100 | 100 | 52.500.000 | 100 | 52.500.000,00 | 100 | 52.500.000 | 100 | 52.500.000 | 100 | 210.000.000 | | Kecamatan |
| | | 10 | Program pendaftaran penduduk | Persentase penduduk yang telah memiliki KTP-et | Persen | 93,14 | 96 | 172.974.000 | 97 | 206.665.000 | 98 | 206.665.000 | 99 | 206.665.000 | 100 | 206.665.000 | | Dinas Catatan Sipil |
| | | | | Persentase penduduk yang telah memiliki KIA | Persen | 93,14 | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | | Dinas Catatan Sipil | |
| | | 11 | Program pencatatan sipil | Persentase penduduk yang telah memiliki AKTA Kelahiran | Persen | 99,04 | 100 | 119.285.000 | 100 | 164.065.000 | 100 | 164.065.000 | 100 | 164.065.000 | 100 | 164.065.000 | | Dinas Catatan Sipil |
| | | 12 | Program pengelolaan arsip | Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku | Persen | 100 | 100 | 147.500.000 | 100 | 126.250.000 | 100 | 126.650.000 | 100 | 147.706.746 | 100 | 548.106.746 | | Dins Kearsipan |
| | | 13 | Program perlindungan dan penyelamatan arsip | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | Persen | 90,19 | 90,35 | 68.400.000 | 90,75 | 79.320.000 | 91,05 | 80.000.000 | 91,35 | 100.261.434 | 91,35 | 327.981.434 | | Dins Kearsipan |
| | | 14 | Program pelayanan penanaman modal | Persentase kualitas pelayanan penanaman modal | Persen | 80 | 85 | 306.000.000 | 90 | 347.500.000 | 95 | 409.750.000 | 100 | 424.000.000 | 100 | 1.487.250.000 | | DPMTSP |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|--|----------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|--|
| | | 15 | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum | Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 4.145.500.000 | 100 | 3.647.300.000 | 100 | 4.306.100.000 | 100 | 3.646.250.000 | 100 | 15.745.150.000 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | Jumlah warga negara memperoleh layanan akibat penegakan perda dan perkada | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | Persentase POL PP tertatih | Persen | 6,14 | 10,53 | | 17,11 | | 25,88 | | 36,84 | | 36,84 | | |
| | | 16 | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Persentase peningkatan respon penanganan kebakaran | Persen | 100 | 100 | 1.885.688.000 | 100 | 1.753.391.400 | 100 | 1.753.391.400 | 100 | 1.870.188.000 | 100 | 7.262.658.800 | Dinas Kebakaran |
| | | 17 | Program penanggulangan bencana | Persentase wilayah bencana dan respon cepat darurat bencana | Persen | 100 | 100 | 790.000.000 | 100 | 645.000.000 | 100 | 894.664 | 100 | 650.000 | 100 | 1.436.544.664 | BPBD |
| | | 18 | Program informasi dan komunikasi publik | Indeks kepuasan masyarakat | Persen | - | 18,42 | 658.668.400 | 100 | 658.668.400 | 100 | 678.668.400 | 100 | 698.668.400 | 100 | 698.668.400 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian |
| | | 19 | Program aplikasi Informatika | Persentase PD yang telah menerapkan SPBE | Persen | - | 65,79 | 3.255.700.000 | 100 | 344.700.000 | 100 | 370.700.000 | 100 | 423.700.000 | 100 | 423.700.000 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian |
| | | 20 | Program penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase data sektoral | Persen | 100 | 100 | 97.000.000 | 100 | 97.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian |
| | | 20 | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | Persentase keamanan data OPD | Persen | 26,32 | 26,32 | 23.745.000 | 26,32 | 33.745.000 | 26,32 | 33.745.000 | 26,32 | 33.745.000 | 26,32 | 33.745.000 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian |
| 2 | | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja | Nilai SAKIP Kabupaten | Predikat | B | B | | B | | BB | | BB | | BB | | Inpektorat ,Bappeda |
| | | 2 | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase pelaksanaan Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 100 | 100 | 618.186.800 | 100 | 668.186.800 | 100 | 930.301.090 | 100 | 948.204.700 | 100 | 948.204.700 | Bappeda |
| | | 3 | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persen | 100 | 100 | 592.362.200 | 100 | 592.362.200 | 100 | 624.587.850 | 100 | 634.596.069 | 100 | 634.596.069 | Bappeda |
| | | 4 | Program penyelenggaraan pengawasan | Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan | Persen | 95 | 100 | 1.379.383.300 | 100 | 1.394.000.000 | 100 | 1.394.000.000 | 100 | 1.394.000.000 | 100 | 5.461.383.300 | Inpektorat |
| | | 5 | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | Cakupan pelaksanaan perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi | Persen | 95 | 100 | 393.471.000 | 100 | 400.500.000 | 100 | 403.000.000 | 100 | 411.500.000 | 100 | 1.608.471.000 | Inpektorat |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | 6 | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan masyarakat usia sekolah yang menerima pemahaman wawasan | Persen | 0 | 16,6 | 56.000.000 | 16,6 | 58.000.000 | 33,3 | 56.000.000 | 33,3 | 56.000.000 | 100 | 226.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 7 | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | Persentase ormas yang mengikjuti kegiatan pemda | Persen | 16,36 | 20 | 13.000.000 | 21,81 | 14.000.000 | 25,45 | 14.000.000 | 27,27 | 14.000.000 | 27,27 | 55.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 9 | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Cakupan kewaspadaan dini dan pasilitasi penanganan konflik sosial | Persen | 100 | 100 | 267.000.000 | 100 | 270.000.000 | 100 | 267.000.000 | 100 | 267.000.000 | 100 | 1.071.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | BPKAD |
| | | 1 | Program pengelolaan keuangan daerah | Persentase realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah | Persen | 7,05 | 5,08 | 169.110.790.978 | 5,35 | 170.948.863.359 | 5,87 | 170.810.267.679 | 6,24 | 171.588.236.551 | 6,24 | 180.167.648.376 | BPKAD |
| | | | | Persentase realisasi pendapatan daerah | Persen | 104,73 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BPKAD |
| | | | | Persentase realisasi belanja daerah | Persen | 98,09 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | BPKAD |
| | | 2 | Program pengelolaan barang milik daerah | Persentase aset yang dikelola dengan baik | Persen | 100 | 100 | 307.520.000 | 100 | 322.520.000 | 100 | 431.520.000 | 100 | 287.520.000 | 100 | 301.896.000 | BPKAD |
| | | 3 | Program pengelolaan pendapatan daerah | Persentase realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah | Persen | 7,05 | 100 | 1.040.000.000 | 100 | 1.040.000.000 | 100 | 1.040.000.000 | 100 | 1.040.000.000 | 100 | 4.160.000.000 | Bapenda |
| | | | | Persentase realisasi PAD terhadap target PAD | Persen | 124,28 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 4 | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Persen | 42,92 | 47 | | 47 | | 50 | | 60 | | 60 | | BKPSDM |
| | | 1 | Program kepegawaian daerah | Persentase peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN | Persen | 17,7 | 20 | 1.940.996.000 | 25 | 2.008.713.000 | 30 | 2.008.713.000 | 35 | 2.001.213.000 | 35 | 7.959.635.000 | BKPSDM |
| 5 | | Sasaran : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan novasi Daerah | Inovasi Daerah | Nilai | 38,24/ Inovatif | 40,15/ Inovatif | | 42,35/ Inovatif | | 44,37/ Inovatif | | 47,13/ Inovatif | | 47,13/ Inovatif | | Balitbang |
| | | | Program penelitian dan pengembangan daerah | Cakupan ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan | Persen | 100 | 30 | 416.000.000 | 20 | 387.040.000 | 40 | 471.000.000 | 30 | 416.000.000 | 100 | 1.690.040.000 | Balitbang |



D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2023 ***“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”*** dan tema pembangunan provinsi pada RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 ***“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendukung”*** Dengan tema pembangunan Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023 ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Dukungan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”***, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan.

Sasaran pembangunan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2023 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada table 1.9 berikut ini :



Tabel 1.9
Sasaran Pembangunan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuandan Sasaran | Kondisi Awal Tahun(2021) | Target Tahun 2023 |
|--|--|--|--------------------------|-------------------|
| Mewujudkan SumberDaya Manusia Yang Berkualitas | | Indeks PembangunanManusia (IPM) | 69,5 | 69,8 |
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secaramerata | Angka harapan hidup(Thn) | 70,36 | 70,4 |
| | | Persentase Stunting | 13,86 | 12,97 |
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kebudayaan dan olahraga | Angka Rata-rata LamaSekolah (Thn) | 8,22 | 8,36 |
| | | Angka Harapan LamaSekolah (Thn) | 12,15 | 12,16 |
| | Meningkatnya kesejahteraan social | Kemiskinan (%) | 13,79 | 13,04 |
| | | Gini rasio | 0,335 | 0,32 |
| | Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak | Persentase perempuan yang bekerja di lembagapemerintah | 59,52 | 60,12 |
| | | Persentase perempuan yang bekerja di lembagaswasta | 39,91 | 41,01 |



| | | | | |
|--|--|---|--------|--------|
| Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif <i>Green dan Blue Economy</i> | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 0,4 | 4,3 |
| | Meningkatnya produktivitas dan daya saing perekonomian berbasis sumber daya alam Berkelanjutan | Laju PDRB Sektor Pertanian | 0,22 | 0,57 |
| | | Nilai Tukar Petani | 106,6 | 107,04 |
| | | Nilai Tukar Nelayan | 107,19 | 107,25 |
| | Meningkatnya daya saing perekonomian melalui peningkatan kontribusi UMKM | Laju PDRB Sektor Industri | -0,83 | 0,87 |
| | | Laju PDRB Sektor Perdagangan | 5,12 | 5,75 |
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap duniakerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,18 | 2,75 |
| Pengembangan Infrastruktur Wilayah | | Indeks ketersediaan infrastruktur wilayah | 50,64 | 54,86 |
| | Meningkatnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana wilayah | Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | 61,36 | 64 |
| | | Persentase penduduk berakses air minum | 50,46 | 54 |
| | | Persentase rumah layak huni | 69,86 | 70,01 |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | 74,05 | 76,41 |



| | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Reformasi Birokrasi | 51 | 52 |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87,21 | 87,4 |
| | | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 55,76 | 71,15 |
| | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja | Nilai SAKIP Kabupaten | 65,03/ B | 67,43/B |
| | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK | WTP | WTP |
| | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | 42,92 | 47 |
| | Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan inovasi Daerah | Inovasi Daerah | 38,24/ Inovatif | 40,15/ Inovatif |



2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

a. Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik

Program prioritas Nasional ini merupakan acuan sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka Utara, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Adapun tema pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***

b. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 adalah ***“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang***



inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendukung” dengan prioritas utama :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.
3. Tata Kelola pemerintahan yang baik.
4. Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kolaka Utara

Prioritas Pembangunan Daerah atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 4 (empat) tahunan dalam RPD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.



Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka pada tahun 2023 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara difokuskan pada:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Sasaran yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kebudayaan dan olahraga
- c. Meningkatnya kesejahteraan sosial
- d. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif

Sasaran yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya produktifitas dan daya saing perekonomian berbasis sumber daya alam
- b. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan kinerja koperasi, UKM, IKM, PM dan Ekraf
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan
- d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui ketrampilan kerja



3. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Meningkatnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana wilayah
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
 - c. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah
 - e. Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan novasi Daerah

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal di kabupaten Kolaka utara dalah Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor **73 tahun 2022** Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mana terdapat bebebapa urusan dalam hal penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal antara lain :

- A. Bidang Urusan Pendidikan
- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- F. Bidang Urusan Sosial

A. Kebijakan Umum Daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1. **Persiapan rencana pencapaian SPM.** Dalam tahap ini, pemerintah daerah menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM dengan mempertimbangkan kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar; target pelayanan dasar yang akan



dicapai; dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar. Selanjutnya, rencana pencapaian SPM dan target tahunan menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD).

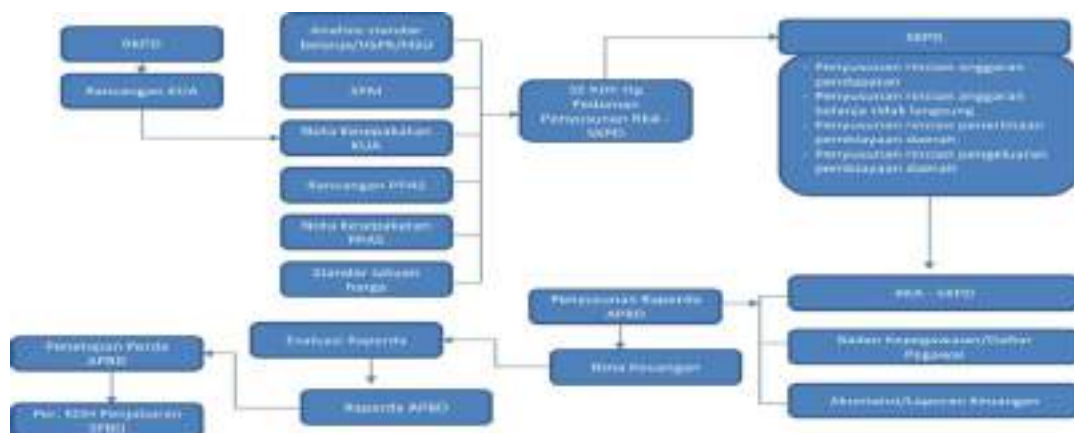
2. Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah daerah dalam menyusun rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Kemudian, rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).

3. Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM.

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Nota kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKS-SKPD dengan menggunakan pendektan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Gambar 1.10 Mekanisme Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD





4. Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM.

Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebaiknya dipublikasikan kepada masyarakat.

B. Gambaran Orientasi dan Komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran, dapat Berikut ini :

1. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 1. 11
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN

| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN | |
|-----|---------------------------------------|---|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|
| | | | | | (6) | (7) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % | |
| 1 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | | | | 9,012,159,000 | 8,915,542,838 | 98.93 % | |
| | 1 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD | | | | 7,741,427,200 | 7,664,693,138 | 99.01 % |
| | | 1 | Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun | Peserta didik | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % | |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|-------------|--|---|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun | Kegiatan | 0 | | 0 % |
| | | 3 | Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa | Peserta didik | 2,608,936,200 | 2,577,258,200 | 98.79 % |
| | | 5 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 5,132,491,000 | 5,087,434,938 | 99.12 % |
| | | 6 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 7,741,427,200 | 7,664,693,138 | 99.01 % |
| | 2 | Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan | | | 56,063,100 | 51,809,900 | 92.41 % |
| | | 1 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA T A N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|----------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 3 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | 0 % |
| | | 4 | Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | <input type="text"/> | <input type="text" value="51,809,900"/> | 92.41 % |
| | | 5 | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak | Kegiatan | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 56,063,100 | 51,809,900 | 92.41 % |
| | 3 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|-----|--------------------------|---|--|----------|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | | | an | | | |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 4 | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) | | | 1,214,668,700 | 1,199,039,800 | 98.71 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum | Kegiatan | <input type="text" value="714,668,700"/> | <input type="text" value="704,039,800"/> | 98.51 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|----------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | | memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | | | | |
| | | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 500,000,000 | 495,000,000 | 99.00 % |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 1,214,668,700 | 1,199,039,800 | 98.71 % |
| | JUMLAH PROGRAM | | | | 9,012,159,000 | 8,915,542,838 | 98.93 % |
| 2 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR | | | | 58,507,372,631 | 57,202,866,025 | 97.77 % |
| | 5 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | | | 37,324,104,694 | 36,477,232,217 | 97.73 % |
| | | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 19,152,320,000 | 18,414,506,310 | 96.15 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|-----|--------------------------|--|---|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | | | | | | |
| | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 18,171,784,694 | 18,062,725,907 | 99.40 % |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 37,324,104,694 | 36,477,232,217 | 97.73 % |
| | 6 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | | | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17 % |
| | | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17 % |
| | 7 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | | | 15,696,488,937 | 15,497,520,308 | 98.73 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|-----|--------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 401,946,800 | 340,587,400 | 84.73 % |
| | | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 49,630,000 | 31,990,000 | 64.46 % |
| | | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | 15,244,912,137 | 15,124,942,908 | 99.21 % |
| | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 15,696,488,937 | 15,497,520,308 | 98.73 % |
| | 8 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TAN N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|----------|---|--|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Guru | 0 | 0 | 0 % |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0 % |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 9 | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) | | | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91 % |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91 % |
| JUMLAH PROGRAM | | | | | 58,507,372,631 | 57,202,866,025 | 97.77 % |
| 3 | PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN | | | | 3,689,109,000 | 3,288,319,300 | 89.14 % |
| | 10 | Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) | | | 3,610,623,300 | 3,210,899,300 | 88.93 % |
| | | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 3,477,200,000 | 3,090,200,000 | 88.87 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|-------------|---|---|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | | | | | | |
| | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 133,423,300 | 120,699,300 | 90.46 % |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 3,610,623,300 | 3,210,899,300 | 88.93 % |
| | 11 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) | | | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64 % |
| | | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64 % |
| | 12 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) | | | 0 | 0 | 0.00 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|-------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 13 | Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TAN N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|-----|--------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 14 | Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang | Kegiatan | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 % |



| NO | PROG RAM | KE GIA TA N | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|-----|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | | dipersyaratkan | | | | |
| | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | JUMLAH PROGRAM | | | | 3,689,109,000 | 3,288,319,300 | 89.14 % |

2. URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.12

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |



| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
|----|---|--|--------------------|--------------------|------|
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Rp1.007.428.600, | Rp993.398.610,00 | 99% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Rp1.626.721.000,00 | Rp1.515.798.800,00 | 93% |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Rp414.519.200,00 | Rp370.960.000,00 | 89% |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Rp416.942.000,00 | Rp366.601.600,00 | 88% |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Rp868.263.000,00 | Rp836.512.000,00 | 96% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Rp392.867.000,00 | Rp382.570.500,00 | 97% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Rp396.365.000,00 | Rp395.805.000,00 | 100% |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Rp517.688.000,00 | Rp515.018.000,00 | 99% |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Rp505.759.400,00 | Rp444.038.982,00 | 88% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Rp197.950.000,00 | Rp194.490.000,00 | 98% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Rp576.115.000,00 | Rp554.367.800,00 | 96% |



| | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|------|
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Rp425.236.800,00 | Rp423.575.000,00 | 100% |
|----|--|--|------------------|------------------|------|

Sumber: Program Informasi dan Humas Dinkes, 2023

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan kinerja. Termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

3. URUSAN PERKERJAAN UMUM

Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum pada pemerintah kabupaten kolaka utara di tunjang oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

Tabel 1.13

Rincian Kegiatan Anggaran SPM Pekerjaan Umum

| No | Prog | Keg | Sub Kegiatan | Satuan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | (%) |
|-----|--|---|--|--------|----------------------|-------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | 8,096,492,099 | 8,045,416,018 | 99,37% |
| 1 | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota | | | 1,320,448,549 | 1,315,106,810 | 99,60% |
| | | 1 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | SR | 210,000,000 | 210,000,000 | 100% |
| | | 2 | Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Unit | 404,700,000 | 402,483,810 | 99,45% |
| | | 3 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan | Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% |
| | | 4 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan | Unit | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% |
| | | 5 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Unit | 555,748,549 | 552,623,000 | 99,44% |
| 2 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 6,466,574,000 | 6,421,865,500 | 99,31% |
| | | 1 | Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat | Rumah Tangga | 6,120,178,000 | 6,120,178,000 | 100% |
| | | 2 | Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Orang | 166,400,000 | 166,400,000 | 100% |
| | | 3 | Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kegiatan | 29,996,000 | 29,996,000 | 100% |
| | | 4 | Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | Dokumen | 150,000,000 | 105,291,500 | 70,19% |
| 3 | Program Penyelenggaraan Jalan | | | | | | |
| | 1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 200,000,000 | 199,543,393 | 99,77% |
| | | 1 | Pekerjaan Rabat Beton Jalan Kompleks IPLT Kolaka Utara | KM | 200,000,000 | 199,543,393 | 99,77% |
| 4 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | | | | | |
| | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 109,469,550 | 108,900,315 | 99,48% |
| | | 1 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pendataan dan Validasi data Rumah Tangga yang belum memiliki akses SPALD-S) | Laporan | 109,469,550 | 108,900,315 | 99,48% |

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Kolaka Utara Serta Realisasinya Tahun Anggaran 2023.

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALIASASI FISIK (%) |
|----|---------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|----|---------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|



| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 32,640,000 | 32,433,000 | 99,36 |
| | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 411,025,000 | 410,939,700 | 99,97 |
| JUMLAH | | | 433,665,000 | 443,372,700 | 99,93 |

Jika melihat tabel di atas maka tentunya kita bertanya mengapa anggaran SPM Bidang Perumahan masih minim, ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Anggaran SPM bidang perumahan belum bisa dimaksimalkan karena masih banyak sub kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan anggaran prioritas pada kegiatan lain.

5. URUSAN TRANTIBLINMAS

Untuk merealisasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan Program dan kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 1.15
Program Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

| No | Uraian Kegiatan | Alokasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 |
|----|---|---|
| I | Program Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 3.310.843.000 |
| I | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.116.159.000 |



| | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 66.552.000 |
| 2 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 2.981.770.000 |
| 3 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 65.637.000 |
| 4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 121.102.000 |
| II | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 73.582.000 |
| 1 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 73.582.000 |

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan sub urusan kebakaran Oleh Dinas Kebakaran kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di kabupaten Kolaka Utara terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1.16

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kebakaran Kab. Kolaka Utara Serta Realisasinya Tahun Anggaran 2023.

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALIASASI FISIK (%) |
|----|---|---|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.662.301.300 | 1.662.241.300 | 100 |



| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 25.444.700 | 25.444.700 | 100 |
| | | Investigasi Kejadian Kebakaran | 66.119.700 | 66.119.700 | 100 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 93.286.700 | 93.286.700 | 100 |
| | | JUMLAH | 1.847.152.400 | 1.847.092.400 | 100 |

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.17

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM BPBD Kab. Kolaka Utara dan Realisasinya Tahun 2023

| NO | KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | PAGU DANA (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALISASI FISIK (%) |
|---------------|---|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. Kolaka Utara | 150.000.000,- | 150.000.000,- | 100 |
| 2 | Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Penanganan dan Mitigasi Bencana | 67.615.400 | 67.615.400 | 100 |
| | | Penanganan Pasca Bencana | 83.845.000 | 83.845.000 | 100 |
| | | Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana | 300.784.000 | 300.784.000 | 100 |
| | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban Bencana | 41.000.000 | 41.000.000 | 100 |
| JUMLAH | | | 643.244.400,- | 643.244.400,- | 100 |

6. URUSAN SOSIAL

Program kegiatan dan sub kegiatan yang terkait



dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
adalah sebagai berikut :

Tabel 1.18
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan
Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kab. Kolaka Utara Serta
Realisasinya Tahun 2023

| No | Program | Kegiatan/subkegiatan | Pagu Dana (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Realisasi Fisik (%) |
|--------|-----------------------------|---|----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 339.468.000 | 331.988.000 | 97,80 |
| | | - Penyediaan permakanan | 4.500.000 | 4.500.000 | 100% |
| | | - Penyediaan Sandang | 8.875.000 | 8.875.000 | 100% |
| | | - Penyediaan Alat bantu | 6.982.000 | 6.977.000 | 99,93% |
| | | - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 4.500.000 | 4.500.000 | 100% |
| | | - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 33.908.000 | 33.666.000 | 99,29% |
| | | - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 200.170.000 | 193.029.000 | 96,43% |
| | | - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 80.533.000 | 80.441.000 | 99,89% |
| 2 | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota | 319.248.700 | 319.062.700 | 99,94 |
| | | - Penyediaan Makanan | 121.764.700 | 121.593.700 | 99,86 |
| | | - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 197.484.000 | 197.469.000 | 99,99 |
| Jumlah | | | 658.716.700 | 651.050.700 | 98,84 |



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan merupakan konsep mengenai kemajuan dan hasil-hasil dari pembangunan suatu negara. Konsep pembangunan tersebut selalu dikembangkan dari masa ke masa agar negara atau pemerintah dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Portes (1976) menjelaskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

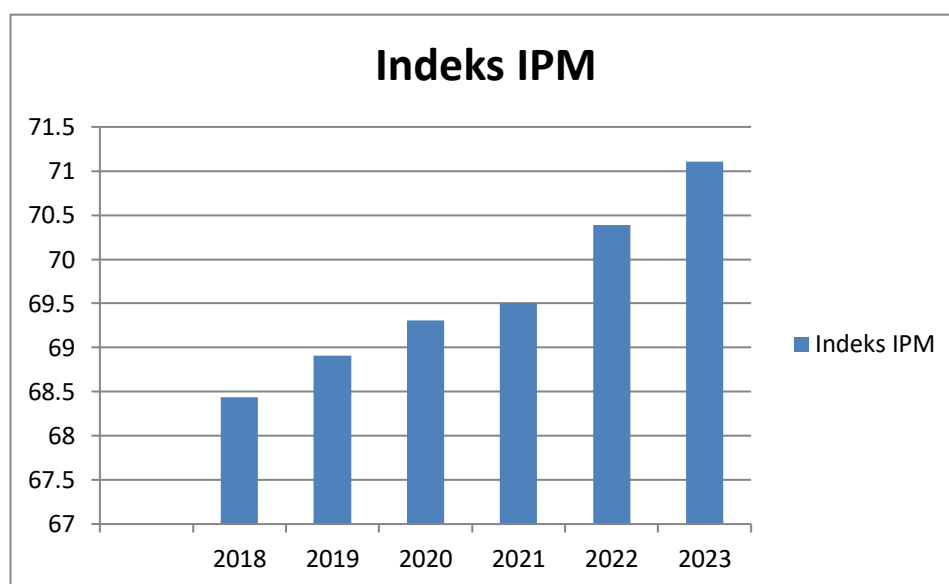
Pembangunan manusia mencakup dimensi yang sangat luas sehingga perlu adanya upaya dalam pengukuran pencapaian pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indikator komposit yang terdiri dari berbagai indikator di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk bisa mendalami perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Kolaka Utara perlu pendalaman terlebih dahulu dan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun pada masing-masing indikator pembentukan IPM di Kabupaten Kolaka Utara.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Kolaka Utara terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2023. Angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Kolaka Utara telah mencapai 71,11 pada tahun 2023 dari angka 70,39 pada tahun 2022. Pembangunan manusia Kabupaten Kolaka Utara diantara seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Berada pada peringkat kedelapan dengan kategori capaian IPM yang **tinggi** pada tahun 2023.



Peningkatan kapabilitas dasar manusia menjadi upaya penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Dengan melihat kecenderungan dan upaya yang dilakukan, pencapaian IPM Kabupaten Kolaka Utara selama kurun waktu enam tahun terakhir, realisasinya sudah mencapai level yang tinggi sebagaimana yang ada dalam capaian kategori (nilai $70 \leq \text{IPM} < 80$). Jika kecenderungan realisasi pencapaian IPM tersebut terus berlanjut tanpa ada upaya-upaya yang sinergitas maka sasaran untuk mencapai IPM ke level tinggi akan sulit terpenuhi. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara bisa secara sungguh-sungguh untuk terus berupaya meraih peluang guna meningkatkan nilai IPM dengan kriteria tinggi yang saat ini sudah menyentuh angka 71,11 (Dalam range $70 \leq \text{IPM} < 80$). Secara umum IPM Kabupaten Kolaka Utara dalam periode terakhir terus mengalami peningkatan seperti terlihat pada tahun berikut:

Tabel 2.1. IPM Kab. Kolaka Utara 6 Tahun Terakhir



b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin



adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara terus menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023 sebesar 13,57%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,49% jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun tahun 2022 sebesar 13,08%.

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kabupaten Kolaka Utara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan persentase 3,18% dari 89.934 jiwa pencari kerja, 2,86% dari 89.511 jiwa pencari kerja pada tahun 2022 dan 2,24% dari 79.393 jiwa pencari kerja tahun 2023 di kabupaten Kolaka Utara.

Tabel 2.2.
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Kolaka Utara Tahun 2021-2023

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Persentase Tingkat Pengangguran | 3.18% | 2.86% | 2,24% |

Sumber : BPS 2024

d. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini maka pendapatan masyarakat di



tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Angka pertumbuhan ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Pada tahun 2018 sampai tahun 2023, Pertumbuhan ekonomi Kolaka Utara dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kolaka Utara 2018-2023

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,59 | 6,10 | 0,40 | 2,66 | 3,69 | 3,99 |

Sumber : BPS Kolaka Utara

e. Pendapatan perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, dan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan



digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit).

PDRB Perkapita disajikan dalam dua jenis, yakni atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Indikator PDRB perkapita atas dasar harga berlaku disajikan untuk mengetahui nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan ditujukan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil perkapita penduduk suatu daerah.

PDRB perkapita Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan harga berlaku dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 sebesar Rp.70.720.000,-. Begitu pula dengan PDRB perkapita atas dasar harga Konstan pada tahun 2023 sebesar Rp 77.080.000,- Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Kolaka Utara pada periode 2022-2023 dapat dilihat dari Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Kolaka Utara 2022-2023

| Uraian | 2022 | 2023 |
|----------------|-------|-------|
| PDRB Perkapita | 70,72 | 77,08 |

Sumber : BPS Kolaka Utara

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Tabel 2.4
Gini Rasio Kabupaten Kolaka Utara 2021-2023

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|
| Gini Rasio | 0,35 | 0.38 | 0,33 |

Sumber : BPS Kolaka Utara



Capaian Kinerja makro Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Makro Menggunakan Indikator Kinerja Makro

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 70,39 | 71,11 | 1,01 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 13,08 | 13,57 | 1,04 |
| 3 | Angka Pengangguran | 2,86 | 2,24 | 0,8 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 3,69 | 3,99 | 1,08 |
| 5 | Pendapatan Per kapita | 70,72 | 77,08 | 1,09 |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | 0,38 | 0,33 | 0,87 |

Sumber : BPS Kolaka Utara

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator oleh pemerintah daerah kabupaten kolaka utara secara lengkap dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci Lampiran 1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara ini.



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/Badan hukum/Pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sarana ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

1. Metode perhitungan kinerja

Secara sederhana, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja dikalikan dengan seratus persen, dengan bentuk rumus.

Jika realisasi kinerja lebih tinggi dari target kinerja yang menunjukkan pencapaian kinerja baik, maka dengan rumus:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Kinerja =% (Predikat.....)

Jika realisasi kinerja lebih tinggi dari target kinerja yang menunjukkan pencapaian kinerja buruk maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kinerja =% (Predikat.....)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dipergunakan nilai disertai makna dan nilai tersebut, yaitu:

**Tabel 2.7
Capaian Kinerja**

| No | Persentase Capaian Kinerja (%) | Predikat |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | >100 | Sangat Baik |
| 2 | 80,01 - 100,00 | Baik |
| 3 | 60,01 - 80,00 | Sedang |
| 4 | 40,01 - 60,00 | Kurang |
| 5 | 00,00 - 40,00 | Sangat Kurang |

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara terdapat 24 indikator sasaran dari 13 sasaran. Pencapaian sasaran dihitung dari pencapaian 24 indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel : 2.8

**Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Pemkab. Kolaka Utara Tahun 2023
Visi: Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani Di Sulawesi Tenggara**

| No | SASARAN | No | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA 2023 | REALISASI KINERJA 2023 | CAPAIAN KINERJA 2023 | PREDIKAT |
|----|---------|----|-------------------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|----------|
|----|---------|----|-------------------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|----------|



| | | | | | | | | |
|---|--|----|---|-------|--------|--------|---------|---------------|
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata | 1 | Angka harapan hidup (Thn) | Tahun | 70,40 | 70,62 | 100,3% | Sangat Baik |
| | | 2 | Persentase Stunting | % | 12,46 | 3,27 | 381% | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kebudayaan dan olahraga | 3 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Thn) | Tahun | 8,36 | 8,51 | 102% | Sangat Baik |
| | | 4 | Angka Harapan Lama Sekolah (Thn) | Tahun | 12,16 | 12,17 | 100% | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya kesejahteraan social | 5 | Kemiskinan (%) | % | 13,04 | 13,57 | 96% | Baik |
| | | 6 | Gini rasio | % | 0,32 | 0,33 | 97% | Baik |
| 4 | Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak | 7 | Persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah | % | 60,12 | 61,10 | 102% | Sangat Baik |
| | | 8 | Persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta | % | 41,01 | 93,03 | 227% | Sangat Baik |
| 5 | Meningkatnya produktivitas dan daya saing perekonomian berbasis sumber daya alam berkelanjutan | 9 | Laju PDRB Sektor Pertanian | % | 0,57 | 1,35 | 236% | Sangat Baik |
| | | 10 | Nilai Tukar Petani | % | 107,04 | 110,66 | 103% | Sangat Baik |
| | | 11 | Nilai Tukar Nelayan | % | 107,25 | 112,24 | 104% | Sangat Baik |
| 6 | Meningkatnya daya saing perekonomian melalui peningkatan kontribusi UMKM | 12 | Laju PDRB Sektor Industri | % | 0,87 | -11,05 | -1.270% | Sangat Kurang |
| | | 13 | Laju PDRB Sektor Perdagangan | % | 5,75 | 0,02 | 0,35% | Sangat Kurang |
| 7 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap dunia kerja | 14 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,75 | 2,24 | 123% | Sangat Baik |



| | | | | | | | | |
|----|--|----|---|-------|--------------------|---------|--------|---------------|
| 8 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana wilayah | 15 | Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | % | 64,00 | 53,8 | 84% | Baik |
| | | 16 | Persentase penduduk berakses air minum | % | 54,00 | 93,48 | 173% | Sangat Baik |
| | | 17 | Persentase rumah layak huni | % | 70,01 | 75,46 | 108% | Sangat Baik |
| | | 18 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | % | 76,41 | 80,70 | 105% | Sangat Baik |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 19 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 87,40 | 86,23 | 98,7% | Baik |
| | | 20 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | % | 71,15 | 20,4 | 28,7% | Sangat Kurang |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja | 21 | Nilai SAKIP Kabupaten | % | 67,43/B | 66,94/B | 99% | Baik |
| 11 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 22 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | Sangat Baik |
| 12 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah | 23 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | % | 47,00 | 53,69 | 114% | Sangat Baik |
| 13 | Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan inovasi Daerah | 24 | Inovasi Daerah | % | 40,15/ Inovatif | 25,73 | 64,08% | Sedang |

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dari tahun 2020 s/d 2023 mengalami beberapa tantangan dan kendala, baik yang diakibatkan oleh kondisi internal maupun diakibatkan oleh kondisi eksternal. Secara umum, pengaruh kondisi internal yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja adalah kecakapan sumber daya



manusia, baik yang terlibat secara langsung maupun yang berada pada second line yang belum memadai di semua lini. Adapun tantangan eksternal lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara nasional dan masih kurangnya sumber daya dalam bidang sarana, prasarana dan sistem elektronifikasi sebagai penunjang dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir penting disajikan untuk melihat trend perubahan pada setiap tahun anggaran yang ditunjukkan pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel : 2.9

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | Indikator Kinerja | Kinerja Tahun | | | |
|-----|---|---------------|--------|--------|--------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 1. | Angka harapan hidup (Thn) | 70,62 | 70,40 | 70,36 | 70,36 |
| 2. | Persentase Stunting | 3,27% | 5,7% | 8,8% | 13,7% |
| 3. | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Thn) | 8,51 | 8,54 | 8,22 | 8,12 |
| 4. | Angka Harapan Lama Sekolah (Thn) | 12,17 | 12,16 | 12,15 | 12,11 |
| 5. | Kemiskinan (%) | 13,57% | 13,08% | 13,79% | 12,96% |
| 6. | Gini rasio | 0,333% | 0,380% | 0,356% | 0,354% |
| 7. | Persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah | 61,10% | 60,60% | 59,52% | 59,42% |
| 8. | Persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta | 93,03% | 93,87% | 94,34% | 94,45% |
| 9. | Laju PDRB Sektor Pertanian | 1,35 | 5,01 | 0,34 | -0,63 |
| 10. | Nilai Tukar Petani | 101,09 | 100,15 | 99,16 | 96,48 |
| 11. | Nilai Tukar Nelayan | 112.24 | 114.89 | 109.73 | 103.53 |



| | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 12. | Laju PDRB Sektor Industri | -11,05 | 7,06 | -0,83 | -2,41 |
| 13. | Laju PDRB Sektor Perdagangan | 0,02 | 6,53 | 5,62 | -1,51 |
| 14. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,24 | 2,86 | 3,18 | 2,13 |
| 15. | Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | 53,8% | 50,23% | 61,35% | - |
| 16. | Persentase penduduk berakses air minum | 93,48% | 64,79% | 25,13% | - |
| 17. | Persentase rumah layak huni | 75,46 | 71,72 | 71,35 | 70,99 |
| 18. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | 80,70% | 83,21% | 82,5% | - |
| 19. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86,23 | 86,17 | 84,62 | 83,01 |
| 20. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,04 | 1,89 | 1,78 | Tidak ada Penilaian (Covid) |
| 21. | Nilai SAKIP Kabupaten | 66,94 | 66,28 | 65,81 | - |
| 22. | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 23. | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | 53,69 | 54,07 | 42,94 | 38,73 |
| 24. | Inovasi Daerah | 25,73 | 44,81 | 38,24 | Belum Dilakukan Penilaian |

d. Pengukuran pencapaian kinerja dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Daerah 2023-2026;

Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Utara sampai dengan tahun ini paling menonjol dilihat pada pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan prestasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejak tahun Anggaran 2015, 2016 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022 dan 2023. Pada tahun



2012-2013 pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara baru mendapat predikat WDP (wajar dengan pengecualian).

Adapun pencapaian progres pada indikator kinerja lainnya dapat dilihat pada tabel 2.10 Berikut ini:

Tabel 2.10
Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target pembangunan daerah (RPD)

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Yang Ingin Dicapai Oleh RPD | Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,30 | 3,99 | Belum tercapai |
| 2. | Indeks Pembangunan Manusia | % | 69,67 | 71,11 | Tercapai |
| 3. | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,40 | 70,62 | Tercapai |
| 4. | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,16 | 12,17 | Tercapai |
| 5. | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,36 | 8,51 | Tercapai |
| 6. | Tingkat Kemiskinan | % | 13,04 | 13,57 | Belum tercapai |
| 7. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 2,75 | 2,24 | Tercapai |
| 8. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 76,41 | 80,70 | Tercapai |
| 9. | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 87,40 | 98,7% | Tercapai |
| 10. | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | Tercapai |



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dari penggunaan sumber daya keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kab.Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023. Seperti ditunjukkan pada tabel 2.11.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------|--------------|
| Sangat efektif | : > 100% |
| Efektif | : 90% - 100% |
| Cukup Efektif | : 80% - 90% |
| Kurang Efektif | : 60% - 80% |
| Tidak Efektif | : 0% - 60% |

Sedangkan bila dilihat dari segi efisiensi anggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat Efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------|--------------|
| Sangat Efisien | : 0% - 60% |
| Efisien | : 60% - 80% |
| Cukup Efisien | : 80% - 90% |
| Kurang Efisien | : 90% - 100% |
| Tidak Efisien | : > 100% |



Tabel 2.11

| URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN | EFEKTIVITAS | EFISIENSI |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4= [(5:4)x100] | 5 | 6 |
| TOTAL BELANJA | 1.062.962.031.086 | 1.000.028.409.301,53 | 94,08 | Efektif | Kurang Efisien |
| BELANJA OPERASIONAL | 705.235.041.919 | 652.716.200.851,53 | 92,55 | Efektif | Kurang Efisien |
| Belanja Pegawai | 343.650.429.772 | 320.393.401.690,00 | 93,23 | Efektif | Kurang Efisien |
| Belanja Barang dan Jasa | 326.740.204.729 | 297.970.966.743,53 | 91,20 | Efektif | Kurang Efisien |
| Belanja Hibah | 34.311.907.418 | 33.826.457.418,00 | 98,59 | Efektif | Kurang Efisien |
| Belanja Bantuan Sosial | 532.500.000 | 525.375.000,00 | 98,66 | Efektif | Kurang Efisien |
| BELANJA MODAL | 181.484.893.628 | 173.844.823.011,00 | 95,79 | Efektif | Kurang Efisien |
| Belanja Tanah | 104.320.049 | 104.319.190,00 | 100,00 | Sangat Efektif | Tidak Efisien |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 34.765.692.869 | 32.013.548.077,00 | 92,08 | Efektif | Kurang Efisien |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 68.773.648.373 | 65.049.961.147,00 | 94,59 | Efektif | Efisien |
| Belanja Jalan, irigasi dan jaringan | 70.057.377.559 | 69.523.773.449,00 | 99,24 | Efektif | Kurang Efisien |
| Belanja Aset Tetap lainnya | 7.783.854.778 | 7.153.221.148,00 | 91,90 | Efektif | Kurang Efisien |



| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| BELANJA TAK TERDUGA | 4.341.967.001 | 1.567.278.051,00 | 36,10 | Tidak Efektif | Sangat Efisien |
| Belanja tak terduga | 4.341.967.001 | 1.567.278.051,00 | 36,10 | Tidak Efektif | Sangat Efisien |

Sehingga bila dilihat pada tabel di atas, secara keseluruhan *efektivitas* belanja Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara berada pada angka **94,08 %** yang berarti **Efektif**.

Sehingga bila dilihat pada tabel di atas, secara keseluruhan Belanja, tingkat *efisiensi* anggaran Pemerintah Kab. Kolaka Utara berada pada angka **94,08 %** yang berarti **Kurang Efisien**.

- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan hal-hal apa saja yang mengakibatkan keberhasilan atau kegagalan suatu program yang mendukung tercapainya target kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada Tahun anggaran 2022. Secara rinci, analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini :



Tabel 2.12

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

| No | Indikator kinerja | Program/Kegiatan yang menunjang | Analisis Program/Kegiatan |
|----|------------------------|--|---|
| 1. | Nilai SAKIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 2. | Opini laporan keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 8. | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| 3. | Indeks kepuasan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 10. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 12. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 15. Program Peningkatan Layanan Kesehatan DPRD 16. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
|----|----------------------------|---|---|



| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 17. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 18. Program Pengkajian dan Penelitian 19. Program Pengembangan Pelayanan perizinan 20. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan 21. Program Pengendalian dan Pengaduan atas Kinerja Pelayanan Perizinan 22. Program Kebijakan Advokasi Layanan 23. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS 26. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 27. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 28. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 29. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 30. Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | |
| 4. | Rata-rata Pertumbuhan sub sektor Tanaman Pangan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 3. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya 4. Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 6. Pengembangan intensifikasi tanaman padi 7. Gerakan bersama pengendalian OPT padi sawah 8. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (sharing dana TP T. Pangan) 9. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 10. Pengembangan diversifikasi tanaman 11. Pengembangan pertanian pada lahan kering 12. Penyusunan data base potensi produksi pangan 13. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 14. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 16. Pertemuan teknis penyuluh tingkat kabupaten 17. Pertemuan rutin penyuluh tingkat kecamatan | |
| 5. | Rata-rata Pertumbuhan sub sektor Tanaman Hortikultura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan intensifikasi tanaman palawija (jagung) 2. Pengembangan intensifikasi tanaman palawija (talas) | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 6. | Rata-rata Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani tanaman perkebunan 2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (sharing dana TP perkebunan) 4. Pengembangan perbenihan dan perbibitan 5. Perbenihan dan perbibitan 6. Pengadaan Prasarana dan Sarana teknologi Pertanian/ perkebunan 7. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian 8. Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah 9. Pembinaan/penyuluhan peningkatan produksi pertanian (mendukung tanaman selah perkebunan) 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 12. Pemutakhiran data perkebunan 13. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan 14. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan 15. Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 16. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan 17. Monitoring/supervisi pelaksanaan kegiatan penyuluhan | |
| 7. | Rata-rata Pertumbuhan Subsektor Peternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan masalah peternakan 2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 5. Pengembangan agribisnis peternakan 6. Integrasi ternak - kakao 7. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 8. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna | |
| 8. | Rata-rata Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 2. Peningkatan Produksi Benih ikan Air Tawar dan Udang Vaname (UPTD BBI) 3. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 4. Pengembangan dan Peningkatan Operasional UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5. Peningkatan Kapasitas SDM masyarakat Perikanan 6. Peningkatan Konsumsi Ikan dengan Pegolahan dan pemasaran produksi perikanan 7. Terpenuhinya pemanfaatan potensi perikanan budidaya air payau dan tawar 8. Peningkatan Ketersediaan Informasi Data Statistik Perikanan 9. Peningkatan Pedampingan dan informasi Teknologi masyarakat perikanan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 9. | Rata-rata Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 5. Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya 12. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | |
| 10. | Rata-rata Capaian Pelayanan SPM Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pendidikan anak usia dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Pendidikan Luar Biasa 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Program Cerdas Kolaka Utara 8. Program Pengembangan Nilai Budaya 9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 11. | Presentase koperasi aktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 12. | Persentase Usaha Kecil dan Menengah aktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|-----|---|--|---|
| 13. | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Nilai PDRB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Perencanaan Dan Pembangunan Potensi Daerah 4. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perekonomian | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 14. | Persentase peningkatan kunjungan wisata per tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Budaya Media Desain dan Iptek 4. Program Peningkatan Sumberdaya Pariwisata dan Ekraf | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 15. | Kontribusi nilai produktivitas IKM terhadap PDRB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Penataan Struktur Industri 3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 16. | Persentase wirausaha pemuda mandiri perdesaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Transmigrasi Swakarsa Mandiri | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 17. | Nilai Produktivitas Angkatan Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial Tenaga Kerja | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | 5. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | |
| 18. | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 3. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 4. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5. Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan 6. Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 19. | Indeks konektivitas infrastruktur, pemukiman dan lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; 2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 5. Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan; 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|-----|--|--|---|
| 20. | Persentasi tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Program Pengendalian Banjir | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 21. | Rata-rata capaian SPM bidang pekerjaan umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 22. | Presentase rumah layak huni | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 3. Program lingkungan Sehat Perumahan; | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 23. | Persentase penggunaan ruang sesuai RTRW | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan tata ruang 2. Program pemanfaatan ruang 3. Program pengendalian pemanfaatan ruang | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 24. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 25. | Presentase aparatur sipil negara meleak Alquran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan nilai-nilai agama dan kebudayaan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|-----|---|--|---|
| 26. | Persentase peserta didik melek al-qur'an | 1. rogram peningkatan nilai-nilai agama dan kebudayaan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 27. | Persentase pembinaan lembaga pengembangan tahfidz dan tilawah | 1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
| 28. | Angka kriminalitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4. Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan 5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan 7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 8. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |



| | | | |
|-----|-----------------------------|--|---|
| 29. | Presentase angka kemiskinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Program ini diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian program agar dapat mencapai target indikator |
|-----|-----------------------------|--|---|



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan



pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota didanai dari APBD provinsi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sistem pengaturannya mencakup aspek pendapatan daerah, aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah propinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pengalokasian dana Tugas Pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - e. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 - f. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - g. Daftar isian Program Anggaran nomor : NOMOR SP DIPA-018.05.4.200831/2023 Tanggal 30 November 2022 Kementerian Pertanian.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kolaka Utara :

- a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
 - Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- b. bidang urusan yang ditugas pembantuankan :
 1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia :
 - Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri
 - Program Dukungan Manajemen
- c. Jumlah Kegiatan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 - a. Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar



- b. Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya
Ditjen Bina Perkebunan
- d. Anggaran Tugas Pembantuan

Sumber anggaran berasal dari APBN melalui Kementerian Pertanian RI, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp.1.931.160.000,-

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

- a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- b. Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan sasaran program mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 100 %

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

- Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 - h. Target Kinerja berdasarkan Daftar isian Program Anggaran nomor : SP DIPA-018.05.4.200831/2023 Tanggal 30 November 2022 Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :
 1. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - Sarana pengembangan kawasan



2. Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya
Ditjen Bina Perkebunan

- Tersedia layanan manajemen kinerja internal

3.1.2. Realisasi

Realisasi Tugas Pembantuan diwilayah kabupaten
Kolaka Utara dapat dilihat dari Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SESUAI RKA-KL

| Kode | Uraian/Kegiatan | TARGET | | | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN | PERMASLAHAN | | |
|--------------|--|--------|-----|--------------|---------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|--|
| | | FISIK | | HARGA SATUAN | KEUANGAN | KEUANGAN | | FISIK | | | | |
| | | | | | | SERAPAN | % | VOLUME | | | % | |
| '018.05.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | | | | 1.931.160.000 | 1.920.660.000 | 99,46 | | 100,00 | 10.500.000 | | |
| 1777 | Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar | | | | 1.266.160.000 | 1.255.660.000 | 99,17 | | 100,00 | 10.500.000 | | |
| 1777.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan KAB. KOLAKA UTARA | 1400 | Ha | | 1.266.160.000 | 1.255.660.000 | 99,17 | | Ha | 100,00 | 10.500.000 | |
| 1777.RAI.002 | Kawasan Kakao | 100 | Ha | | 1.260.000.000 | 1.249.500.000 | 99,17 | | Ha | 100,00 | 10.500.000 | |
| 052 | Peremajaan Tanaman Kakao | | | | 1.245.000.000 | 1.234.500.000 | 99,16 | | | 100,00 | 10.500.000 | |
| A | Peremajaan Tanaman Kakao 100 ha (KP) | | | | 1.245.000.000 | 1.234.500.000 | 99,16 | | | 100,00 | 10.500.000 | |
| 526115 | Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (156-Kolaka) | | | | 1.245.000.000 | 1.234.500.000 | 99,16 | | | 100,00 | 10.500.000 | |
| | - Benih Kakao Siap Tanam | 10000 | Btg | 10.500 | 1.050.000.000 | 1.040.000.000 | 99,05 | 1.000.000 | Btg | 100,00 | 10.000.000 | |
| | - Pupuk NPK (03 kg/btg) | 5000 | Kg | 15.000 | 75.000.000 | 74.500.000 | 99,33 | 5.000 | Kg | 100,00 | 500.000 | |
| | - Pupuk organik | 30000 | Kg | 4.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 100,00 | 30.000 | Kg | 100,00 | 0 | |
| 055 | Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan | | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| A | Pengawasan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao (KP) | | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 521211 | Belanja Bahan (156-Kolaka) | | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Penyusunan Juknis | 10 | Oh | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 10 | Oh | 100,00 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|-----------|------------------|------------------|---------------|----|-----|---------------|----------|
| | - Adm,fotocopy, dll | 1 | Thn | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 |
| 521213 | Belanja Honor Ouput Kegiatan (156-Kolaka) | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - Honor Panitia | 6 | OB | 300.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00 | 6 | Oh | 100,00 | 0 |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (156-Kolaka) | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - ATK dan Bahan Komputer | 1 | Thn | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 9.500.000 | 9.500.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - Identifikasi CP/CL dan penetapan lokasi dan petani | 10 | Oh | 250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 10 | Oh | 100,00 | 0 |
| | - Dalam rangka pengawalan pelaksanaan kegiatan | 10 | Oh | 250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 10 | Oh | 100,00 | 0 |
| | - Dalam rangka monitoring dan Evaluasi | 10 | Oh | 250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 10 | Oh | 100,00 | 0 |
| | - Dalam Rangka Konsultasi Ke Provinsi | 1 | Op | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | 1 | Op | 100,00 | 0 |
| 1777.RAI.005 | Kawasan Kelapa | 100 | Ha | | 6.160.000 | 6.160.000 | 100,00 | | Ha | 100,00 | 0 |
| 051 | Perluasan Tanaman Kelapa | | | | 6.160.000 | 6.160.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| 055 | Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan | | | | 6.160.000 | 6.160.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| A | Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Kelapa | | | | 6.160.000 | 6.160.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| 521211 | Belanja Bahan (156-Kolaka) | | | | 310.000 | 310.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - Adm fotocopy dll | 1 | Thn | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (156-Kolaka) | | | | 600.000 | 600.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - ATK dan Bahan Komputer | 1 | Thn | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 5.250.000 | 5.250.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|-----|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----|-----|---------------|----------|--|
| | - Identifikasi CP/CL dan penetapan lokasi dan petani | 21 | Oh | 250.00 0 | 5.250.000 | 5.250.000 | 100,00 | 21 | Oh | 100,00 | 0 | |
| '018.05.WA | Program Dukungan Manajemen | | | | 665.000.000 | 665.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 1780 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan | 1 | Dok | | 665.000.000 | 665.000.000 | 100,00 | | Dok | 100,00 | 0 | |
| 1780.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal KAB. KOLAKA UTARA | | | | 665.000.000 | 665.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 1780.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | | | 665.000.000 | 665.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 055 | Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Satker | | | | 665.000.000 | 665.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| A | Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan | | | | 81.000.000 | 81.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 521211 | Belanja Bahan (156-Kolaka) | | | | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Adm fotocopy penggandaan dll | 1 | Thn | 3.000. 000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 | |
| | - Pembuatan Juknis | 1 | KEG | 1.500. 000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 1 | KEG | 100,00 | 0 | |
| | - Pembuatan Laporan Kegiatan | 1 | PKT | 2.000. 000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Konsumsi Rapat Koordinasi kegiatan | 50 | OH | 50.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 50 | OH | 100,00 | 0 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 72.000.000 | 72.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi | 20 | OT | 2.000. 000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 | 20 | OT | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam Rangka Pengawasan ke Lokasi | 60 | OH | 250.00 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 | 60 | OH | 100,00 | 0 | |
| | - Koordinasi konsultasi dan menghadiri pertemuan ke Pusat | 2 | OT | 8.500. 000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100,00 | 2 | OT | 100,00 | 0 | |
| B | Operasional terkait Dukungan Teknis Major Project Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani | | | | 41.500.000 | 41.500.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 521211 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (156-Kolaka) | | | | 7.500.000 | 7.500.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|-----|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----|-----|---------------|----------|--|
| | - Administrasi fotocopy penggandaan dll | 1 | Thn | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 | | Thn | 100,00 | 0 | |
| | - Pembuatan Juknis | 1 | Keg | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 1 | Keg | 100,00 | 0 | |
| | - Pembuatan Laporan Kegiatan | 1 | PKT | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | | PKT | 100,00 | 0 | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (156-Kolaka) | | | | 7.500.000 | 7.500.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - ATK dan Bahan Komputer | 1 | Thn | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 100,00 | | Thn | 100,00 | 0 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 26.500.000 | 26.500.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Monitoring dan Evaluasi ke lokasi kegiatan Major Project | 25 | OH | 250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 100,00 | 25 | OH | 100,00 | 0 | |
| | - Koordinasi ke Provinsi | 7 | OT | 2.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100,00 | 7 | OT | 100,00 | 0 | |
| | - Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Major Project | 25 | OH | 250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 100,00 | 25 | OH | 100,00 | 0 | |
| C | Bimtek Pembentukan Korporasi terkait Dukungan Teknis Major Project Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani | | | | 42.000.000 | 42.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 521211 | Belanja Bahan (156-Kolaka) | | | | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - ATK dan Bahan komputer | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Administrasi fotocopy penggandaan dll | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Dokumentasi | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 27.000.000 | 27.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Perjalanan Narasumber kegiatan Koorporasi petani | 3 | OT | 3.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 | 3 | OT | 100,00 | 0 | |
| | - Perjalanan Narasumber kegiatan Bimtek Pengolahan kakao | 3 | OT | 6.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100,00 | 3 | OT | 100,00 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----|-----------|-------------------|-------------------|---------------|-----|-----|---------------|----------|--|
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (156-Kolaka) | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Bimbingan Teknis Pembentukan Koorporasi | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Uang saku Bimtek Pembentukan Koorporasi | 30 | OH | 50.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 30 | OH | 100,00 | 0 | |
| | - Transport Bimtek Pembentukan Koorporasi | 30 | OH | 50.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 30 | OH | 100,00 | 0 | |
| D | Rapat-rapat Intern terkait Pembentukan Korporasi Major Project Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani | | | | 46.000.000 | 46.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 521211 | Belanja Bahan (156-Kolaka) | | | | 38.000.000 | 38.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - ATK dan Bahan komputer | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Konsumsi Rapat Koordinasi Kegiatan | 100 | OH | 100.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 | 100 | OH | 100,00 | 0 | |
| | - Perbanyak Materi Rapat | 100 | Eks | 250.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 | 100 | Eks | 100,00 | 0 | |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (156-Kolaka) | | | | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Administrasi fotocopy penggandaan dll | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Dokumentasi | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Pembuatan Laporan Kegiatan Rapat-Rapat | 1 | PKT | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | | PKT | 100,00 | 0 | |
| E | Rapat-Rapat Pembentukan Korporasi terkait Dukungan Teknis Major Project Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani | | | | 41.700.000 | 41.700.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 521211 | Belanja Bahan (156-Kolaka) | | | | 5.700.000 | 5.700.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - ATK dan Bahan komputer | 1 | PKT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Administrasi fotocopy | 1 | PKT | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|-----|------------|--------------------|--------------------|---------------|----|-----|---------------|----------|--|
| | penggandaan dll | | | 000 | | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Perjalanan Narasumber | 2 | OT | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | 2 | OT | 100,00 | 0 | |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (156-Kolaka) | | | | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Rapat terkait Pembentukan Koorporasi | 1 | PKT | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | 1 | PKT | 100,00 | 0 | |
| G | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | | | | 56.000.000 | 56.000.000 | 100,00 | | | 0,00 | 0 | |
| 521211 | Belanja Bahan (156-Kolaka) | | | | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Adm fotocopy penggandaan dll | 1 | Thn | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 | |
| | - Pembuatan Juklak | 1 | Keg | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 1 | Keg | 100,00 | 0 | |
| | - Pertemuan Koordinasi di Kabupaten | 1 | PKT | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | | PKT | 100,00 | 0 | |
| | - Konsumsi Rapat Koordinasi kegiatan | 50 | OH | 50.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 50 | OH | 100,00 | 0 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 47.000.000 | 47.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi | 5 | OT | 2.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 | 5 | OT | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam Rangka Monitoring dan evaluasi kegiatan | 20 | OH | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 20 | OH | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam rangka pertemuan di Pusat/di Luar Provinsi terkait Data statistik dan Monev | 4 | OT | 8.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 100,00 | 5 | OT | 100,00 | 0 | |
| H | Administrasi Satker | | | | 331.250.000 | 331.250.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (156-Kolaka) | | | | 104.600.000 | 104.600.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran | 12 | OB | 2.280.000 | 27.360.000 | 27.360.000 | 100,00 | 11 | OB | 100,00 | 0 | |
| | - Honorarium Pejabat Pembuat | 12 | OB | 2.210. | 26.520.000 | 26.520.000 | 100,00 | 11 | OB | 100,00 | 0 | |



| | Komitmen | | | 000 | | | | | | | | |
|--------|---|----|-----|---------------|-------------|-------------|--------|----|-----|--------|---|--|
| | - Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM | 12 | OB | 880.00 0 | 10.560.000 | 10.560.000 | 100,00 | 11 | OB | 100,00 | 0 | |
| | - Honrarium Bendahara Pengeluaran | 12 | OB | 770.00 0 | 9.240.000 | 9.240.000 | 100,00 | 11 | OB | 100,00 | 0 | |
| | - Honorarium Staf Pengelola Satker | 36 | OB | 570.00 0 | 20.520.000 | 20.520.000 | 100,00 | 10 | OB | 100,00 | 0 | |
| | - Honor Staf Pengelola SAI | 24 | OB | 150.00 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00 | 22 | OB | 100,00 | 0 | |
| | - Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 10 | OB | 680.00 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | 100,00 | 10 | OB | 100,00 | 0 | |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (156-Kolaka) | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Administrasi fotocopy penggandaan pelaporan dll | 1 | Thn | 1.000. 000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (156-Kolaka) | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - ATK dan Bahan Komputer | 1 | Thn | 3.000. 000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 1 | Thn | 100,00 | 0 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 219.500.000 | 219.500.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 | |
| | - Workshop penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 | 2 | OT | 8.500. 000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100,00 | 2 | | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam rangka konsultasi ke Provinsi dan Pertemuan Koordinasi Provinsi | 10 | OT | 2.000. 000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 | 10 | OT | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam rangka pertemuan di Pusat/di Luar Provinsi | 2 | OT | 8.500. 000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100,00 | 2 | OT | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam rangka monitoring dan evaluasi ke Lokasi | 50 | OH | 250.00 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 100,00 | 50 | OT | 100,00 | 0 | |
| | - Workshop penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 | 2 | OT | 8.500. 000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100,00 | 2 | OH | 100,00 | 0 | |
| | - Dalam rangka Pertemuan Bendahara Semester I, II di Pusat/di luar Provinsi | 6 | OT | 8.500. 000 | 51.000.000 | 51.000.000 | 100,00 | 6 | OT | 100,00 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|----|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----|----|---------------|----------|
| | - Workshop penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 | 2 | OT | 8.500.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100,00 | 2 | OT | 100,00 | 0 |
| | - Menghadiri Kegiatan Pertemuan Nasional Percepatan tindak lanjut LHA/P | 4 | OT | 8.500.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 100,00 | 4 | OH | 100,00 | 0 |
| | - Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK-RI/Irjen) | 2 | OT | 8.500.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100,00 | 2 | OH | 100,00 | 0 |
| | - Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan SAI ke Pusat | 2 | OT | 8.500.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 100,00 | 2 | OT | 100,00 | 0 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (156-Kolaka) | | | | 3.150.000 | 3.150.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - Dalam Rangka Koordinasi dan Rekonsiliasi | 21 | OH | 150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 100,00 | 21 | OH | 100,00 | 0 |
| I | Operasional ULP | | | | 16.000.000 | 16.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 16.000.000 | 16.000.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - Dalam rangka survey harga | 8 | OT | 2.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 100,00 | 8 | OT | 100,00 | 0 |
| J | Operasional Kegiatan | | | | 9.550.000 | 9.550.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (156-Kolaka) | | | | 9.550.000 | 9.550.000 | 100,00 | | | 100,00 | 0 |
| | - Dalam rangka pengawalan dan pendampingan kegiatan | 10 | OH | 250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 10 | OH | 100,00 | 0 |
| | - Dalam rangka Sosialisasi kegiatan | 10 | OT | 380.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 100,00 | 10 | OT | 100,00 | 0 |
| | - Dalam rangka monitoring dan Evaluasi ke Lokasi | 13 | OH | 250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 100,00 | 13 | OH | 100,00 | 0 |



3.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam Tugas Pembantuan di Kabupaten Kolaka Utara adalah :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana
- 2) Masih kurangnya sumber daya aparatur
- 3) Jarak antar Kabupaten Kolaka Utara dengan KPPKN masih jauh dengan kondisi jalan yang kurang baik (± 125 Km) dengan anggaran operasional yang minim

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

1. SKPD harus melakukan monitoring secara terus menerus kepada masyarakat yang melaksanakan tugas pembantuan.
2. Pencairan dana tugas pembantuan harus tepat waktu.
3. Kerjasama SKPD dengan pemerintah daerah ditingkatkan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu keharusan sekaligus sebagai tantangan bagi daerah untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam mengelola, menata dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yang pada prinsipnya telah memberi peluang besar bagi kemajuan dan kemakmuran daerah, persoalannya tinggal bagaimana daerah itu dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan berbagai kewenangan itu dalam tatanan lebih kongkrit sesuai hakikat dan tujuan otonomi daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriterial. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak memperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria pentapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.



Mekanisme penerapan SPM berdasarkan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Belanja Daerah juga harus diprioritaskan untuk mendanai pemenuhan SPM. Atas prioritas tersebut maka SPM telah menjamin hak konstitusional warga negara sehingga prioritas utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan, maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur terbuka terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi pemerintah Daerah karena :

- 1) Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada.
- 3) Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi



masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Strategi pembangun daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan system manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyusun Rencana Pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-



SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

4.1 **BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 202 tentang standar Pelayanan Pendidikan Minimal, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh ssetiap peserta didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Mutu palayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan.
4. Penerima Pelayanan Dasar pada :
 - a. Pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) Tahun.

| | | |
|---------------|---|--|
| Capaian SPM = | $\frac{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar}}{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten bersangkutan}} \times 100\%$ | |
|---------------|---|--|



b. Pendidikan Dasar merupakan peserta didik berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar}}{\text{jumlah anak usia 7-15 tahun pada Kabupaten bersangkutan}} \times 100\%$$

c. Pendidikan Dasar merupakan peserta didik berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar}}{\text{jumlah anak usia 7-18 tahun pada Kabupaten bersangkutan}} \times 100\%$$

2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurang waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Batas Waktu Capain |
|----|---------------------------|---|----------------|--------------------|
| 1 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs) | 100% | Setiap Tahun |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100% | Setiap Tahun |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 100% | Setiap Tahun |

3. ANGGARAN



Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD. Alokasi anggaran Dinas Pendidikan untuk pencapaian penerapan SPM adalah sebagai berikut :

TABEL ALOKASI ANGGARAN

| NO | PENDANAAN | PAGU |
|----|---|-----------------|
| 1 | APBD KAB. KOLAKA UTARA | 954,952,623,199 |
| 2 | ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH | 218,249,179,252 |
| 3 | ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD | 71,208,640,631 |
| | APBD | 71,208,640,631 |
| | A. APBD MURNI | 0 |
| | B. APBD DAU | 37,258,554,631 |
| | C. APBD DAK FISIK | 8,826,966,000 |
| | D. APBD DAK NON FISIK | 25,123,120,000 |
| | E. DANA BAGI HASIL | 0 |
| | F. KERJASAMA | 0 |
| | G. OTONOMI KHUSUS | 0 |
| | NON APBD | 0 |
| | A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) | 0 |
| | APBN | 0 |
| | B. APBN-DEKONSENTRASI | 0 |
| | C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN | 0 |
| | DANA LAINNYA | 0 |

Rincian Anggaran Pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|----------|--|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47% |
| 1 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | | | | 9,012,159,000 | 8,915,542,838 | 98.93% |
| | 1 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K2023542 | | | 7,741,427,200 | 7,664,693,138 | 99.01% |
| | | 1 | Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 3 | Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | 4 | Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa | Peserta didik | 2,608,936,200 | 2,577,258,200 | 98.79% |
| | 5 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 5,132,491,000 | 5,087,434,938 | 99.12% |
| | 6 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | 7,741,427,200 | 7,664,693,138 | 99.01% |
| 2 | Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K2023532 | | | 56,063,100 | 51,809,900 | 92.41% |
| | 1 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 4 | Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 56,063,100 | 51,809,900 | 92.41% |
| | 5 | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | 56,063,100 | 51,809,900 | 92.41% |
| 3 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan | | | 0 | 0 | 0.00% |



| | | (PAUD) K2023543 | | | | |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0% |
| | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini | | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023541 | | | 1,214,668,700 | 1,199,039,800 | 98.71% |
| | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 714,668,700 | 704,039,800 | 98.51% |
| | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 500,000,000 | 495,000,000 | 99.00% |
| | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |



| | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 1,214,668,700 | 1,199,039,800 | 98.71% |
| | JUMLAH PROGRAM | | | 9,012,159,000 | 8,915,542,838 | 98.93% |
| 2 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR | | | 58,507,372,631 | 57,202,866,025 | 97.77% |
| 5 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023533 | | | 37,324,104,694 | 36,477,232,217 | 97.73% |
| | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | <u>19,152,320,000</u> | <u>18,414,506,310</u> | 96.15% |
| | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | <u>18,171,784,694</u> | <u>18,062,725,907</u> | 99.40% |
| | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 37,324,104,694 | 36,477,232,217 | 97.73% |
| 6 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023534 | | | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17% |
| | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 2 | Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | <u>2,548,329,000</u> | <u>2,527,238,500</u> | 99.17% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17% |
| 7 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023535 | | | 15,696,488,937 | 15,497,520,308 | 98.73% |
| | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | <u>401,946,800</u> | <u>340,587,400</u> | 84.73% |
| | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | <u>49,630,000</u> | <u>31,990,000</u> | 64.46% |
| | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak | Kegiatan | <u>15,244,912,137</u> | <u>15,124,942,908</u> | 99.21% |



| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| | | | sedang dan rusak berat | | | | | |
| | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | | 15,696,488,937 | 15,497,520,308 | 98.73% |
| | 8 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023519 | | | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Guru | 0 | 0 | 0% | |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0% | |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% | |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | 0 | 0 | 0% | |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00% |



| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | 9 | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023536 | | | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91% |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91% |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91% |
| | JUMLAH PROGRAM | | | | 58,507,372,631 | 57,202,866,025 | 97.77% |
| 3 | PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN | | | | 3,689,109,000 | 3,288,319,300 | 89.14% |
| | 10 | Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K2023564 | | | 3,610,623,300 | 3,210,899,300 | 88.93% |
| | | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 3,477,200,000 | 3,090,200,000 | 88.87% |
| | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 133,423,300 | 120,699,300 | 90.46% |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | | 3,610,623,300 | 3,210,899,300 | 88.93% |
| | 11 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K2023563 | | | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64% |
| | | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | 0 | 0 | 0% |
| | | 2 | Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64% |



| | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64% |
| 12 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K2023562 | | | 0 | 0 | 0.00% |
| | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | JUMLAH INDIKATOR | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023561 | | | 0 | 0 | 0.00% |
| | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |



| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023560 | | | 0 | 0 | 0.00% |
| | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0% |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| JUMLAH PROGRAM | | | | 3,689,109,000 | 3,288,319,300 | 89.14% |
| KEGIATAN LAINNYA | | | | | | |
| 4 | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA | | | | | |
| TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA | | | | | | |

4. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut.



Data Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| No | Jumlah Pegawai | Kualifikasi Pendidikan | Pangkat/Gol | Penjabat Struktural | Penjabat Fungsional |
|----|----------------|--|--|--|---------------------|
| 1 | 47 Orang | S3 : -Orang S2 : 11 Orang S1 : 34 Orang D3 : 0 Orang D2 : Orang D1 : - Orang SMA : 2 Orang | GoI I : - Orang Gol II : 2 Orang Gol III : 33 Orang Gol IV : 12 Orang | Es.II : 1 Orang Esl.III : 5 Orang Esl.IV : 15 Orang Non Es : 26 Orang | 6 Orang |

5. HASIL CAPAIAN

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

| NO. | JENIS LAYANAN DASAR | CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) | | | CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|----------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH | JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | 5077 | 4631 | 91.22 | 4631 | 4631 | 100 | 95.66 | |
| 2 | Pendidikan Dasar | 24113 | 22594 | 93.7 | 22594 | 22594 | 100 | 96.85 | |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | 2501 | 1791 | 71.6 | 1791 | 1791 | 100 | 85.95 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang di hadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Pelayanan Anak Usia Dini berusia 5-6 tahun masih kurang dikarenakan masih kurangnya PAUD Negeri seperti di Kecamatan Wawo, Ranteangin, Tiwu, Ngapa, Watunohu, Pakue Tengah, Tolala, dan Porehu sehingga untuk menampung calon siswa di daerah tersebut belum maksimal dan perkembangan standar kualifikasi tenaga pendidik banyak yang belum S-1 dan bersertifikat.
2. Pelayanan Anak Sekolah Dasar berusia 7-12 tahun sudah baik tetapi masih adanya penduduk yang besekolah di Kabupaten/Kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK (Aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (Aplikasi Pendataan Kemenag) agar semua sekolah bisa masuk terdata aplikasi tersebut.
3. Pelayanan Anak Sekolah Menengah Pertama berusia 13-15 tahun masih kurang dikarenakan siswa yang berhenti karena bekerja, perkawinan dini, masih adanya penduduk yang bersekolah di Kabupaten/Kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK (Aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (Aplikasi Pendataan Kemenag) agar semua sekolah bisa masuk terdata aplikasi tersebut.
4. Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 Tahun masih sangat kurang maksimal dikarenakan Paket A, B Dan C kurang peminat dari penduduk usia 7-18 tahun untuk bersekolah, masih kurangnya Paket A,B dan C seperti di Kecamatan.
5. Kondisi Bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih terdapat Bagunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;



6. Pemerataan guru belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah–sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi .

Solusi :

1. Pelayanan Anak Usia Dini perlu pembangunan yang merata diperlukan untuk menampung calon siswa bersekolah (jemput bola), tenaga pendidik yang perlu bersekolah ke jenjang S1 dan disertifikasi agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang semuanya membutuhkan anggaran yang besar.
2. Pelayanan Sekolah Dasar diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang didukung Dinas Pendidikan agar bersekolah di Kabupaten Kolaka Utara seperti pembelajaran yang menarik, promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan.
3. Pelayanan Sekolah Menengah Pertama diperlukan pendekatan / interaksi / pembelajaran tentang dampak berhenti sekolah dan perkawinan dini serta pencerahan bahwa sekolah untuk menunjang masa depan, diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang didukung Dinas Pendidikan agar bersekolah di kabupaten Kolaka Utara seperti pembelajaran yang menarik, promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan.
4. Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 Tahun perlu ditingkatkan lagi dengan peningkatan minat calon siswa dengan pembelajaran yang menarik, promosi sekolah paket, sarana dan prasana yang memadai.
5. Optimalisasi Penggunaan Dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
6. Melalui Pemerataan di tingkat kecamatan adanya perpindahan dari SD yang Kurang Guru kesekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru.



4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

- 1) Standar kuantitas.
- 2) Standar kualitas.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a. Satu kali pada trimester pertama.
 - b. Satu kali pada trimester kedua.
 - c. Dua kali pada trimester ketiga.
- 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a. Pengukuran berat badan.
 - b. Pengukuran tekanan darah.



- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
 - h. Tes Laboratorium.
 - i. Tatalaksana/penanganan kasus.
 - j. Temu wicara (konseling).
- d. Capaian Kinerja
- 1) Definisi Operasional Capaian Kinerja
 Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - 2) Rumus Perhitungan Kinerja

| | |
|--|--|
| Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | $= \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$ |
|--|--|

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

- a. Pernyataan Standar
 Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Pengertian
 Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:
 - 1) Persalinan normal.
 - 2) Persalinan komplikasi.
- c. Mekanisme Pelayanan



- 1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
 - a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari: (1) Dokter dan bidan, atau
 - (2) 2 orang bidan, atau
 - (3) Bidan dan perawat.
- 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan} \\
 & \text{persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan} \\
 & \text{di wilayah kerja kab/kota} \\
 & = \frac{\text{dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin}} \times 100\% \\
 & \text{di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun} \\
 & \text{waktu satu tahun yang sama}
 \end{aligned}$$



3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar.

Pernyataan Standar Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

- 1) Standar kuantitas.
- 2) Standar kualitas. c. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.
 - 3) Standar kualitas:
 - a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

 - (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - (3) Injeksi vitamin K1.
 - (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 - (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
 - b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

 - (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.



- (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- (4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. d.

Capaian Kinerja

a. Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

$$= \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$



4. Pelayanan Kesehatan Balita

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

2) Pelayanan kesehatan balita sakit. c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.

(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali

/tahun.(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.

(4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.

(5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).

(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.

Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

(4) Pemberian Imunisasi Lanjutan.



- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali pertahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - d) Pemantauan perkembangan balita.
 - e) Pemberian kapsul vitamin A.
 - f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - g) Pemberian imunisasi lanjutan.
 - h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
 - i) Edukasi dan informasi.
- 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- d. Capaian Kinerja
- 1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah Balita usia} \\
 & \text{12-23 bulan yang mendapat Pelayanan} \\
 & \text{Kesehatan sesuai standar} \\
 & + \text{Jumlah Balita usia} \\
 & \text{24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan} \\
 & \text{sesuai standar} + \\
 = & \text{Balita usia 36-59 bulan} \\
 & \text{mendapatkan pelayanan} \\
 & \text{sesuai standar} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah Balita usia} \\
 & \text{12-59 bulan di wilayah kerja kab/kota tersebut} \\
 & \text{pada kurun waktu satu tahun yang sama}
 \end{aligned}$$



5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi:

- 1) Skrining kesehatan.
- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Skrining kesehatan
Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - a) Penilaian status gizi.
 - b) Penilaian tanda vital.
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d) Penilaian ketajaman indera.
- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
 - b) Melakukan rujukan jika diperlukan



- c) Memberikan penyuluhan kesehatan
- d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

$$= \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$



5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar a. Pernyataan Standar Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b) Pengukuran tekanan darah.
 - c) Pemeriksaan gula darah.
 - d) Anamnesa perilaku berisiko.
- 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan. Keterangan :
Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.



d. Capaian Kinerja

1) Definisi operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan

$$\text{Persentase orang usia 15–59 tahun} \\ \text{mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang} \\ \text{mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu} \\ \text{satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



- 2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
 - 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko
 - 4) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan
- d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

| | |
|--|---|
| <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> | $\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$ |
|--|---|



7. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar a. Pernyataan Standar Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standard meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah
- 2) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - c) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun



2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah;
- 2) Edukasi
- 3) Terapi farmakologi. c. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi c) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.



d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- 2) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:



- a) Pemeriksaan status mental
- b) Wawancara
- 3) Edukasi kepatuhan minum obat.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyedi wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan



- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Pemeriksaan klinis
Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
 - 3) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
 - 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- d. Capaian Kinerja
- 1) Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - 2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



b. Pengertian

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko
- 2) Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).



- 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risikoterinfeksi HIV kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Daerah dan Pusat

| NO | JENIS PELAYANAN | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | |
|----|---|--|--------|
| | | INDIKATOR | TARGET |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | 100% |
| 2 | <i>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i> | <i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan</i> | 100% |



| | | | |
|----|---|--|------|
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100% |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB) | Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 100% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100% |



3. ANGGARAN

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 terdiri dari beberapa sumber, diantaranya yaitu:

1. APBD Kabupaten

Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri sebesar 1,062,962,031,086

2. APBN

Alokasi anggaran bersumber dari APBN yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara adalah sebesar 126,836,100,884

3. ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER DINAS KESEHATAN

Alokasi anggaran penerapan SPM pada satker Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara adalah sebesar 7,345,855,000

4. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara didukung oleh sebanyak 1.424 personil pegawai yang terdiri dari:

- a) 813 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana 154 ASN di Dinas Kesehatan, 479 ASN di puskesmas dan 180 ASN di RSUD.
- b) 603 orang Non ASN, dimana 124 orang Non ASN di Dinas Kesehatan 280 orang Non ASN di puskesmas dan 207 Non ASN di RSUD.

5. HASIL CAPAIAN

Hasil capaian adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun dengan rencana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut adalah capaian SPM tahun 2023.



| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | | | PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|-----|--|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 2.539 | 2.048 | 81 | 2.969 | 2.474 | 83 | 164 | Baik |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 2.424 | 2.138 | 88 | 2.854 | 2.564 | 90 | 178 | Baik |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 2.336 | 2.035 | 87 | 2.766 | 2.461 | 89 | 176 | Baik |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 8.370 | 7.829 | 94 | 8.965 | 8.415 | 94 | 187 | Baik |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 6.400 | 6.279 | 98 | 7.201 | 7.067 | 98 | 196 | Sangat Baik |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 92.062 | 71.757 | 78 | 92.579 | 72.267 | 78 | 156 | Baik |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 6.944 | 6.920 | 99 | 7.461 | 7.430 | 100 | 199 | Sangat Baik |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 20.258 | 13.494 | 67 | 20.725 | 13.988 | 67 | 134 | Cukup |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 681 | 867 | 127 | 1.182 | 1.361 | 115 | 242 | Sangat Baik |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 179 | 179 | 100 | 197 | 197 | 100 | 200 | Sangat Baik |



| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis | 965 | 965 | 100 | 1.323 | 1.319 | 100 | 200 | Sangat Baik |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 2.924 | 2.427 | 83 | 3.499 | 2.904 | 83 | 166 | Baik |

Sumber : Bidang Kesmas dan P2P, Dinkes 2023



1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2023 adalah sebesar 81%, capaian ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama antar petugas kesehatan dan kader dalam kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2023 adalah sebesar 88%. Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah ibu yang melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan namun tidak dilakukan di fasilitas kesehatan tidak termasuk kedalam persalinan sesuai standar. Sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian pelayanan kesehatan di tahun 2023 sebesar 87% mengalami peningkatan pencapaian, hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta jejaringnya. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Kolaka Utara setiap tahunnya sudah cukup baik dan untuk Tahun berikutnya diharapkan cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir akan terus meningkat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi neonatal dan kematian neonatal.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian pelayanan kesehatan balita tahun 2023 sebesar 94% hal ini tidak terlepas karena inovasi- inovasi dalam pelaksanaan dan pencapaian SPM Kesehatan sehingga capaian pelayanan kesehatan balita tahun 2023 mengalami peningkatan. Walaupun secara keseluruhan capaian pelayanan kesehatan balita sudah cukup baik, namun pelayanan kesehatan balita masih tetap harus diperhatikan yakni dengan adanya kegiatan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang balita. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang balita, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan, tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat intervensi yang tepat, terutama ketika harus melibatkan ibu atau keluarga. Bila



penyimpangan terlambat diketahui, maka intervensinya akan sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang balita.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2023 sebesar 98%. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sudah cukup baik untuknya itu perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai 100%.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih belum mencapai target 100%. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2023 adalah sebesar 78%. Masih rendahnya persentase pelayanan usia produktif di Kecamatan dan Puskesmas di pengaruhi oleh sarana dan prasarana yang belum mencukupi (Posbindu Kit yang kurang dan tidak lengkap), dan masih ada petugas/programmer di puskesmas yang belum terlatih.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2023 tercapai 99%. Dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara cakupan pelayanan yang dilakukan bagi warga usila, sudah memberikan pelayanan yang optimal itu didukung oleh berfungsinya posyandu lansia maka pelayanan kesehatan akan lebih mudah dijangkau oleh para lansia. Dan juga koordinasi dan peran serta masyarakat serta lintas sektor terkait dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan terhadap para lansia

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Dari estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023 sebesar 20.258 jiwa, ditemukan 13.494 jiwa penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar atau sebesar 67%. Hipertensi masih dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin. Sistem pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang belum terkoordinir dengan baik mengakibatkan data yang dihimpun masih minim.



9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Jumlah penyandang DM di Kolaka Utara berdasarkan perhitungan angka prevalensi DM Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar 681 jiwa, ditemukan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 867 jiwa (127%). Gejala penyakit diabetes mellitus yang mudah diketahui membuat penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik) di Kabupaten Kolaka Utara dihitung menggunakan proyeksi dan hasil perhitungan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018, sehingga didapatkan sasaran ODGJ berat tahun 2023 sebesar sebesar 179 jiwa. Sedangkan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten tahun 2023 sebesar 179 jiwa (100%). Yang termasuk kedalam ODGJ berat adalah penderita Schizofrenia dan Psikotik akut.

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis

Jumlah orang terduga TBC yang ada di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023 sebesar 965 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar sebesar 965 orang. Sehingga persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar yaitu sebesar 100%. Untuknya itu masih diperlukan kerja keras dari petugas kesehatan terutama petugas TB agar melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya penularan dan melakukan investigasi kontak yaitu melakukan pendataan dan pemeriksaan kepada seluruh kontak penderita serta menyarankan agar segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala batuk berdahak dalam jangka waktu yang lama.



12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Orang berisiko terinfeksi HIV yang terhimpun di Kolaka Utara terdiri dari wanita pekerja seksual (WPS), pria pekerja seksual (PPS), pelanggan, waria, pengguna jarum suntik, pasien TB, ibu hamil dan pasangan berisiko. Dari 2.924 orang yang berisiko terinfeksi HIV di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023, terdapat 2427 orang yang sudah mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau sebesar 83%.

6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2023 sebesar 81%, yang berarti belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan karena:

- a. Masih kurangnya kerjasama Lintas sektor misal, Koordinasi kader, Ketua Pkk dan lain-lain dengan tenaga kesehatan ;
- b. Kelompok Dasawisma tidak berjalan baik dalam pendataan ibu hamil sehingga masih ada ibu hamil yang tdk terdata
- c. adanya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan diluar wilayah kerja puskesmas, ibu hamil yang keluar daerah atau pulang kampung halaman dan memeriksa kehamilan di Fasilitas Kesehatan yang ada didaerah tersebut karena mengingat sebagian penduduk Kabupaten Kolaka Utara adalah pendatang dari berbagai daerah.

Solusi

- a. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Aplikasi e-kohort)
- b. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu hamil
- c. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA
- d. Meningkatkan peran aktif dan kerjasama antar lintas sektor dan kader

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan



Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2023 sebesar 88%, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Adanya Ibu hamil yang melahirkan dirumah karna alasan tertentu;
- b. Kurangnya Pengetahuan dan informasi tentang manfaat melahirkan difasyankes;
- c. Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai aturan (Perda) Ibu Melahirkan difasyankes ;
- d. Masih ada Ibu hamil yang tdk memiliki Kartu Jaminan Kesehatan

Solusi

- a. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Aplikasi e-kohort)
 - b. Mengoptimalkan pelayanan melalui *Telemedicine*
 - c. Koordinasi dengan faskes disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu bersalin
 - d. Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group
 - e. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri/faskes lainnya dalam pelayanan KIA
 - f. Kader melakukan pendataan ibu bersalin di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya
- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografi.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Permasalahan

Cakupa

n pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2023 tercapai 87%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Tidak ada intervensi lanjutan terkait regulasi dari pihak atau instansi terkait tentang penegakan Perda,
- b. Masih butuh penguatan dalam bentuk peraturan Bupati dan desa,
- c. masih kurang lengkapnya alat kesehatan untuk penanganan bayi asfiksia dan BBLR.



Solusi

- a. Meningkatkan pelayanan melalui *telemedicine* ataupun melalui WA group
- b. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA
- c. Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
- d. Membuat peraturan daerah maupun didesa terkait pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- e. Pemenuhan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2023 sebesar 94%, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

- a. Tidak ada intervensi lanjutan terkait regulasi dari pihak atau instansi terkait tentang penegakan Peraturan daerah
- b. masih butuh penguatan dalam bentuk peraturan Bupati dan desa,
- c. Sarana dan Prasarana tidak memadai dalam pemeriksaan balita sakit.
- d. seperti masih kurangnya tingkat kesadaran/pemahaman masyarakat dan keluarga akan pentingnya memeriksakan anak balita ke posyandu dan banyak juga masyarakat beranggapan bahwa pelayanan kesehatan atau kunjungan hanya untuk bayi saja setelah pemberian imunisasi campak 9 bulan dan lengkap maka jadwal untuk keposyandu sudah selesai dan sudah tidak perlu lagi ke posyandu.
- e. Selain itu juga di karenakan adanya penduduk yang berpindah tempat karena beberapa masyarakat adalah pendatang sehingga banyak yang biasanya pulang kampung atau ke daerah asal masing-masing.

Solusi

- a. Perekrutan tenaga PUSPA, untuk mempertahankan pelayanan esensial di dalam gedung
- b. Kader melakukan sweeping langsung kerumah warga dan melalui kelompok penimbangan (tingkat RT)
- c. Pelatihan dan pembinaan penanggung jawab program balita (MTBS/SDIDTK)

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan pendidikan dasar tahun 2023 sebesar 98%, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

- a. Tidak ada intervensi lanjutan terkait regulasi dari pihak atau instansi terkait tentang penegakan Perda,
- b. masih butuh penguatan dalam bentuk peraturan Bupati dan desa,
- c. UKS Kit untuk pelayanan Usia Pendidikan dasar sudah ada beberapa yang rusak sehingga pengelola program harus meminjam dari program lain.

Solusi

- a. Pemenuhan SPM dilakukan dengan mengisi data pada Google Form sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Kemenkes (Gform diisi oleh orangtua/wali melalui guru UKS di Sekolah ke petugas Puskesmas)
- b. Pemenuhan media promkes termasuk media infografis
- c. Pemenuhan Penguatan dalam bentuk peraturan bupati dan desa
- d. Pemenuhan alat kesehatan UKS Kit

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif tahun 2023 sebesar 78%, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

Masih kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke posbindu karna sarana dan prasarana belum lengkap

Solusi

- a. Kolaborasi program dengan melakukan skrining bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi
- b. Penambahan BHP dari berbagai sumber dana, misal Dana Alokasi Khusus, dan lain-lain

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2023 sebesar 99%, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

- a. Masih butuh penguatan dalam bentuk peraturan Bupati dan desa,



- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di puskesmas, seperti ruangan khusus poli lansia dan pengambilan obat khusus lansia.

Solusi

- a. Pelatihan dan pembinaan petugas penanggungjawab program kesehatan lansia
- b. Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
- c. Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan Penderita hipertensi tahun 2023 sebesar 67%, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

- a. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke posbindu karna sarana dan prasarana belum lengkap
- b. Adanya masyarakat yang menganggap penyakit tersebut tidak perlu diperiksa cukup dengan meminum obat (hipertensi)

Solusi

- a. Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
- b. Peningkatan pelayanan menggunakan Telemedicine

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) tahun 2023 sebesar 127%, dan realisasi tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

Solusi

- a. Peningkatan pelayanan menggunakan *Telemedicine*
- b. Pemenuhan media promkes termasuk media infografis.
- c. Gejala penyakit diabetes mellitus yang mudah diketahui membuat penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga capaian ini dapat melebihi target yang ditetapkan



10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan Penderita hipertensi tahun 2023 sebesar 100%, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

- a. Belum memenuhinya Tenaga terlatih
- b. Belum ada rawat inap Khusus Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa

Solusi

- a. Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit
- b. Pemenuhan media promkes termasuk media infografis
- c. Melakukan Pelatihan untuk Tenaga/Petugas TB baik di Puskesmas maupun rumah sakit

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) tahun 2023 sebesar 100%, dan realisasi tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:

Belum Ada ruangan Perawatan TB RO di Kabupaten Kolaka Utara dan Belum adanya sosialisasi terkait regulasi

Solusi

- a. Sosialisasi terkait Perawatan TB RO di Kabupaten Kolaka Utara
- b. Belum adanya sosialisasi terkait regulasi
- c. Pelatihan/Peningkatan Kapasitas SDM untuk semua fasyankes
- d. Melakukan pendampingan kepada petugas di faskes
- e. Melibatkan lintas sektor/pemberdayaan masyarakat

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan Penderita hipertensi tahun 2023 sebesar 83 %, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%:



- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penyakit HIV Aids dan IMS, programer HIV puskesmas sering diganti,
- b. perubahan jumlah populasi kunci terutama WTS dalam setahun yg tidak bisa di prediksi

Solusi

- a. Membuat format manual sebagai form validasi terhadap data yang di input pada aplikasi SIHA
- b. Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
- c. Kolaborasi lintas program dengan membentuk tim khusus TB-HIV dan kelompok berisiko lainnya seperti ibu hamil dan waria.



4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah. Pelayanan Dasar diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 7. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah

JENIS PELAYANAN DASAR

| SPM PEKERJAAN UMUM (KAB/KOTA) (Pasal 7, PP No 2 Tahun 2018) | | | |
|--|---|---|--|
| No | Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Pelayanan Dasar | Penerima Pelayanan Dasar |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Ditetapkan dalam standar teknis sekurang-kurangnya memuat : | Setiap Warga Negara (Prioritas Warga Negara Miskin/Tidak Mampu) |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa; 2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | 1. Untuk air minum, diprioritaskan bagi warga Negara yang berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem Penyediaan air minum. 2. Untuk air limbah, di prioritaskan bagi warga Negara pada daerah yang berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. |



2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar | Satuan | Indikator Pencapaian / Output | | | Pencapaian |
|----------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| | | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | | | | | 100% |
| | Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%) | | | | | 80% |
| A | Jumlah yang harus dilayani | Orang | 745 | 750 | -5 | 100% |
| | Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%) | | | | | |
| B | Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | | | | | |
| 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | Sambungan Rumah/SR | 149 | 150 | -1 | 100% |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) | Sambungan Rumah/SR | 149 | 150 | -1 | 100% |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|--------------|------|------|---|------|
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | | | | | |
| A | Jumlah Yang Harus Dilayani | Orang | 2910 | 2910 | 0 | 100% |
| | Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | | |
| B | Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm | | | | | |
| 1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | Rumah Tangga | 738 | 738 | 0 | 100% |
| 2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) | Rumah Tangga | 602 | 602 | 0 | 100% |
| 3 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | Rumah Tangga | 136 | 136 | 0 | 100% |



**REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA:KOLAKA UTARA s.d Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Total Rumah Di Kabupaten | Realisasi | | |
|----|--|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | Sudah Terlayani | Belum Terlayani | Persentase Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 33.091 | 30.934 | 2.157 | 93,48% |

**REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA:KOLAKA UTARA s.d Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Total Rumah Di Kabupaten | Realisasi | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | Sudah Terlayani | Belum Terlayani | Persentase Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok SPALD | 33.091 | 30.710 | 2.381 | 93% |



3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Alokasi Sumber Pendanaan SPM 2023

| NO | PENDANAAN | PAGU (RP) |
|----|---|-------------------|
| 1 | APBD KAB KOLAKA UTARA | 1,062,962,031,086 |
| 2 | ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS PEKERJAAN UMUM) | 103,636,779,171 |
| 3 | ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH | 8,096,492,099 |
| | APBD | |
| A | APBD DAU | 1,969,918,099 |
| B | APBD DAK FISIK | 5,926,574,000 |
| C | DANA BAGI HASIL | 200,000,000 |

4. Dukungan Personil

Dukungan personal menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil dalam mencapai target SPM terdiri dari :



Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

| No | Jabatan | Pangkat/Gol |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Kepala Dinas | Pembina Utama Muda / IV.c |
| 2 | Sekretaris | Pembina Tingkat I / IV.b |
| 3 | Kepala Bidang Cipta Karya | Penata Tingkat I / III.d |
| 4 | Kepala Bidang Bina Marga | Penata Tingkat I / III.d |
| 5 | Kepala Bidang Jasa Konstruksi | Pembina / IV.a |
| 4 | Analisis Kebijakan (Air minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman) | Penata Tingkat I / III.d |
| 5 | Kasubag Keuangan & Penyusunan Program | Penata Tingkat I / III.b |
| 6 | Staf (1 Orang) | Penata Muda TK I / III.b |
| 7 | Staf (1 Orang) | Penata Muda TK I / III.b |
| 8 | Staf (1 Orang) | Penata Muda TK I / III.b |
| 9 | Staf (1 Orang) | Penata Muda / III.a |

5. Hasil Capaian

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi SPM yang sejalan dengan target RPJMD dan Renstra adalah sebagai berikut :

Hasil Capaian SPM Dinas PUPR 2023

| No | Indikator | Target | Realisasi | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian % |
|----|---|------------------|------------------|------------|---------------|-----------|
| 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota | 149 Rumah Tangga | 150 Rumah Tangga | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------|------|------|
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota | 738 Rumah Tangga | 738 Rumah Tangga | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | |

Capaian indikator kinerja persentase warga negara yang mendapat akses air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi tahun 2023 adalah 100% yang diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Capaian SPM} &= \frac{\% \text{ Realisasi } \sum \text{ Rumah Tangga Terlayani}}{\% \text{ Target } \sum \text{ Rumah Tangga}} \times 100\% \\ &= \frac{149}{150} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja “ Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah berupa (SPALD-T) dengan akses aman tahun 2023 adalah sebesar 100% yang di peroleh dari

$$\begin{aligned} \text{Capaian SPM} &= \frac{\% \text{ Capaian Realisasi rumah yang memiliki SPALD}}{\% \text{ Target Rumah di Kabupaten Kolaka Utara}} \times 100\% \\ &= \frac{738 \text{ RT}}{738 \text{ RT}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum

Kendala :

- Pemenuhan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sulit untuk terlaksana dikarenakan belum ada target wilayah yang akan di usulkan di tahun 2024.

Permasalahan :



- Terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk melaksanakan penerapan SPM (Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemenuhan).
- Pembangunan SPALD-T di Kab Kolaka Utara tidak efektif , sehingga pemerintah tidak lagi memprioritaskan pembangunan SPALD-T
- Akses Keterjangkauan, ada beberapa desa yang berada di daerah gunung sulit untuk mendapatkan layanan.

Solusi :

- Lebih mengupayakan agar bisa mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD Kabupaten (DAU) yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Prov, CSR, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ,serta penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah air minum.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan SPM dengan sosialisasi dari narasumber yang kompeten misalnya dari Dinas Kesehatan dan juga dari pemuka agama/tokoh masyarakat.
- Meningkatkan pemahaman aparatur terkait kebijakan SPM Bidang PUPR misalnya melalui Sosialisasi, Bimtek, dan Pelatihan.
- Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait petunjuk teknis pelaksanaan penerapan SPM.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

1.JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana termuat dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Capain Target SPM Perumahan Kabupaten Kolaka Utara, dapat di lihat melalui tabel sebagai berikut :

Target Capaian Pelaksanaan SPM Perumahan

| PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| KABUPATEN/KOTA : | | | | KOLAKA UTARA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | JENIS BENCANA | TAHUN TERJADINYA BENCANA | KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | TINGKAT KERUSAKAN RUMAH | | | | TARGET | | | | REALISASI | | | | |
| | | | | | TOTAL | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | REHABILITASI | PEMBANGUNAN KEMBALI | RELOKASI | SUBSIDI UANG SEWA | REHABILITASI | PEMBANGUNAN KEMBALI | RELOKASI | SUBSIDI UANG SEWA | BELUM TERLAYANI |
| | | | | | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Longsor | 2023 | Lasusua | Desa Batu Ganda Permai | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | 7 | | |
| | Banjir | 2022 | Lasusua | Desa Rantelimbong | 3 | | 1 | 2 | | 3 | | | | 3 | | | |
| | Banjir | 2022 | Lambai | Latawaro | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | Banjir | 2022 | Lasusua | Batu Ganda Permai | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| Total *) | | | | | 12 | | 2 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | | |
| Persentase layanan **) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 4 | | | |
| Capaian SPM Total ***) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. ANGGARAN

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2023 dapat di lihat melalui tabel berikut :

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk pelaksanaan SPM

| No | Pendanaan | Pagu | Keterangan |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | APBD Kab Kolaka Utara | 1.062.962.031.086 | |
| 2 | APBD Dinas Perumahan | 8.107.839.843 | 0,76% |
| 3 | Alokasi Anggaran SPM | 443.665.000 | 5,47% |
| 4 | Belanja Operasi | 6.513.241.794 | 80,33% |
| 5 | Belanja Modal | 1.594.598.049 | 19,67% |



Berdasarkan alokasi anggaran di atas, proporsional kebutuhan pelaksanaan tupoksi Dinas masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, indikasinya belum memenuhi kebutuhan rencana strategis SKPD 2023-2026, dimana sektor perumahan khususnya pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana mendapatkan porsi anggaran sangat sedikit. Alokasi anggaran terbesar yaitu pada belanja Operasi yakni sebesar 80.33%, kemudian Belanja Operasi selain SPM 19.67% sedangkan belanja SPM sendiri hanya sebesar 5.47%.

4. Dukungan Personil

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu adanya dukungan sumberdaya, baik sumberdaya aparatur, dana dan sarana/ prasarana.

Sampai dengan Desember 2023 sumber daya aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 55 orang terdiri dari 27 orang PNS, 2 Orang P3K dan 26 orang Non PNS, dengan rincian menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

Komposisi personil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut jenjang pendidikan PNS dan Non PNS Tahun 2023

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| A | PNS, terdiri atas: | Jumlah (orang) |
| | S2 (pasca sarjana) | 3 |
| | S1 (sarjana) | 24 |
| B | P3K, terdiri atas: | Jumlah (orang) |
| | S2 (pasca sarjana) | - |
| | S1 (sarjana) | 2 |
| C | Non PNS | |
| | S1 (sarjana) | 15 |



| | | |
|---------------|----------------------|-----------|
| | D III (Sarjana Muda) | 1 |
| | SLTA/Sederajat | 10 |
| Jumlah | | 55 |

Sumber: Sekretariat Dinas Perumahan Thn 2023

Komposisi personil DINas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut pangkat dan golongan PNS Tahun 2022

| No | Pangkat dan Golongan | Jumlah (orang) |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| | Pembina Tingkat 1 (IV/b) | 1 |
| | Pembina (IV/a) | 2 |
| | Penata Tingkat 1 (III/d) | 7 |
| | Penata (III/c) | 5 |
| | Penata Muda Tingkat 1 (III/b) | 6 |
| | Penata Muda (III/a) | 5 |
| | Pengatur Tingkat 1 (II/d) | - |
| Jumlah | | 27 |

Sumber: Sekretariat Dinas Perumahan Thn 2023

Komposisi personil DINas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut pejabat struktural dan fungsional PNS Tahun 2022

| A | PNS, terdiri atas: | Jumlah (orang) |
|---|------------------------------------|----------------|
| | Struktural (eselon II, III dan IV) | 8 |
| | Fungsional Tertentu | 8 |
| | Fungsional Umum | 11 |

Sumber: Sekretariat Dinas Perumahan Thn 2023



5. HASIL CAPAIAN

Rincian Pelaksanaan Capaian SPM pada Dinas Perumahan Kabupaten Kolaka Utara, dapat di lihat melalui tabel sebagai berikut :

| TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | REALISASI | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| | SUDAH TERLAYANI | BELUM TERLAYANI | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 12 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Dalam upaya pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar bidang Perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara pada Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa permasalahan/kendala mendasar, antara lain:

- 1) Masih kurangnya partisipasi pemerintah desa dalam hal percepatan progres pekerjaan.
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang dapat bantuan rehab rumah korban bencana untuk mempercepat progres pekerjaan.
- 3) Keterlambatan material
- 4) Masih kurangnya mutu SDM pengelola SPM bidang Perumahan

2. Solusi

Adapun solusi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan dalam rangka percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :



- 1) Mengikutsertakan aparatur yang mengurus SPM Perumahan pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan sejenisnya yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.
- 2) Memaksimalkan anggaran SPM dalam Renstra dan Renja terutama Indikator Kinerja Kunci (IKU) SKPD khususnya bidang perumahan rakyat khususnya perbaikan target.
- 3) Penguatan dukungan kebijakan penerapan pelayanan dasar guna mewujudkan keberhasilan visi dan misi daerah Kabupaten Kolaka Utara th 2023-2026.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. SUB URUSAN TRANTIB(SATPOL-PP)

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan



hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

SPM Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yaitu mencakup Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target pencapaian 100% meliputi:

a. Pelayanan kerugian materil.

Kerugian materil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :

- 1) Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
- 2) Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

b. Pelayanan pengobatan.

Berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang/berat.



FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

| NO. | JENIS LAYANAN DASAR | JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU | | | PELAYANAN GANTI RUGI | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
|-----|--|--|--|-------------|--|--|-------------|-------------|----------|
| | | JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA | JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR | CAPAIAN (%) | JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN | JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ketentraman dan Ketertiban Umum | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Salah Satu gambar pemenuhan indicator SPM jenis pelayanan dasar Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 yaitu :

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada

Pada tahun 2023 ini, berdasarkan sumber data dari laporan bidang perda, telah terjadi pelanggaran Perda dan /atau peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan sebanyak 16 Kasus dan jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/atau di pantau 16 kasus.

Untuk cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota, di Kabupaten Kolaka Utara, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang juknis Penyusunan dan Penetapan SPM, adalah sebagai berikut :

Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA di kali 100% dibagi Jumlah Pelanggaran PERDA

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA} \times 100\%}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA}}$$

$$\frac{16}{50} \times 100\% = 32\%$$

3. Alokasi Anggaran

1.

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentunya tidak terlepas dari dukungan dana, berdasarkan data pada APBD tahun anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara guna mendukung program/kegiatan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah didukung dana dari APBD sebesar Rp. 3.065.121.400



4. Dukungan Personil

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah 37 orang yang terdiri dari Laki-laki 33 orang dan perempuan 4 orang.
- b. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara di dukung oleh 225 orang merupakan Tenaga Bantuan Honorer Polisi Pamong Praja.

Dukungan Personil SPM Trantibum

| STATUS | GOLONGAN (ORANG) | | | | | TOTAL (ORANG) |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|
| | IV | III | II | I | LAINNY A | |
| PNS | 3 | 19 | 14 | - | - | 37 |
| PHTT | - | - | - | - | 228 | 228 |
| Total | 3 | 19 | 14 | - | 228 | 265 |

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis pelayanan dasar Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawahini:



Hasil Capaian
Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | |
|----|---|--|--------|---------------------|--|--------|---------------------|-----|
| | | Penerimaan Pelayanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | Ket |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| 1 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota | 100% | Setiap Tahun | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota | 100% | Setiap Tahun | |
| | | Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 0 | Setiap Tahun | Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil | 0 | Setiap Tahun | |
| | | Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 0 | Setiap Tahun | Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan | 0 | Setiap Tahun | |
| | | | | | | | | |



6. Permasalahan Dan Solusi

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 mencapai 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai; dan
- b. Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.
- c. Kurangnya koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan perda dengan dinas/instansi terkait;
- d. Kurangnya koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan perda dengan dinas/instansi terkait;

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang berkompeten; dan
- b. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait mengenai tugas masing-masing OPD dalam proses penegakan Perda dan Perkada serta pemeliharaan trantibum di Kabupaten Kolaka Utara
- c. .Perlunya diberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman
- d. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan Prima kepada frontliners/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan

B. SUB URUSAN BENCANA

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari :



1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. TARGET PENCAPAIAN

TABEL TARGET PENCAPAIAN

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | Keterangan |
|----|---|---|--------|---------------------|--|--------|---------------------|------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | | |
| | | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator | Target | Batas Waktu Capaian | |
| 1 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 2023 | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | 100% | 2023 | |
| | | | | | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara di kawasan rawan bencana | 100% | 2023 | |
| | | | | | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana | 100% | 2023 | |
| | | | | | Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana | 100% | 2023 | |
| | | | | | Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana | 100% | 2023 | |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 2023 | Sarana-prasarana penanggulangan bencana | 100% | 2023 | |
| | | | | | Peningkatan kapasitas personil/Sumber-Daya Manusia (SDM) | 100% | 2023 | |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 2023 | Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | 0% | 2023 | |
| | | | | | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 100% | 2023 | |
| | | | | | Melakukan respon cepat darurat bencana | 100% | 2023 | |
| | | | | | Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit / wabah zoonosis prioritas | 0% | 2023 | |
| | | | | | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 100% | 2023 | |



3. ANGGARAN

Tabel Alokasi Anggaran pemenuhan SPM sub. Urusan Bencana Tahun 2023

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | ANGGARAN | | |
|----|---|----------|-------------|----------------------|
| | | APBN | APBD | SUMBER LAIN YANG SAH |
| 1 | Pelayanan informasi rawan bencana | | 158.744.000 | |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | 35.000.000 | |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | 387.484.000 | |

4. DUKUNGAN PERSONIL

Tabel Dukungan Porsenil Pemenuhan SPM Sub. Urusan Bencana Tahun 2023

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG) |
|----|---------------------|----------------|
| 1 | Strata 3 | - |
| 2 | Strata 2 | 1 |
| 3 | Strata 1/Diploma IV | 34 |
| 4 | Diploma III | - |
| 5 | Diploma II | - |
| 6 | Diploma I | - |
| 7 | SMA/SMK/MA | 15 |
| 8 | SMP/MTs | - |
| 9 | SD/MI | - |

5. HASIL CAPAIAN

HASIL CAPAIAN

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | TUNTAS UTAMA | | | 98,33% |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | | | | 100% |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80% |
| | A. Jumlah yang harus dilayani | 2.300 | 2.300 | 0 | 100% |



| Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 20% |
|--|---|---|---|-------------|
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | 100% |
| Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara dikawasan rawan bencana | 2.300 | 2.300 | 0 | 100% |
| Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana | 1.500 | 1.500 | 0 | 100% |
| Penyedia pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencan | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100% |
| Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80% |
| A. Jumlah yang harus dilayani | 2.300 | 2.300 | 0 | 100% |
| Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 20% |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | 100% |
| Sarana prasarana penanggulangan bencana | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) | 150 | 150 | 0 | 100% |
| 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 95% |
| Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80% |
| A. Jumlah yang harus dilayani | 58 | 58 | 0 | 100% |
| Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | | | | 20% |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia | Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia | 100% |
| Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 60 | 60 | 0 | 100% |
| Melakukan respon cepat darurat bencana | 49 | 49 | 0 | 100% |
| Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit / wabah zoonosis prioritas | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 22 | 22 | 0 | 100% |

6. KENDALA YANG DIHADAPI

1. Pengumpulan Data

a. Permasalahan

Pengumpulan data masih secara manual dan kurangnya personil

b. Solusi



Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada serta berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara dalam kegiatan pengumpulan data guna percepatan pencapaian SPM Sub. urusan Bencana

2. Perhitungan Kebutuhan

a. Permasalahan

Kurangnya Anggaran percepatan pencapaian SPM Sub. Urusan Bencana

b. Solusi

Menyesuaikan perhitungan kebutuhan percepatan pencapaian SPM sub. Urusan Bencana

3. Perencanaan dan penganggaran

a. Permasalahan

Perencanaan kegiatan telah dibuat BPBD namun ada beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan karena terkendala dengan keterbatasan pagu yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

b. Solusi

Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam merencanakan dan menganggarkan guna percepatan dan penerapan SPM urusan sub. Bencana.

4. Pelaksanaan

a. Permasalahan

Menyesuaikan dana tersedia pada DPA Tahun 2023

b. Solusi

Menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

C. SUB URUSAN DAMKAR

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran yaitu yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban



kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat:

- a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

2. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara telah memasukkan target SPM dengan Program Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

| NO. | KABUPATEN/ KOTA | TOTAL PERSENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN (LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN) | JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN | KORBAN JIWA | | | | JUMLAH TAKSIRAN ASET | |
|----------|------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | | JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN | JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA | JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR | JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA | JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DISELAMATKAN | JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> |
| 1 | Kabupaten Kolaka Utara | 83% | 61 | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan pemeliharaan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. **5.205.245.181,-** dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk pelaksanaan SPM

| No | Pendanaan | Pagu | Keterangan |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | APBD Kab Kolaka Utara | 1,062,962,031,086 | |
| 2 | APBD Dinas Kebakaran | 5,205,245,181 | 0.49% |
| 3 | Alokasi Anggaran SPM | 1,847,152,400 | 35.49% |
| 4 | Belanja Operasi | 5,123,145,181 | 98.42% |
| 5 | Belanja Modal | 82,100,000 | 1.58% |

4. DUKUNGAN PERSONIL

Pelaksanaan SPM sub urusan kebakaran Dinas Kebakaran pada tahun 2023 di dukung oleh personil sebanyak 111 orang.

1. Jumlah Pegawai Dinas Kebakaran Januari s.d Desember 2023 adalah 111 Orang dengan status sebagai berikut.
 - a. Pegawai Negeri Sipil : 18 Orang
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil : 93 orang
2. Rincian Pegawai Dinas Kebakaran
 - a. Kepangkatan/Golongan

RINCIAN PEGAWAI

| No | Uraian | Menurut Golongan | | | | | Ket |
|---------------|------------|------------------|-----|----|---|------|-----|
| | | IV | III | II | I | PHTT | |
| 1 | Struktural | 7 | 4 | 1 | - | - | √ |
| 2 | Fungsional | - | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Staf | - | 4 | - | - | 93 | √ |
| Jumlah | | 7 | 10 | 1 | - | 93 | √ |



5. HASIL CAPAIAN

Rincian Pelaksanaan Capaian SPM tahun 2023 pada Dinas Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara, dapat di lihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31.

REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)

| NO. | KABUPATEN/KOTA | CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%) | CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%) | TOTAL CAPAIAN SPM (%) |
|----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Kabupaten Kolaka Utara | 83.333% | 0 | 83.333% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- Kurangnya Sarana Prasarana Pemadam kebakaran.
- Kurangnya SDM Pemadam kebakaran yang terlatih.
- Kurangnya Peronil Pemadam Kebakaran.

Solusi

1. Pengusulan beberapa kegiatan, seperti kegiatan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur & Manual pencegahan kebakaran dan pengadaan Sarana prasarana pencegahan damkar.
2. Usulan penambahan kegiatan yaitu kegiatan yang mendukung pencapaian indikator cakupan penanggulangan kebakaran antara lain Diklat aparaturn pemadam kebakaran, penyuluhan/pemberdayaan masyarakat.
3. Usulan penambahan pembangunan Pos Damkar guna meningkatkan cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran diwilayah Kabupaten Kolaka Utara dan memperpendek respon time



4. Rencana usulan program Penyusunan Ren-Ops dan simulasi respon time di beberapa wilayah, termasuk latihan gabungan sebagai bagian dari Koordinasi dan komunikasi dengan Pemadam Kebakaran lainnya.
5. Perlunya usulan kajian SKIK System Komunikasi Informasi Kebakaran berbasis masyarakat.
6. Pengusulan anggaran setiap tahun untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran serta sarana prasarana pendukung guna mencapai target indikator SPM penanggulangan kebakaran

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :



- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Perangkat Daerah

Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 adalah 86,20% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sasaran | Tahun Pencapaian | Capaian | | |
|----|---|---|------------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | 2023 | 100 | 92 | 92,00% |
| | | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | | | | |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | 2023 | 100 | 67 | 67,0% |
| | | Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|-----|--------|
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | 2023 | 100 | 75 | 75,00% |
| | | Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | | | | |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti | 2023 | 100 | 100 | 100% |
| | | Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi KebutuhanDasarnya di Luar Panti | | | | |
| 5 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosialdaerah kabupaten/kota | 2023 | 100 | 97 | 97,00% |
| | | Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat danSetelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota | | | | |
| Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kab. Kolaka Utara (%) | | | | | | 86,20% |
| | | | | | | |
| Cat: | Realisasi = Hasil Pembagian Formulasi | | | | | |
| | Capaian = Realisasi / Target *100% | | | | | |



3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33.
Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Kolaka Utara

| No | Jenis Belanja | Jumlah Anggaran(Rp) |
|----|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | APBD | 658.716.000 |
| | APBD MURNI | 658.716.000 |
| | APBD DAK NON FISIK | - |
| | DANA BAGI HASIL | - |
| | KERJASAMA | - |
| | OTONOMI KHUSUS | - |
| 2 | NON APBD | - |
| | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) | - |
| 3 | APBN | 151.000.000 |
| | APBN-DEKONSENTRASI | 151.000.000 |
| | APBN-TUGAS PEMBANTUAN | - |
| 4 | DANA LAINNYA | - |
| | Jumlah | 809.716.000 |

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS = 17 Orang
- b. Non PNS = 70 Orang



5. Hasil Capaian

Realisasi capaian dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanandapat dilihat dari tabel 3.34 berikut ini :

| FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NO | JENIS LAYANAN DASAR | CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) | | | APAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR | | | CAPAIAN SPM | KATEGORI |
| | | JUMLAH KLAIM LUAR PANTI | POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKA NREHABSOS LUAR PANTI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Penyandang Disabilitas Terlantar | 46 Orang | 50 Orang | 92% | 135.000.000 | 135.000.000 | 100% | 96% | Sangat Baik |
| 2 | Anak Terlantar | 10 Orang | 15 Orang | 67% | 49.000.000 | 49.000.000 | 100% | 84% | Baik |
| 3 | Lansia Terlantar | 75 Orang | 100 Orang | 75% | 155.468.000 | 148.113.000 | 95,27% | 85% | Baik |
| 4 | Gepeng | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | Sangat Baik |
| 5 | Bencana alam dan sosial | 1584 Jiwa | 1633 Jiwa | 97% | 319.248.700 | 319.062.700 | 99,94% | 98% | Sangat Baik |

Dari tabel 3.34. diatas dapat disimpulkan antara target dan realisasi penerima layanan dasar dan realisasi anggaran bisa dikatakan kurang maksimal dengan rata-rata capaian target penerima manfaat sebesar 86% sementararata-rata realisasi anggaran sebesar 99% hal ini disebabkan oleh data target yang dicanangkan terlalu tinggi sehingga anggaran yang dialokasikan tidak mampu memenuhi target tersebut. Akan tetapi capaian SPM bidang sosial dapat dikatakan baik dengan rata-rata capaian untuk tiap indikator sebesar 87,85%.

6. Permasalahan dan SolusiPermasalahan :

- Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk



pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial Kab. Kolaka Utara;

- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- Kurang *update* nya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama data mengenai komponen sasaran SPM Bidang Sosial sehingga menyebabkan target-target yang di canangkan kurang sesuai dengan realitas di lapangan.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pengalokasian anggaran agar lebih memprioritaskan terhadap pelayanan dasar para PPKS, jika memungkinkan perlunya regulasi yang memprioritaskan alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan SPM di daerah;
- Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perlunya pelatihan teknis terhadap ASN untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
- Melaksanakan *Updating* data secara berkala.

4.7 PROGRAM KEGIATAN

A. URUSAN PENDIDIKAN

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN

| NO | PROGRA M | KEGI ATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|-----|---------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------------|----------------|---------|
| | | | | | (6) | (7) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAB. KOLAKA UTARA | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| 1 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | | | | 9,012,159,000 | 8,915,542,838 | 98.93 % |



| NO | PROGRA M | KEGI ATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|--|---|---------------|--------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| 1 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD | | | | 7,741,427,200 | 7,664,693,138 | 99.01 % |
| | 1 | Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun | Peserta didik | | 0 | | 0 % |
| | 2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun | Kegiatan | | 0 | | 0 % |
| | 3 | Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Peserta didik | | 0 | 0 | 0 % |
| | 4 | Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa | Peserta didik | | 2,608,936,200 | 2,577,258,200 | 98.79 % |
| | 5 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | | 5,132,491,000 | 5,087,434,938 | 99.12 % |
| | 6 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 7,741,427,200 | 7,664,693,138 | 99.01 % |
| 2 | Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan | | | | 56,063,100 | 51,809,900 | 92.41 % |
| | 1 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | | 0 | 0 | 0 % |
| | 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | | 0 | 0 | 0 % |



| NO | PRO GRA M | KE GI AT AN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 3 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | 0 | | 0 % |
| | | 4 | Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | | 51,809,900 | 92.41 % |
| | | 5 | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak | Kegiatan | | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 56,063,100 | 51,809,900 | 92.41 % |
| | 3 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0 % |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |



| NO | PRO GRA M | KE GI AT AN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini | | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 4 | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) | | | 1,214,668,700 | 1,199,039,800 | 98.71 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 714,668,700 | 704,039,800 | 98.51 % |
| | | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 500,000,000 | 495,000,000 | 99.00 % |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 1,214,668,700 | 1,199,039,800 | 98.71 % |
| JUMLAH PROGRAM | | | | | 9,012,159,000 | 8,915,542,838 | 98.93 % |
| 2 | PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR | | | | 58,507,372,631 | 57,202,866,025 | 97.77 % |
| | 5 | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | | | 37,324,104,694 | 36,477,232,217 | 97.73 % |
| | | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 19,152,320,000 | 18,414,506,310 | 96.15 % |



| NO | PRO GRA M | KE GI AT AN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|-----------------|--|--|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 18,171,784,694 | 18,062,725,907 | 99.40 % |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 37,324,104,694 | 36,477,232,217 | 97.73 % |
| | 6 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | | | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17 % |
| | | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 2,548,329,000 | 2,527,238,500 | 99.17 % |
| | 7 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | | | 15,696,488,937 | 15,497,520,308 | 98.73 % |
| | | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 401,946,800 | 340,587,400 | 84.73 % |
| | | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 49,630,000 | 31,990,000 | 64.46 % |
| | | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | 15,244,912,137 | 15,124,942,908 | 99.21 % |
| | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |



| NO | PROGRA M | KEGI ATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|----------|--|--|--------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | | terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | | | | |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 15,696,488,937 | 15,497,520,308 | 98.73 % |
| | 8 | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % | |
| | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Guru | 0 | 0 | 0 % | |
| | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0 % | |
| | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % | |
| | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % | |
| | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % | |
| | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | 0 | 0 | 0 % | |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 9 | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) | | | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91 % |



| NO | PROGRA M | KEGI ATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91 % |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 2,938,450,000 | 2,700,875,000 | 91.91 % |
| JUMLAH PROGRAM | | | | | 58,507,372,631 | 57,202,866,025 | 97.77 % |
| 3 | PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN | | | | 3,689,109,000 | 3,288,319,300 | 89.14 % |
| | 10 | Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) | | | 3,610,623,300 | 3,210,899,300 | 88.93 % |
| | | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 3,477,200,000 | 3,090,200,000 | 88.87 % |
| | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 133,423,300 | 120,699,300 | 90.46 % |
| | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 3,610,623,300 | 3,210,899,300 | 88.93 % |



| NO | PRO GRA M | KE GI AT AN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|---|---|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| 11 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) | | | | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64 % |
| | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | | Unit komunitas | 0 | 0 | 0 % |
| | 2 | Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | | Kegiatan | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 78,485,700 | 77,420,000 | 98.64 % |
| 12 | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| 13 | Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) | | | | 0 | 0 | 0.00 % |



| NO | PRO GRA M | KE GI AT AN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|-----------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0 | 0 | 0 % |
| | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | 14 | Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | 0 | 0 % |



| NO | PROGRA M | KEGI ATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN | | SERAPAN |
|--------------------------|----------|-----------|---|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | (6) | (7) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| KAB. KOLAKA UTARA | | | | | 71,208,640,631 | 69,406,728,163 | 97.47 % |
| | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0 | 0 | 0 % |
| JUMLAH INDIKATOR | | | | | 0 | 0 | 0.00 % |
| JUMLAH PROGRAM | | | | | 3,689,109,000 | 3,288,319,300 | 89.14 % |

B. URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat berikut.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Rp1.007.428.600, | Rp993.398.610,00 | 99% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Rp1.626.721.000,00 | Rp1.515.798.800,00 | 93% |
| 3 | Pelayanan | Pengelolaan Pelayanan | Rp414.519.200,00 | Rp370.960.000,00 | 89% |



| | Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------|
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Rp416.942.000,00 | Rp366.601.600,00 | 88% |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Rp868.263.000,00 | Rp836.512.000,00 | 96% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Rp392.867.000,00 | Rp382.570.500,00 | 97% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Rp396.365.000,00 | Rp395.805.000,00 | 100% |
| | Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | |



| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Rp505.759.400,00 | Rp444.038.982,00 | 88% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Rp197.950.000,00 | Rp194.490.000,00 | 98% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Rp576.115.000,00 | Rp554.367.800,00 | 96% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Rp425.236.800,00 | Rp423.575.000,00 | 100% |

Sumber: Program Informasi dan Humas Dinkes, 2023

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan kinerja. Termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

C. URUSAN PERKERJAAN UMUM

Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum pada pemerintah kabupaten kolaka utara di tunjang oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

Rincian Kegiatan Anggaran SPM Pekerjaan Umum

| No | Prog | Keg | Sub Kegiatan | Satuan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | (%) |
|-----|--|---|--|--------|----------------------|-------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | 8,096,492,099 | 8,045,416,018 | 99,37% |
| 1 | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota | | | 1,320,448,549 | 1,315,106,810 | 99,60% |
| | | 1 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan | SR | 210,000,000 | 210,000,000 | 100% |



| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Perdesaan | | | | |
| | | 2 | Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Unit | 404,700,000 | 402,483,810 | 99,45% |
| | | 3 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan | Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% |
| | | 4 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan | Unit | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% |
| | | 5 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Unit | 555,748,549 | 552,623,000 | 99,44% |
| 2 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 6,466,574,000 | 6,421,865,500 | 99,31% |
| | | 1 | Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat | Rumah Tangga | 6,120,178,000 | 6,120,178,000 | 100% |
| | | 2 | Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Orang | 166,400,000 | 166,400,000 | 100% |
| | | 3 | Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kegiatan | 29,996,000 | 29,996,000 | 100% |
| | | 4 | Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | Dokumen | 150,000,000 | 105,291,500 | 70,19% |
| 3 | Program Penyelenggaraan Jalan | | | | | | |
| | 1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 200,000,000 | 199,543,393 | 99,77% |
| | | 1 | Pekerjaan Rabat Beton Jalan Kompleks IPLT Kolaka Utara | KM | 200,000,000 | 199,543,393 | 99,77% |
| 4 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | | | | | |
| | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 109,469,550 | 108,900,315 | 99,48% |
| | | 1 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pendataan dan Validasi data Rumah Tangga yang belum memiliki akses SPALD-S) | Laporan | 109,469,550 | 108,900,315 | 99,48% |

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Kolaka Utara Serta Realisasinya Tahun Anggaran 2023.

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALIASASI FISIK (%) |
|---------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 32,640,000 | 32,433,000 | 99,36 |
| | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 411,025,000 | 410,939,700 | 99,97 |
| JUMLAH | | | 433,665,000 | 443,372,700 | 99,93 |

Jika melihat tabel di atas maka tentunya kita bertanya mengapa anggaran SPM Bidang Perumahan masih minim, ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Anggaran SPM bidang perumahan belum bisa dimaksimalkan karena masih banyak sub kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan anggaran prioritas pada kegiatan lain.

E. URUSAN TRANTIBLINMAS

Untuk merealisasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan Program dan kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Program Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

| No | Uraian Kegiatan | Alokasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 |
|----|---|---|
| I | Program Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 3.310.843.000 |
| I | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.116.159.000 |



| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 66.552.000 |
| 2 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 2.981.770.000 |
| 3 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 65.637.000 |
| 4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 121.102.000 |
| II | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 73.582.000 |
| 1 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 73.582.000 |

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan sub urusan kebakaran Oleh Dinas Kebakaran kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di kabupaten Kolaka Utara terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kebakaran Kab. Kolaka Utara Serta Realisasinya Tahun Anggaran 2023.

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALIASAS I FISIK (%) |
|----|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.662.301.300 | 1.662.241.300 | 100 |



| | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| AN NON KEBAKARAN | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 25.444.700 | 25.444.700 | 100 |
| | Investigasi Kejadian Kebakaran | 66.119.700 | 66.119.700 | 100 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 93.286.700 | 93.286.700 | 100 |
| JUMLAH | | 1.847.152.400 | 1.847.092.400 | 100 |

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Kab. Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM
BPBD Kab. Kolaka Utara dan Realisasinya Tahun 2022**

| NO | KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | PAGU DANA (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALISASI FISIK (%) |
|----|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. Kolaka Utara | 150.000.000,- | 150.000.000,- | 100 |
| 2 | Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Penanganan dan Mitigasi Bencana | 67.615.400 | 67.615.400 | 100 |
| | | Penanganan Pasca Bencana | 83.845.000 | 83.845.000 | 100 |
| | | Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana | 300.784.000 | 300.784.000 | 100 |
| | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi korban Bencana | 41.000.000 | 41.000.000 | 100 |



| | | | |
|--------|---------------|---------------|-----|
| JUMLAH | 643.244.400,- | 643.244.400,- | 100 |
|--------|---------------|---------------|-----|

F. URUSAN SOSIAL

Program kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8.
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian
SPM Bidang Urusan Sosial Kab. Kolaka Utara Serta Realisasinya Tahun 2023

| No | Program | Kegiatan/subkegiatan | Pagu Dana (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp) | Realisasi Fisik (%) |
|--------|-----------------------------|---|----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 339.468.000 | 331.988.000 | 97,80 |
| | | - Penyediaan permakanan | 4.500.000 | 4.500.000 | 100% |
| | | - Penyediaan Sandang | 8.875.000 | 8.875.000 | 100% |
| | | - Penyediaan Alat bantu | 6.982.000 | 6.977.000 | 99,93% |
| | | - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 4.500.000 | 4.500.000 | 100% |
| | | - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 33.908.000 | 33.666.000 | 99,29% |
| | | - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 200.170.000 | 193.029.000 | 96,43% |
| | | - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 80.533.000 | 80.441.000 | 99,89% |
| 2 | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota | 319.248.700 | 319.062.700 | 99,94 |
| | | - Penyediaan Makanan | 121.764.700 | 121.593.700 | 99,86 |
| | | - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 197.484.000 | 197.469.000 | 99,99 |
| Jumlah | | | 658.716.700 | 651.050.700 | 98,84 |



BAB V

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan.

Secara substansif, penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normatif, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan 24 urusan wajib, 7 urusan pilihan, pelaksanaan fungsi penunjang, pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan perangkat daerah, DPRD, Masyarakat, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan serta organisasi profesi. Prinsip yang dijadikan acuan dalam penetapan kebijaksanaan prioritas adalah sistem pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, atau dengan kata lain bahwa pembangunan yang dilakukan disusun sebagai suatu proses jangka panjang yang berkesinambungan dan pelaksanaannya tidak mengganggu keseimbangan lingkungan lingkungan hidup.

Pada masa-masa mendatang, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan Visi serta Misi Kabupaten Kolaka Utara yaitu keadaan masyarakat Kolaka Utara yang lebih maju, sejahtera dan berintelektual tinggi.



Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pelaksana pembangunan, jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Semoga **Allah Subhanahu Wata'la** senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara yang sama-sama kita cintai ini, amiiin.

Lasusua, Maret 2024

Bupati Kolaka Utara

SUKANTO TODING

LAMPIRAN

PELAPORAN IKK 2023
KABUPATEN KOLAKA UTARA

| No. IKK | Kategori Urusan | Urusan | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | PEMDA | |
|---------|---|------------|--|---|--|---------|--|
| | | | | | | Capaian | Keterangan |
| 1.a.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 4581. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 5209 | 87,94 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak PAUD yang memerlukan pembenahan sapsas 2. Masih banyak tenaga pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan S1 |
| 1.a.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 15877. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 16145 | 98,34 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|---|---|---|-------|--|
| | | | <p>sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>&nbsp;</p> | | | | |
| 1.a.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pendidikan | <p>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</p> <p>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</p> <p>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</p> <p>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 6400. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 7944 | 80,56 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--|---|--|-------|---|
| 1.b.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 2048. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 2539 | 80,66 | 1. dari 2.465 ibu hamil, 417 tidak memeriksa kehamilannya secara rutin 2. Tenaga Kesehatan belum memaksimalkan sweeping ibu hamil untuk meningkatkan jumlah k4 2. Partisipasi masyarakat masih kurang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di |
| 1.b.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 2133. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 2424 | 88,00 | 1. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melahirkan difasyankes daerah terkait 2. Pencatatan dan pelaporan Tenaga di Puskesmas yang belum efektif 3. |
| 1.b.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2043. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 2336 | 87,46 | 1. Dari 2.140 jumlah Bayi Lahir Hidup, 97 diantaranya tidak diperiksa secara lengkap hingga umur 28 hari. 2. Kurangnya partisipasi masyarakat memeriksakan kesehatan bayi baru lahir secara lengkap minimal 3 kali kunjungan hinga umur 28 hari sejak kelahira |
| 1.b.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 7829. Jumlah balita di kabupaten/kota = 8370 | 93,54 | Terdapat kunjungan berulang, di beberapa wilayah, karena tidak adanya format khusus terkait kunjungan balita |
| 1.b.6 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 4409. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 4504 | 97,89 | Beberapa anak tidak hadir pada saat penjarangan di sekolah |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---|---|---|--------|--|
| 1.b.7 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 71757. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 92062 | 77,94 | 1. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan skrining di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat 2. Pelaksanaan sweeping/ jemput bola oleh tenaga kesehatan di puskesmas yang belum maksimal terkait edukasi dan pelayanan skrining kesehatan |
| 1.b.8 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 6924. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 6953 | 99,58 | |
| 1.b.9 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 13494. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 20258 | 66,61 | 1. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ke Pos Bina Terpadu (Posbindu) karena sarana dan prasarana yang belum lengkap 2. Adanya pemahaman masyarakat bahwa penyakit tersebut tidak perlu diperiksa cukup dengan meminum obat |
| 1.b.10 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 867. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 681 | 127,31 | 1. Peningkatan pelayanan karena pemanfaatan Telemedicine 2. Pemenuhan medio promosi kesehatan termasuk media infografis berupa panflet 3. Gejala penyakit DM mudah |
| 1.b.11 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Kesehatan | 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 179. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 179 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|--------|--|
| | | | <p>12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</p> <p>13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD</p> <p>14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</p> | | | | |
| 1.c.5 | <p>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</p> | <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> | | <p>1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi</p> <p>2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</p> <p>3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</p> <p>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan</p> <p>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota</p> <p>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota</p> <p>8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat</p> | <p>Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 2537.</p> <p>Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 2537</p> | 100,00 | <p>1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait penegakan PERDA IMB</p> <p>2. Masih kurangnya tenaga (PPNS) yang melakukan pengendalian dan penegakan PERDA</p> |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|---|--|--|--------|--|
| 1.c.6 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 267.413. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 496.93 | 53,81 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah 2. Sumber Daya Manusia Masih Kurang 3. SK Jalan Tahun 2023 belum di tandatangani sehingga data panjang jalan kabupaten belum ter update |
| 1.c.7 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis 12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota 13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis = 164. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 164 | 100,00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Terbatasnya Anggaran Pemda Untuk Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|--------|---|
| | | | <p>dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p> <p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> | | | | |
| 1.c.8.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <p>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir</p> <p>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota</p> <p>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD</p> | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 174. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 174 | 100,00 | 1. Masih Terbatasnya SDM Pengawas Jasa Konstruksi |

yang bersumber dari APBN

7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya
8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala
9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota
10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.
11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis
12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota
13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota
14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota
19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota
20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota
21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota
22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|--------|--|
| 1.e.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 1500. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 2300 | 65,22 | Kurangnya Alokasi dana yang diberikan untuk peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan |
| 1.e.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 60. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 60 | 100,00 | |
| 1.e.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran | ; Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ; ; ; ; | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 85. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 107 | 79,44 | Terbatasnya Anggaran, Sarana dan Prasarana yang belum memadai dan Kurangnya tenaga SDM |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|--|-------|---|
| 1.e.6 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran | 12,24 | Terbatasnya Anggaran, Sarana dan Prasarana belum memadai dan Kurangnya tenaga SDM |
| 1.e.7 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan 15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 131. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 165 | 79,39 | Validitas data anak terlantar belum memadai sehingga data target hanya berdasarkan asumsi di tahun tahun sebelumnya, terbatasnya personil pekerja sosial yang ada di lapangan |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--|---|--|-------|--|
| | | | <p>lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga</p> <p>20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk</p> | | | | |
| 1.f.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | Sosial | <p>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan</p> <p>2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang</p> <p>3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki</p> <p>4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan</p> <p>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</p> <p>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</p> | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 1584. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 1633 | 97,00 | Keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan tidak cukup memenuhi kebutuhan semua korban bencana |
| 1.f.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | <p>1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.</p> <p>2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.</p> | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 4. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 12 | 33,33 | Pelaksanaan kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja menyesuaikan dengan anggaran tahun 2023 |
| 2.a.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Tenaga Kerja | <p>1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster</p> <p>2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi</p> <p>3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan</p> <p>4. Persentase LPK yang terakreditasi</p> <p>5. Persentase LPK yang memiliki perizinan</p> <p>6. Jumlah penganggur yang dilatih</p> <p>7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan</p> <p>8. Persentase penyerapan lulusan</p> <p>9. Lulusan bersertifikat kompetensi</p> <p>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan</p> <p>11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</p> | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 668. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 1838 | 36,34 | Masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi, keterbatasan anggaran dan SDM dalam pelaksanaan ujian kompetensi untuk para tenaga kerja. |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--------|--|
| | | | <p>Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya</p> <p>14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk</p> | | | | |
| 2.a.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <p>1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG</p> <p>2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota</p> | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 87870600204. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 843512630581.53 | 10,42 | adanya keterlambatan data dukung ARG |
| 2.g.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <p>1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</p> <p>3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan</p> <p>5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)</p> | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 23. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 23 | 100,00 | ada kasus yang tidak di laporkan karna mereka menganggap itu aib |
| 2.g.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <p>1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan</p> <p>2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih</p> <p>3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota</p> <p>5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi</p> <p>6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi</p> <p>7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</p> | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 10. Jumlah penduduk perempuan = 45657 | 21,90 | adanya kasus yang tidak dilaporkan karna menganggap aib |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------|--|---|--|--------|--|
| 2.i.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; | Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 1. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1 | 100,00 | |
| 2.i.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota | Tersedianya tanah untuk masyarakat | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 259194. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 410940.04 | 63,07 | |
| 2.i.5 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pertanahan | 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi; | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 1. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1 | 100,00 | |
| 2.i.6 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup | 1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | | 80,70 | Menurunnya Kualitas IKLH dari tahun sebelumnya disebabkan Maraknya Kegiatan Pembukaan lahan secara ilegal dan kegiatan Pertambangan di Kab. Kolaka Utara |
| 2.j.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Lingkungan Hidup | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 14807.25. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 20511.25 | 72,19 | Keterbatasan Anggaran untuk melengkapi sarana dan Prasarana Untuk Pengelolaan Sampah dan Belum Memadahi SDM dalam Pengelolaan Persampahan serta akses jalan tidak memungkinkan menjangkau keseluruhan desa dan kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|--|-------|---|
| 2.k.1.4 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | Persentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 10. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 17 | 58,82 | Masih kurangnya anggaran yang diluncurkan ke desa-desa dan masih minimnya SDM di desa. |
| 2.l.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pemberdayaan masyarakat dan desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 98 | 0,00 | Masih kurangnya anggaran yang diluncurkan ke desa-desa dan masih minimnya SDM di desa sehingga desa belum mampu untuk mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing. |
| 2.l.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | TFR (Angka Kelahiran Total) | | 2,53 | |
| 2.m.1 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern = 14064. Jumlah Pasangan Usia Subur = 21006 | 66,95 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|--|---|--|-------|--|
| 2.o.3 | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar | Koperasi, usaha kecil dan menengah | <p>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</p> <p>9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>&nbsp;</p> | Meningkatnya Koperasi yangberkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 45. Jumlah seluruh koperasi aktif = 201 | 22,39 | Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan Pengurus Koperasi |
|-------|---|------------------------------------|--|---|--|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---|--|--|-------|---|
| | | | <p>14. Pembentukan tim ahli cagar budata kab/kota</p> <p>15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya</p> <p>16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman</p> <p>17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota</p> <p>18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman</p> <p>19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat</p> | | | | |
| 2.u | <p>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</p> | Perpustakaan | <p>1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk</p> <p>2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat</p> <p>3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk</p> <p>4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</p> | | 67,80 | |
| 2.v.1 | <p>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</p> | Perpustakaan | <p>1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</p> <p>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</p> <p>3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p> | | 76,14 | |
| 2.v.2 | <p>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</p> | Kearsipan | <p>1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p>4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)</p> <p>&nbsp;</p> | | 71,13 | <p>- Kurangnya tenaga fungsional yang profesional karena fungsional Arsiparis hanya melalui jalur penyetaraan</p> <p>- Belum mengikuti diklat atau bimtek arsiparis</p> |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|---|--|--|---------|--|
| 3.b.1 | Urusan Pilihan | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat <p>&nbsp;</p> | <p>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | <p>(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 239140. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 103579</p> | 230,88 | |
| 3.b.2 | Urusan Pilihan | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat <p>&nbsp;</p> | <p>Tingkat hunian akomodasi</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> | <p>Jumlah kamar yang terjual = 8952. Jumlah kamar yang tersedia = 361</p> | 2479,78 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|---|---|--|-------|--|
| 3.b.3 | Urusan Pilihan | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat <p>&nbsp;</p> | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 201040000000. Total PDRB Berlaku = 1122694000000 | 1,79 | |
| 3.b.4 | Urusan Pilihan | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat <p>&nbsp;</p> | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 402712000. Total realisasi PAD = 61397419442.42 | 0,66 | |
| 3.b.5 | Urusan Pilihan | Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota <p>&nbsp;</p> | Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 358.94. luas panen = 2379 | 15,09 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------------------|--|--|---|-------|--|
| 3.c.1 | Urusan Pilihan | Pertanian | 1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 63. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 74 | 85,14 | masih membutuhkan obat/vaksin serta operasional untuk menjangkau daerah - daerah terdampak |
| 3.c.2 | Urusan Pilihan | Kehutanan | 1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA | | | 0,00 | Tic |
| 3.d | Urusan Pilihan | Energi dan Sumber Daya Mineral | Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi | 0,00 | Tic |
| 3.e | Urusan Pilihan | Perdagangan | 1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : 5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 29. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 31 | 93,55 | |
| 3.f.1 | Urusan Pilihan | Perdagangan | 1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 603. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 3114 | 19,36 | Kurangnya SDM Fungsional Penera bersertifikat |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|--|--|--|--------|--|
| 4.b.4 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) ; ; ; | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1423. Jumlah seluruh pegawai = 1606 | 88,61 | |
| 4.c.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) ; ; | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 383. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1606 | 23,85 | |
| 4.c.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Kepegawaian | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) ; ; ; | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 56. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 383 | 14,62 | |
| 4.c.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD ; ; | Realisasi Belanja = 1016980016020.5. Total Belanja APBD = 1062962031086 | 4,33 | |
| 4.d.1 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD ; ; | Total PAD dalam realisasi = 61397419442.42. Total PAD dalam APBD = 53131196977 | 15,56 | |
| 4.d.2 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | | Manajemen Aset ; ; ; | | 100,00 | |
| 4.d.3 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | Manajemen Keuangan | | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya ; | Nilai realisasi SILPA = 14900750864.75. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 910742190179 | 1,64 | |

